

**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH MELALUI
PROGRAM KOTAKU DI KELURAHAN TEGALSARI,
KOTA TEGAL**

TUGAS AKHIR

TP216012001



Disusun Oleh:

ZAIMAR RAFI SALMAN ISYA

31201900057

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH MELALUI
PROGRAM KOTAKU DI KELURAHAN TEGALSARI,
KOTA TEGAL**

**TUGAS AKHIR
TP216012001**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Perencanaan Wilayah dan Kota



Disusun Oleh:

ZAIMAR RAFI SALMAN ISYA

31201900057

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zaimar Rafi Salman Isya
NIM : 31201900057
**Status : Mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota,
Fakultas Teknik, Universitas Islam Sultan Agung**

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir/Skripsi saya dengan judul “**Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program KOTAKU di Kelurahan Tegalsari, Kota Tegal**” adalah karya ilmiah yang bebas dari plagiasi. Jika kemudian di kemudian hari terbukti plagiasi dalam Tugas Akhir/Skripsi ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 Agustus 2024
Yang menyatakan,

Zaimar Rafi Salman Isya
NIM. 31201900057

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Ir. Mohammad Agung Ridlo, M. T
NIK.210296019

Agus Rochani, S.T., M.T
NIK. 230202048

HALAMAN PENGESAHAN

**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENANGANAN
PERMUKIMAN KUMUH MELALUI PROGRAM KOTAKU DI
KELURAHAN TEGALSARI, KOTA TEGAL**

Tugas Akhir diajukan kepada:
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik
Universitas Islam Sultan Agung

Oleh:

ZAIMAR RAFI SALMAN ISYA
NIM. 31202000054

**Tugas Akhir ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan
diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh
gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota pada 27 Agustus 2024**

DEWAN PENGUJI

Dr. Ir. Mohammad Agung Ridlo, M.T. Pembimbing I
NIK. 210296019

Agus Rochani, S.T., M.T. Pembimbing II
NIK. 230202048

Dr. Hj. Mila Karmilah, S.T., M.T. Penguji
NIK. 210298024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Teknik

Ketua Program Studi Perencanaan
Wilayah dan Kota

Dr. Abdul Rochim S.T., M.T.
NIK. 210200031

Dr. Hj. Mila Karmilah, S.T., M.T.
NIK.210298024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir dengan tepat waktu. Dengan selesainya laporan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak. Sehingga pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian laporan ini, yaitu:

1. Dr. Abdul Rochim, S.T., M.T. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. Hj. Mila Karmilah, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan waktu luangnya dan membantu dalam penyusunan penelitian ini atas segala masukan serta arahan dan senantiasa selalu sabar dalam memberika pengarahan, serta bimbingannya.
3. Dr. Ir. Mohammad Agung Ridlo, M.T. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu luangnya dan membantu dalam penyusunan penelitian ini atas segala masukan serta arahan dan senantiasa selalu sabar dalam memberika pengarahan, serta bimbingannya.
4. Agus Rochani, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu luangnya dan membantu dalam penyusunan penelitian ini atas segala masukan serta arahan dan senantiasa selalu sabar dalam memberika pengarahan, serta bimbingannya.
5. Dr. Hj. Mila Karmilah, S.T., M.T. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan waktu luangnya dan membantu dalam penyusunan penelitian ini atas segala masukan serta arahan dan senantiasa sabar dalam memberikan masukan.
6. Hasti Widyasamratri, S.Si., M.Eng., Ph.D dan Dr. Hj. Mila Karmilah, S.T., M.T. sebagai dosen pengampu mata kuliah Metodologi Riset
7. Kedua orang tua serta teman-teman Planologi 19 yang telah membantu memberikan motivasi dan doa dalam penyusunan laporan penelitian ini sehingga dapat selesai tepat waktu.

Penyusun menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga laporan Metodologi Riset ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak serta

untuk mahasiswa adik tingkat yang membutuhkan khususnya mahasiswa Prodi
Perencanaan Wilayah dan Kota.

Semarang, 27 Agustus 2024

Zaimar Rafi Salman Isya



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

Artinya : Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

[QS. Al-Baqarah : 216]

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

Artinya : Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

[QS. Al-Insyirah : 5]

MOTTO

“Konsistensi adalah kunci kesuksesan”

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan dan membekali saya dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya Tugas Akhir/Skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Segala perjuangan panjang saya hingga berada pada titik ini, saya persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, menjadi alasan saya berjuang menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi ini.

1. Trisnawati, seseorang yang biasa saya sebut mamah. Perempuan hebat yang selalu menjadi penyemangat dalam hidup saya. Saya persembahkan Tugas Akhir/Skripsi ini untuk mamah. Terimakasih telah melahirkan, merawat dan membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang serta selalu berjuang untuk kehidupan saya. Terimakasih selalu menjadi tempat terbaik saya dalam menceritakan segala keluh kesah kehidupan ini, terimakasih telah mendidik anak laki-laki mamah sehingga dapat tumbuh dewasa dan bisa berada di posisi saat ini.
2. Setyawan Sugiharto, seorang yang biasa saya sebut bapa dan berhasil membuat saya selalu bangkit dari kata menyerah. Terimakasih telah merawat, membesarkan dan mendidik saya menjadi anak laki-laki yang kuat dan tangguh. Saya persembahkan Tugas Akhir/Skripsi ini untuk bapa.
3. Sabrina Putri Ghaisani, adik perempuan saya. Terimakasih untuk doa dan dukungan yang selalu diberikan untuk saya menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ir. Mohammad Agung Ridlo, M.T. dan Agus Rochani, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi saya. Terimakasih atas waktu, bimbingan, kritik dan saran, serta motivasi yang diberikan hingga saya mampu menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi saya. Menjadi salah satu dari anak bimbingan kalian merupakan nikmat yang hingga saat

ini selalu saya syukurkan. Terimakasih ibu dan bapak, semoga jerih payah kalian terbayarkan dan selalu dilimpahkan kesehatan.

5. Teruntuk teman-teman Planologi angkatan 2019 yang selalu menemani saya mengerjakan skripsi, yang selalu memberi semangat dan motivasi. Canda tawa kalian secara tidak langsung selalu memberi semangat dalam proses menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi ini.



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zaimar Rafi Salman Isya

NIM : 31201900057

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas : Fakultas Teknik

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir dengan judul:

**“Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Permukiman Kumuh
Melalui Program KOTAKU Di Kelurahan Tegalsari, Kota Tegal”**

dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh sungguh. Apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Agustus 2024

Zaimar Rafi Salman Isya

ABSTRAK

Salah satu permasalahan yang cukup kompleks di Kota Tegal adalah permukiman kumuh. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Tegal Nomor 648/048.1/2022, Kota Tegal masih memiliki perumahan dan permukiman kumuh seluas 191,15 ha. Dari tujuh indikator kumuh, faktor utama kekumuhan di Kota Tegal adalah pengelolaan sampah dan drainase yang belum memadai. Penanganan Kawasan permukiman kumuh dilakukan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam penanganan pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tegalsari, Kota Tegal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif rasionalistik. Temuan studi dari hasil penelitian ini adalah bentuk partisipasi Masyarakat dalam proses awal amsuknya KOTAKU Masyarakat diberi pemahaman terkait tujuan dan sasaran KOTAKU melalui sosialisasi, bentuk partisipasi dalam pengambilan Keputusan adalah Masyarakat hadir dalam pertemuan untuk memberikan usulan atau ide terkait dengan penanganan permukiman kumuh melalui KOTAKU, bentuk partisipasi Masyarakat dalam proses pelaksanaan Masyarakat membantu perbaikan jalan drainase serta memberikan minuman ke para pekerja, bentuk partisipasi Masyarakat dalam proses evaluasi dan monitoring yaitu Masyarakat membentuk kelompok pemelihara yang bertujuan untuk melaporkan kepada pemerintah jika terdapat kendala.

Kata Kunci: Partisipasi, Permukiman Kumuh, Program KOTAKU



ABSTRACT

One of the complex problems in Tegal City is slum settlements. Based on the Decree (SK) of the Mayor of Tegal Number 648/048.1/2022, Tegal City still has housing and slum settlements covering an area of 191.15 ha. Of the seven indicators of slums, the main factors of slums in Tegal City are inadequate waste management and drainage. Handling of slum areas is carried out through the City Without Slums Program (KOTAKU). This research aims to determine the level of community participation in handling slum areas in Tegalsari Village, Tegal City. The research method used in this research is a rationalistic qualitative descriptive method. The study findings from the results of this research are a form of community participation in the initial process of joining KOTAKU. The community is given an understanding regarding the goals and objectives of KOTAKU through socialization. The form of participation in decision making is that the community attends meetings to provide suggestions or ideas related to handling slum settlements through KOTAKU. Community participation in the implementation process. The community helps repair drainage roads and provides drinks to workers. A form of community participation in the evaluation and monitoring process is that the community forms a maintenance group whose aim is to report to the government if there are obstacles.

Keywords: *participation, slum settlements, KOTAKU program*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan dan Sasaran	2
1.3.1 Tujuan Penelitian	2
1.3.2 Sasaran Penelitian.....	3
1.4 Ruang Lingkup	3
1.4.1 Ruang Lingkup Substansi	3
1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah.....	3
1.5 Metodologi Pendekatan Penelitian	9
1.6 Metode Pelaksanaan Studi	9
1.6.1 Tahap Persiapan	10
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	11
1.6.3 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data	16
1.6.4 Tahap Analisis Data	17
1.6.5 Pengabsahan Data.....	17
1.6.6 Penulisan Hasil Penelitian	17
1.7 Keaslian Penelitian	18
1.8 Kerangka Berpikir	23

1.9	Sistematika Pembahasan	24
------------	-------------------------------------	-----------

BAB II

	KAJIAN TEORI TENTANG TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH.....	25
--	---	-----------

2.1.	Program KOTAKU.....	25
2.2.	Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	26
2.2.1.	Partisipasi Masyarakat	26
2.2.2.	Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	29
2.3.	Pengertian Permukiman dan Permukiman Kumuh	30
2.3.1	Pengertian Permukiman.....	30
2.3.2	Pengertian Permukiman Kumuh.....	30
2.3.2	Kawasan Kumuh.....	33

BAB III

	KONDISI EKSISTING PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN TEGALSARI, KOTA TEGAL	41
--	--	-----------

3.1	Lokasi Administrasi.....	41
3.1.1	Kondisi Kependudukan	43
3.1.2	Karakteristik Fisik Kelurahan Tegalsari	43
3.1.3	Karakteristik Permukiman Kelurahan Tegalsari.....	44
3.2	Perkembangan Permukiman Kumuh.....	46
3.3	Faktor yang Mempengaruhi Permukiman Kumuh	49
3.3.1	Keteraturan Bangunan	49
3.3.2	Jaringan Jalan	50
3.3.3	Jaringan Drainase.....	53
3.3.4	Pengelolaan Persampahan	56
3.3.5	Jaringan Air Limbah	59
3.3.6	Jaringan Air Bersih	60
3.3	Gambaran Umum Program KOTAKU	61
3.3.1	Sejarah Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kampung Nelayan Tegalsari.....	61

3.3.2 Pelaksana Program	62
3.4 Proses pelaksanaan.....	64
3.4.1 Sosialisasi program KOTAKU di Kampung Nelayan Tegalsari	64
3.4.2 Penataan Prasarana Lingkungan	65

BAB IV

ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN TEGALSARI, KOTA TEGAL	72
---	-----------

4.1 Analisis Bentuk dan Analisis Tingkat Partisipasi Dalam Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Tegalsari	72
4.1.1 Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Saat Awal Masuknya Program KOTAKU	73
4.1.2 Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan	75
4.1.3 Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pelaksanaan ..	77
4.1.4 Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Evaluasi dan Monitoring	82
4.2 Temuan Studi	89

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	98
---	-----------

5.1 Kesimpulan.....	98
5.2 Rekomendasi	99

DAFTAR PUSTAKA.....	100
----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Kebutuhan Data Primer.....	14
Tabel I. 2 Kebutuhan Data Sekunder	15
Tabel I. 3 Keaslian Penelitian.....	19
Tabel I. 4 Keaslian Fokus Penelitian.....	22
Tabel I. 5 Keaslian Lokasi Penelitian.....	22
Tabel II. 1 Tangga Tingkatan Partisipasi Arnstein	29
Tabel II. 2 Matriks Teori Penelitian	36
Tabel II. 3 Variabel, Indikator, dan Parameter.....	39
Tabel III. 1 Jumlah Penduduk Kelurahan Tegalsari Tahun 2022	43
Tabel III. 2 Kegiatan Penataan Sub Kawasan Segmen Siwatu	66
Tabel III. 3 Daftar Kegiatan Terpadu Program KOTAKU Kelurahan Tegalsari Sub Kawasan Siwatu	67
Tabel IV. 1 Indikasi Program KOTAKU di Kelurahan Tegalsari.....	78
Tabel IV. 2 Perubahan Kondisi Kekumuhan Kota Tegal.....	83
Tabel IV. 3 Temuan Studi Berdasarkan Kajian Teori	90
Tabel IV. 4 Temuan Studi Hasil Pembahasan.....	92



DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1	Peta Administrasi Kota Tegal.....	4
Gambar I. 2	Peta Administrasi Kecamatan Tegal Barat.....	5
Gambar I. 3	Peta Administrasi Kelurahan Tegal Barat	6
Gambar I. 4	Peta Kawasan yang Belum Terdampak Program KOTAKU Kelurahan Tegalsari	7
Gambar I. 5	Peta Kawasan Program KOTAKU Kelurahan Tegalsari	8
Gambar I. 6	Kerangka Susunan Penelitian	9
Gambar I. 7	Kerangka Berpikir.....	23
Gambar III. 1	Peta Administrasi Kelurahan Tegalsari	42
Gambar III. 2	Area Parkir Perahu	46
Gambar III. 3	Peta Lokasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Tegalsari	48
Gambar III. 4	Peta Time Series Permukiman Kelurahan Tegalsari	49
Gambar III. 5	Kondisi Akses Jalan Lingkungan di Kampung Nelayan Tegalsari	51
Gambar III. 6	Peta Jaringan Jalan	52
Gambar III. 7	Kondisi Jaringan Drainase Kampung Nelayan Tegalsari.....	53
Gambar III. 8	Peta Jaringan Drainase	55
Gambar III. 9	Kondisi Persampahan di Kampung Nelayan Tegalsari	56
Gambar III. 10	Tempat Sampah di Kampung Nelayan Tegalsari	57
Gambar III. 11	Peta Jaringan Persampahan	58
Gambar III. 12	Kondisi Jaringan Air Limbah di Kelurahan Tegalsari.....	59
Gambar III. 13	Pengelolaan Air Limbah di Kelurahan Tegalsari	60
Gambar III. 14	Struktur Organisasi Pengelola Program KOTAKU.....	63
Gambar III. 15	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Tegalsari Kota Tegal.....	63
Gambar IV. 1	Media Sosialisasi Program KOTAKU di Kelurahan Tegalsari	74
Gambar IV. 2	Perbedaan Kondisi Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Program KOTAKU	80
Gambar IV. 3	Proses Pelaksanaan Program KOTAKU.....	81

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan seiring berjalannya waktu, mulai dari perkembangan kondisi internal dan eksternal kota. Kepemilikan lahan kota yang semakin berkurang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, hal itu akan mengakibatkan masalah baru berupa permukiman kumuh. Permukiman kumuh akan menyebabkan beberapa dampak negative berupa kemiskinan, sanitasi dan masalah lingkungan. (Akbar, 2018).

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman tidak layak huni yang disebabkan bangunan yang tidak teratur, kualitas bangunan dan sarana prasarana belum memenuhi standar. Hal ini, dipengaruhi oleh kondisi rendahnya ekonomi Masyarakat serta prasarana yang sesuai. Selain itu permukiman kumuh dapat memberikan penilaian jelek terhadap pengelolaan pemerintah terhadap kebutuhan pelayanan hidup Masyarakat (Akbar, 2018).

Kota Tegal mempunyai wilayah dengan karakteristik permukiman pesisir yang di dominasi oleh nelayan. Wilayah ini sering terjadi kenaikan permukaan air laut dan rob. Selain itu, Masyarakat yang tinggal di Kawasan pesisir masih minim terkait mitigasi bencana secara fisik, finansial dan pertimbangan dalam jangka Panjang. Kota ini rentan terkena bencana, seperti bencana alam terkait perubahan iklim. Selain bencana alam, Kota Tegal juga memiliki permasalahan yang belum teratasi dengan baik, yaitu permukiman kumuh yang terletak di Kelurahan Tegalsari.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Tegal Nomor 648/048.1/2022, Permukiman kumuh di Kota ini yaitu seluas 191,15 ha. Salah satu faktor utama permukiman kumuh yaitu system pengelolaan kebersihan belum sesuai. (*Wali Kota Tegal, H. Dedy Yon Supriyono, 2023*) permasalahan kumuh ini akan mendapat perhatian Bersama dalam menanggulangnya. Sampai Tahun 2022 Kota Tegal berhasil mengurangi wilayah permukiman kumuh sebesar 85,61 ha,

berkurang dari 191,15 ha menjadi 105,54 ha, yang di dukung oleh pihak yang terlibat.

Pada tahun 2019 Kelurahan Tegalsari sudah terealisasikan program KOTAKU tanpa kumuh namun, hingga tahun 2023 masih terdapat kawasan kumuh. Di Kelurahan Tegalsari masih terdapat hunian tidak layak, masih terdapat penyumbatan saluran, aksesibilitas yang belum memadai, dan sering terjadi banjir rob. Kelurahan Tegalsari merupakan salah satu kelurahan yang berada di pesisir Kota Tegal dan Kawasan yang masih kumuh. Masyarakat di Kelurahan Tegalsari lebih di dominasi oleh Masyarakat yang bermatapencaharian sebagai nelayan. Kawasan pesisir dalam penanganannya akan mengalami perbedaan, dikarenakan pelayanan untuk Masyarakat pesisir belum merata, seperti sarana pelayanan dasar terbatas, kurang terpelihara lingkungan permukiman dalam aspek Kesehatan, kurangnya air bersih dan fasilitas sanitasi, kondisi rumah warga belum termasuk kategori layak dan pendapatan Masyarakat rendah.

Pentingnya penelitian ini yaitu mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam penanganan kawasan permukiman kumuh melalui program KOTAKU di Kelurahan Tegalsari, Kota Tegal. Harapannya pengembangan hasil analisis penelitian ini dapat bermanfaat dalam Menyusun penelitian selanjutnya dan dapat memberikan arahan terkait kondisi permukiman kumuh.

1.2 Rumusan Masalah

Pentingnya penelitian ini berfokus pada tingkat partisipasi masyarakat yang ada di Kelurahan Tegalsari pada kawasan permukiman kumuh yang sudah terlaksana program KOTAKU dan yang belum terlaksana Program KOTAKU, serta bagaimana cara penanganan dan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tegalsari.

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam penanganan kawasan permukiman kumuh melalui program KOTAKU di Kelurahan Tegalsari, Kota Tegal.

1.3.2 Sasaran Penelitian

1. Mengetahui program KOTAKU di Kelurahan Tegalsari, Kota Tegal
2. Mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tegalsari, Kota Tegal
3. Menganalisis tingkat partisipasi Masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh melalui program KOTAKU di Kelurahan Tegalsari, Kota Tegal

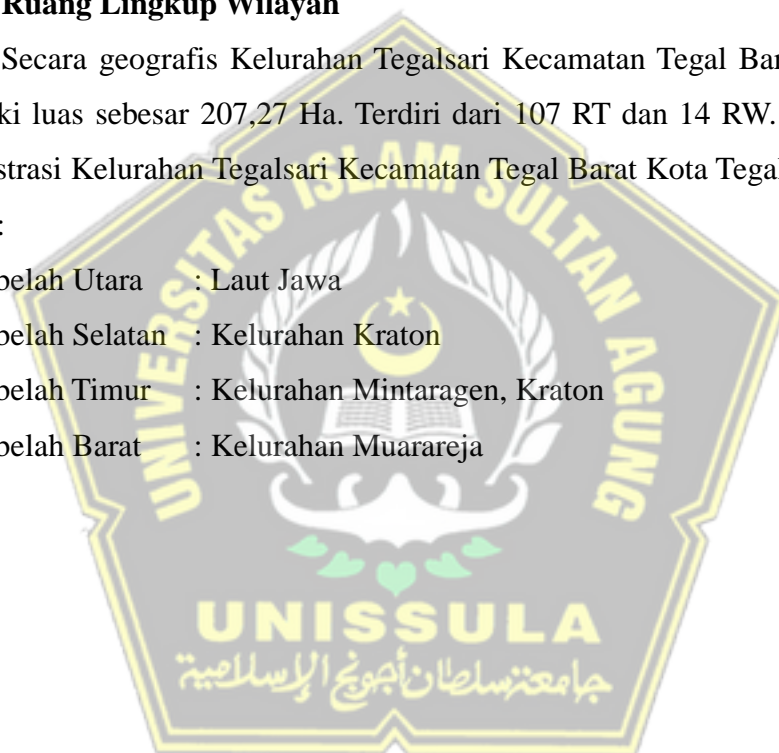
1.4 Ruang Lingkup

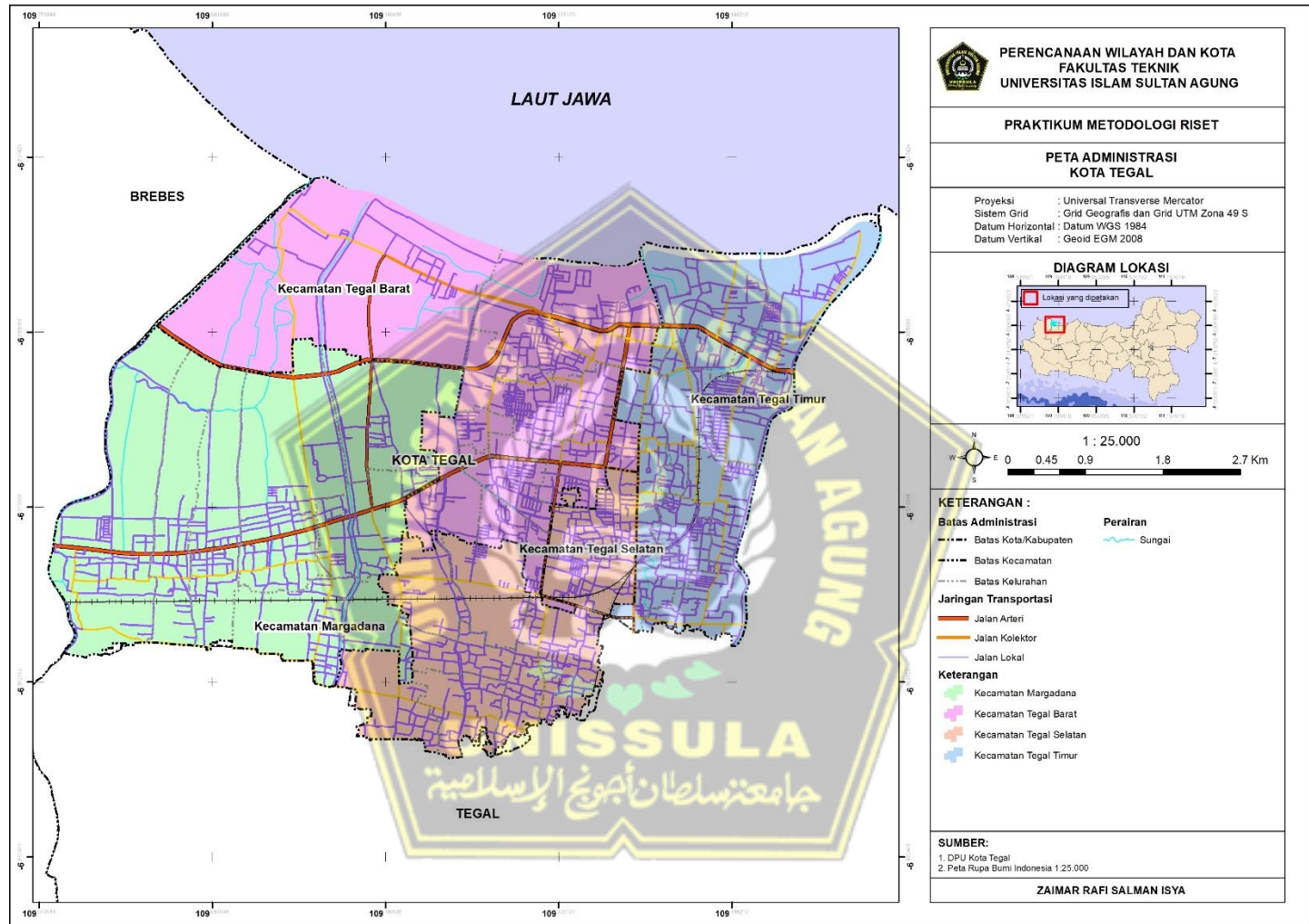
1.4.1 Ruang Lingkup Substansi

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah

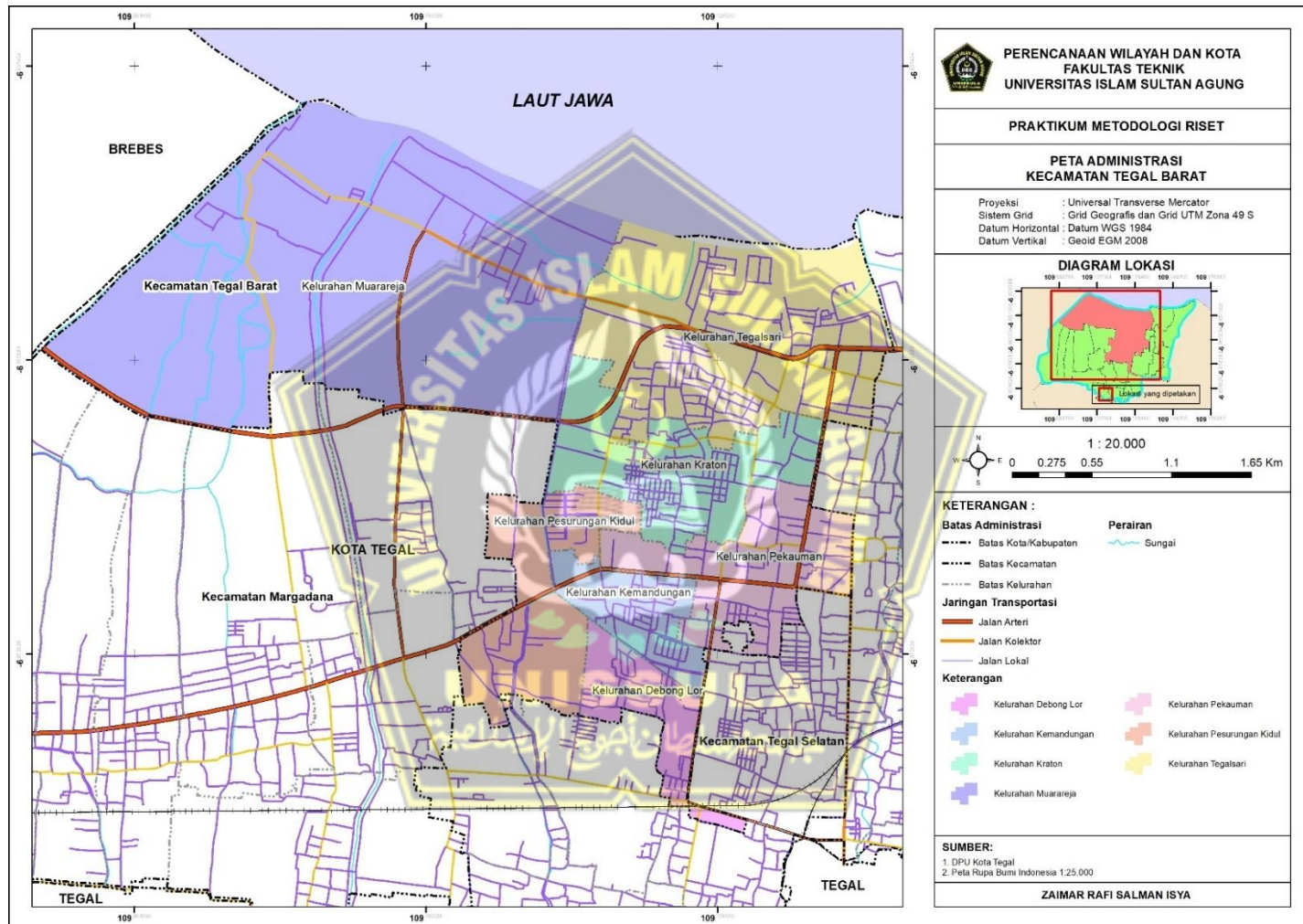
Secara geografis Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal memiliki luas sebesar 207,27 Ha. Terdiri dari 107 RT dan 14 RW. Dengan batas administrasi Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Kraton
- c. Sebelah Timur : Kelurahan Mintaragen, Kraton
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Muarareja

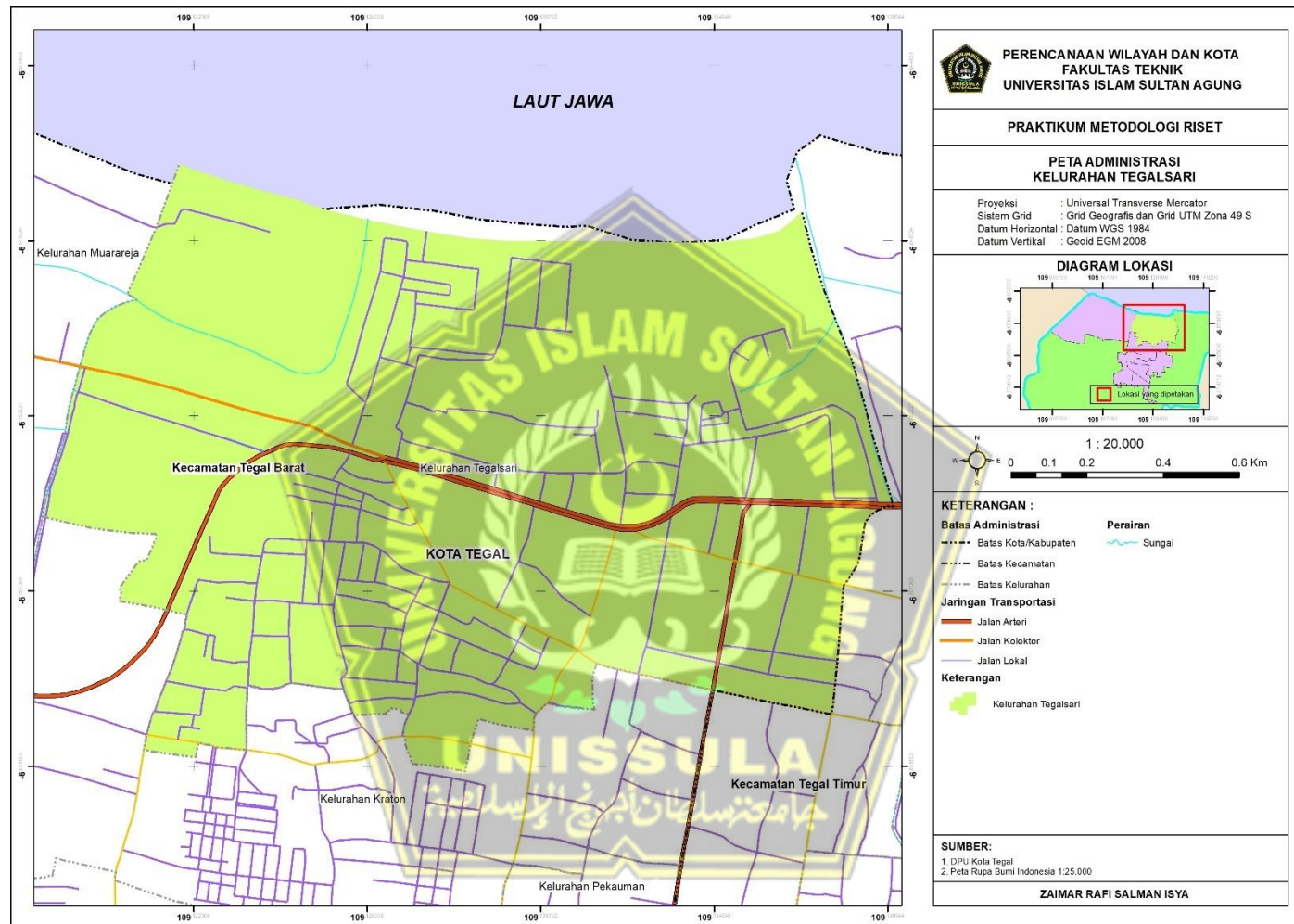




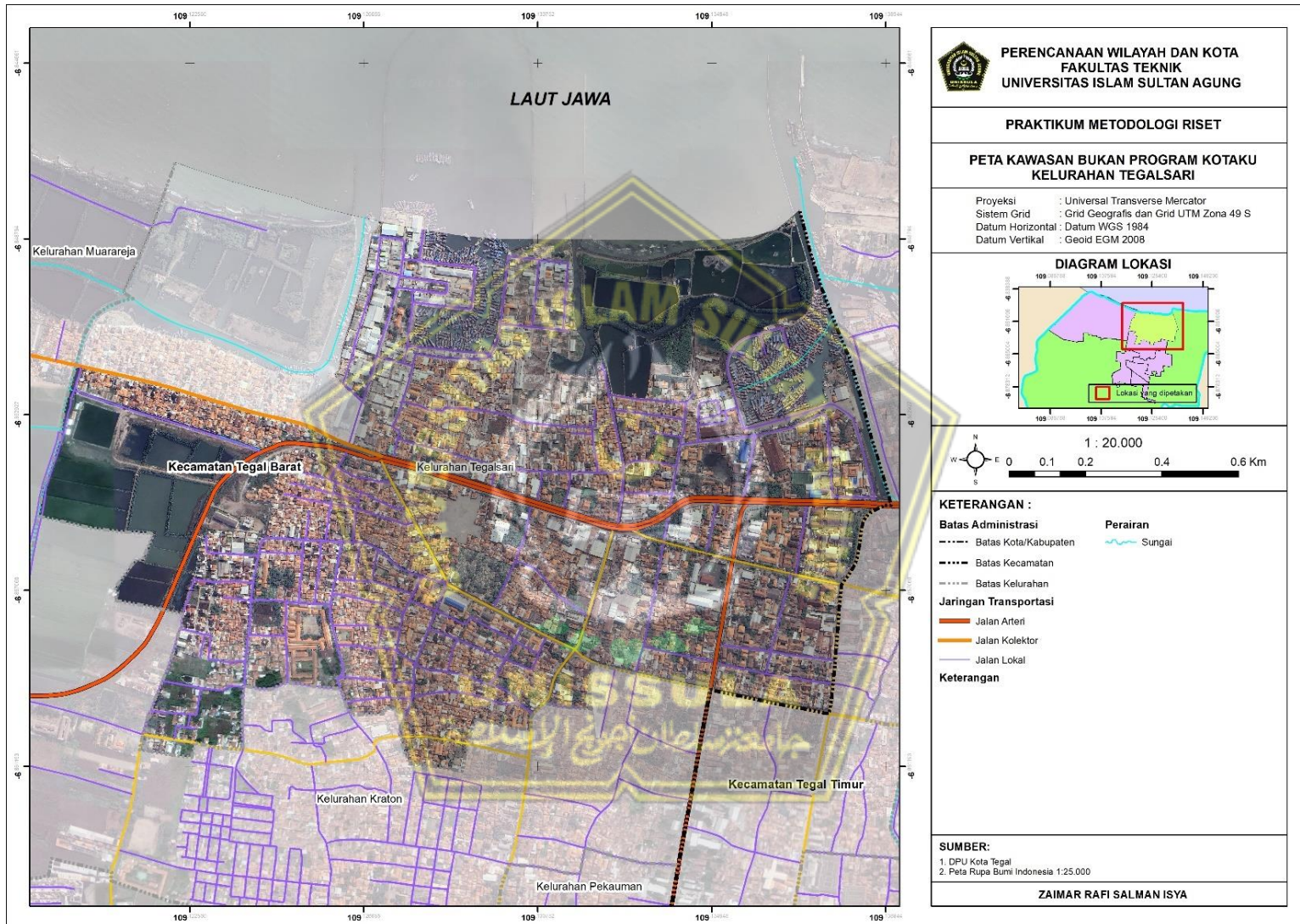
Gambar I. 1 Peta Administrasi Kota Tegal



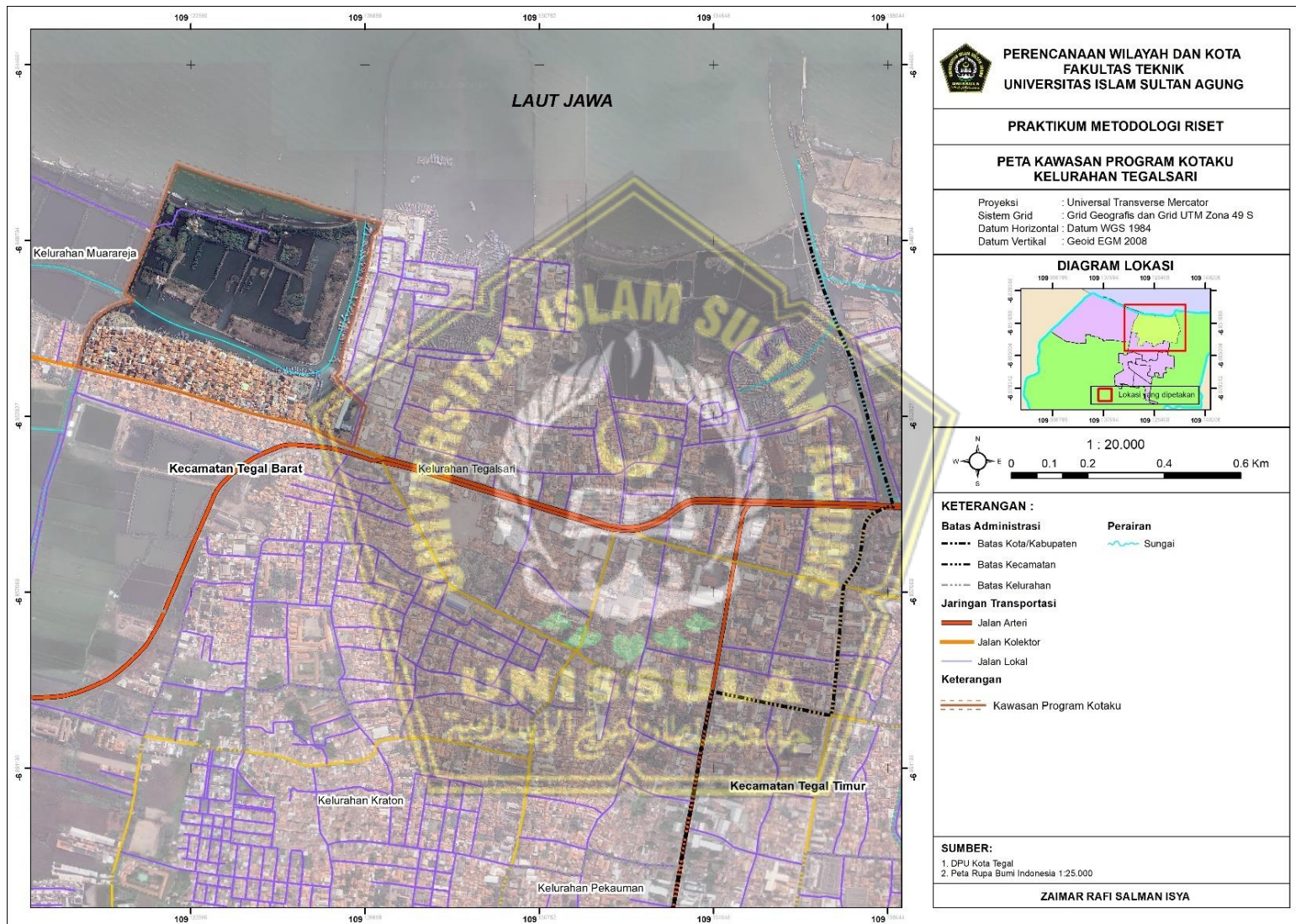
Gambar I. 2 Peta Administrasi Kecamatan Tegal Barat



Gambar I. 3 Peta Administrasi Kelurahan Tegal Barat



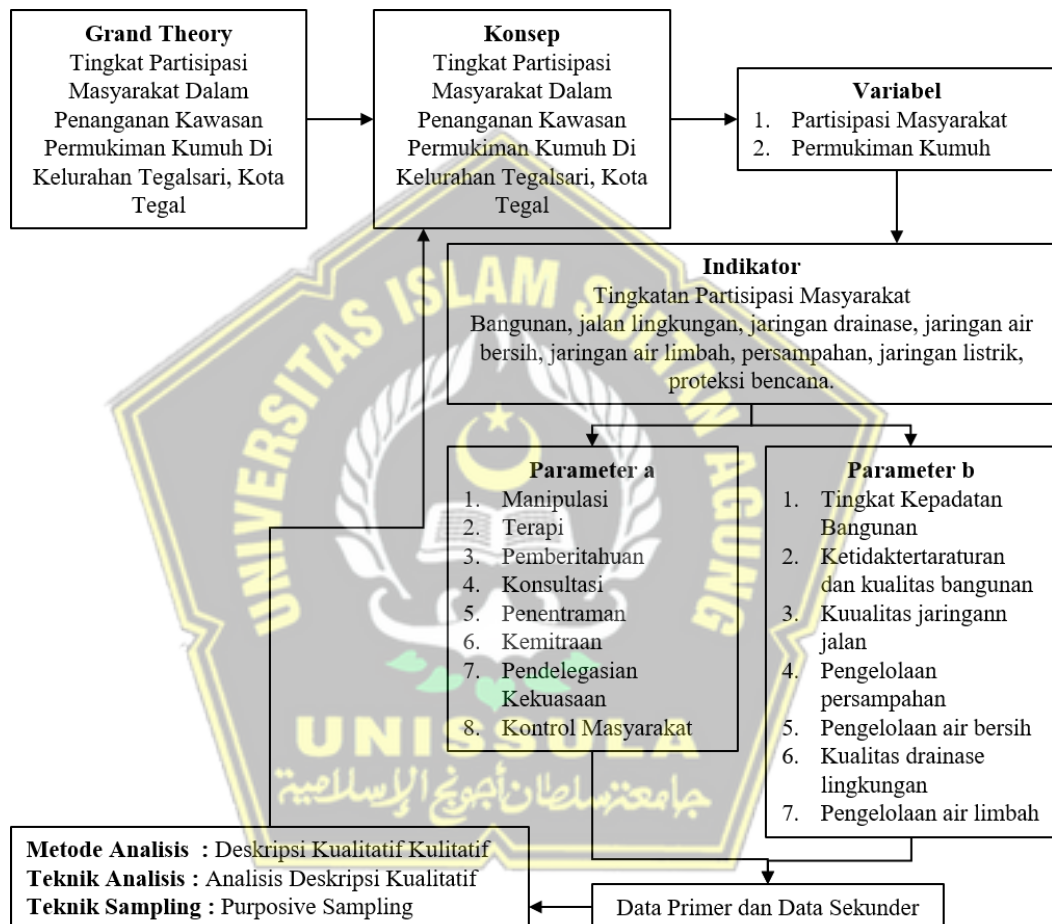
Gambar I. 4 Peta Kawasan yang Belum Terdampak Program KOTAKU Kelurahan Tegalsari



Gambar I. 5 Peta Kawasan Program KOTAKU Kelurahan Tegalsari

1.5 Metodologi Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berjudul “Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Program KOTAKU di Kelurahan Tegalsari, Kota Tegal.” menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif Rasionalistik. Pemilihan penelitian kualitatif disebabkan oleh faktor penjabaran dan penjelasan suatu fenomena yang akan diteliti. Penelitian kualitatif akan menghasilkan penelitian yang menjelaskan gejala secara konseptual.



Gambar I. 6 Kerangka Susunan Penelitian

Sumber: Analisis Penyusun, 2024

1.6 Metode Pelaksanaan Studi

Metode pelaksanaan studi terbentuk menjadi tahap penelitian, pertama tahapan persiapan, tahap mengumpulkan serta data tahap analisis. Dari ketiga tahapan tersebut diperoleh hasil data-data yang akan dikaji kedalam maksud penelitian sehingga memperoleh hasil akhir (output) yang diinginkan.

1.6.1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan awal dimana tahapan ini untuk mengetahui kebutuhan data yang akan digunakan kelangkah penelitian selanjutnya. Tahap persiapan bertujuan untuk membantu merumuskan permasalahan, sebelum memasuki tahap selanjutnya. Proses yang dilakukan meliputi, mengidentifikasi permasalahan, menentukan tujuan dan sasaran, menentukan lokasi, mengidentifikasi teori (literature), digunakan untuk membantu proses pembentukan awal penelitian. Langkah awal penyusunan laporan penelitian diantaranya:

1. Penyusunan latar belakang gini berdasarkan permasalahan yang ada, dan ditentukan yaitu jua beserta sasaran untuk menjawab permasalahan yang termuat di latar belakang penelitian. Judul penelitian ini adalah “Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Program KOTAKU di Kelurahan Tegalsari, Kota Tegal” diharapkan dalam penelitian ini dapat mengetahui terkait bentuk, tingkatan, yang mempengaruhi dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di kelurahan Tegalsari, Kota Tegal.
2. Penentuan Lokasi, alasan pemilihan lokasi studi yaitu menganalisa kebijakan terkait penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tegalsari, Kota Tegal. Pemilihan lokasi studi diambil berdasarkan permasalahan yang ada serta keterjangkauan lokasi yang akan diteliti.
3. Kajian teori dan literature review. Mengkaji mengenai penelitian sebelumnya dengan memiliki keterkaitan antara konsep atau studi lokasi sehingga dapat mendukung dalam penelitian baru. Dengan mengkaji berbagai refrensi ilmiah.
4. Pengumpulan data, data yang di perlukan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dihasilkan melalui observasi lapangan, wawancara terkait permasalahan yang ada. Sedangkan data sekunder di peroleh dari data dinas terkait seperti peraturan perundang undangan dan studi literature.
5. Tahap akhir penyusunan teknik serta pelaksanaan survey. Tahap ini berisikan tahapan dalam pengumpulan data, penyajian data dan pengelolaan data, serta wawancara responden yang ingin di capai, rancangan observasi dan form pertanyaan.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini di bedakan menjadi dua yang dapat dilihat dibawah ini:

1. Data Primer

Beikut ini merupakan data primer yang dapat di kelompokkan menjadi berikut:

a) Observasi (Pengamatan)

Pengamatan merupakan pengumpulan catatan lapangan secara langsung. Dalam buku karya Kristi Poerwandari yang berjudul Pendekatan Kualitatif Penelitian Perilaku Manusia, Penelitian ini menggunakan jenis observasi langsung, dengan melakukan pengamatan di Kawasan Permukiman Kumuh, Kelurahan Tegalsari, Kota Tegal. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Program KOTAKU Di Kelurahan Tegalsari, Kota Tegal. Adapun perlengkapan yang dibawa dalam kegiatan pengamatan lapangan seperti kamera, dan catatan daftar panduan buku survey.

b) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung. Langkah langkah wawancara terdapat tujuh tahapan dalam wawancara yaitu pertama adalah menyampaikan tema wawancara, desain studi, pelaksanaan wawancara (menulis dan merekam hasil wawancara), analisis data, verifikasi dan validasi, reliabilitas dan pelaporan studi.

Wawancara dilakukan secara runtut kepada Kepala Kelurahan Tegalsari, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan masyarakat Kelurahan Tegalsari. Jumlah responden tidak dibatasi hingga penulis mendapatkan data yang valid dan terbaru, dengan menyandingkan data wawancara dan data observasi. Sedangkan daftar pertanyaan yang akan diajukan oleh responden telah tercantum di bagian laporan. Berikut orang – orang yang diwawancara :

1. Bapak Rusbandi (Lurah Kelurahan Tegalsari)

Alasan : karena beliau sebagai lurah di kelurahan Tegalsari dan beliau juga ikut serta akan program KOTAKU.

2. Bapak Eko Setiawan (Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tegal)

Alasan : karena beliau perwakilan dari DISPERKIM yang menjadi salah satu pelaksana program KOTAKU.

3. Bapak Soedjarno (Ketua Rw 1 sekaligus perwakilan dari masyarakat)

Alasan : karena beliau menjadi salah satu perwakilan dari masyarakat yang berperan aktif dalam pelaksanaan dan pelaku program KOTAKU.

4. Bapak Harlan (Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat)

Alasan : karena beliau sebagai ketua BKM dan BKM sangat dilibatkan dalam pelaksanaan program KOTAKU.

5. Ibu Surni (Perwakilan warga perempuan)

Alasan : karena beliau sebagai perwakilan warga perempuan yang dilibatkan dalam proses pelaksanaan program KOTAKU.

c) Teknik Sampling

Tujuan dari penggunaan teknik sampling penelitian ini, untuk dapat menentukan jumlah sampel atau informan yang nantinya digunakan sebagai data sebenarnya, tentunya dengan mengacu kesifat penyebaran sampel dengan beberapa jumlah sampel, diantaranya adalah:

1) Masyarakat Kelurahan Tegalsari Kota Tegal

2) Kantor Kelurahan Tegalsari Kota Tegal

Teknik sampling pada penelitian dengan judul “Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Program KOTAKU Di Kelurahan Tegalsari, Kota Tegal” dengan menggunakan jenis teknik NonProbability Sampling memperhitungkan dari jumlah sampel yang dibutuhkan dan dilihat dari luasan wilayah penelitian serta tujuan dari judul penelitian sehingga didapatkan menggunakan teknik analisis Purposive Sampling. Purposive Sampling

adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk menentukan sampel dengan berbagai upaya pertimbangan berdasarkan tujuan penelitian agar data yang diperoleh sesuai yang diharapkan dan mampu menjawab permasalahan penelitian (Zaimar Rafi S.I , 2023).

Dalam penerapannya teknik penelitian tersebut akan diterapkan kepada masyarakat yang ditemui di lokasi penelitian dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan yang akan dilakukan terhadap penyebaran sampel yang memiliki hubungan erat serta ahli dibidangnya sehingga data yang diperoleh cukup relevan dan penduduk Kelurahan Tegalsari, Kota Tegal yang dianggap sebagai sampel dan bersifat ahli dibidangnya karena sebagai pelaku yang mengalami kejadian tersebut berulang kali sehingga data yang diperoleh akurat dengan pertimbangan usia, pendidikan, pengalaman, ataupun yang lainnya untuk mengetahui bagaimana Tingkat partisipasi masyarakat yang berlangsung dalam Penanganan Kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tegalsari, Kota Tegal.

d) Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian seperti menulis catatan lapangan selama studi penelitian, mengabadikan hasil pengamatan dengan memfoto atau video yang dijadikan sebagai data pendukung.

2. Data Sekunder

Perolehan data instansi/dinas berupa dokumen, nantinya data tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat analisis dalam menghasilkan data. Dalam pengumpulan data ini diperoleh dari beberapa instansi/dinas sesuai dan diharapkan data tersebut dapat member dukungan dalam proses penyusunan penelitian ini.

- a. Badan Pusat Statistik Kota Tegal (melalui web)
- b. Kantor Kelurahan Tegalsari (survey kelokasi)
- c. Google Earth

Tabel I. 1 Kebutuhan Data Primer

No.	Sasaran	Kebutuhan	Jenis Data	Sumber Data	Pengumpulan Data
			Primer		
1.	Mengidentifikasi proses perubahan permukiman berdasarkan indicator permukiman kumuh.	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi permukiman - Kepadatan bangunan - Aksesibilitas 	V	<ul style="list-style-type: none"> - Survey lokasi Permukiman Kumuh Tegalsari - Masyarakat sekitar 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara kantor kelurahan dan masyarakat. - Observasi Lokasi - Dokumentasi
2.	Mengidentifikasi kondisi sarana dan prasarana yang ada di Permukiman Kumuh Tegalsari disesuaikan dengan standar kelayakan pada sarana maupun prasarana.	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi Sarana dan Prasarana 	V	<ul style="list-style-type: none"> - Survey Lokasi Permukiman Kumuh Tegalsari - Masyarakat Sekitar 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara Masyarakat - Observasi Lokasi - Dokumentasi
3.	Mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam penataan kawasan permukiman kumuh Tegalsari	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat penataan dalam kawasan permukiman kumuh Tegalsari 	V	<ul style="list-style-type: none"> - Survey lokasi permukiman kumuh Tegalsari 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara Masyarakat - Observasi Lokasi - Dokumentasi

Sumber: AnalisisPenyusun, 2024



Tabel I. 2 Kebutuhan Data Sekunder

No.	Sasaran	Kebutuhan	Jenis Data	Sumber Data	Pengumpulan Data
			Sekunder		
1.	Mengidentifikasi proses perubahan permukiman berdasarkan indicator permukiman kumuh.	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi permukiman - Kepadatan permukiman - Luas permukiman - Klasifikasi permukiman 	V	<ul style="list-style-type: none"> - Google earth - Bappeda Kota Tegal - Kantor Kelurahan Tegalsari 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara - Data arsip Google earth - Dokumen - Dokumentasi
2.	Mengidentifikasi kondisi sarana dan prasarana yang ada di Permukiman Kumuh Tegalsari disesuaikan dengan standar kelayakan pada sarana maupun prasarana.	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi Sarana dan Prasarana 	V	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Pusat Statistik Kota Tegal - Kantor Kelurahan Tegalsari 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara - Dokumen - Dokumentasi
3.	Mengidentifikasi tingkat layak huni pada permukiman kumuh Tegalsari	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat layak huni permukiman kumuh Tegalsari 	V	<ul style="list-style-type: none"> - DPU Kota Tegal - Dinas Prumahan dan Permukiman Kota Tegal - Kantor Kelurahan Tegalsari 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara - Dokumen - Dokumentasi

Sumber: AnalisisPenyusun, 2024



1.6.3. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Menyusun perolehan data secara rapi dan secara sistematis, sehingga hasil yang di peroleh dapat di kelompokkan sesuai dengan sifatnya dan fungsinya agar memudahkan dalam proses analisis. Data tersebut akan klasifikasikan menurut data primer dan data sekunder, dan di proses serta di rangkum untuk memberikan pengkodean tertentu agar memberikan gambaran secara jelas serta mudah di pahami. Berikut adalah teknik pengelolaan dan penyajian data:

1) Teknik Pengolahan Data

a. Editing Data

Editing data merupakan tahapan pemeriksaan ulang dalam mengoreksi hasil data survei yang telah di terkumpul. Tujuanya untuk dapat mengetahui apakah data tersebut terkumpul secara rapi atau tidaknya, sehingga memudahkan dalam proses pengelolanya.

b. Pengodean Data (Coding)

Proses coding diawali dengan memisahkan data teks dengan data visual agar lebih ringkas dan dapat diberikan kode untuk mempermudah melihat catatan hasil lapangan.

c. Tabulasi Data

Tabulasi data merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempermudah proses analisis dengan mengelompokkan data sesuai kategori.

2) Tahap Penyajian Data

a. Deskriptif, menjabarkan hasil data yang di peroleh secara kualitatif, diperoleh melalui hasil observasi lapangan, wawancara, pendapat responden.

b. Tabel, digunakan sebagai alat mempermudah penyajian data.

c. Peta, berisi informasi berbentuk gambar yang disusun secara terstruktur serta terukur. Pada penelitian ini memberikan gambaran secara umum wilayah studi dan diolah yang kemudian menghasilkan peta administrasi wilayah serta perubahan ruang-ruang yang terdapat di Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Program KOTAKU Kelurahan Tegalsari, Kota Tegal.

- d. Foto, penyajian berupa tampilan visualisasi objek kawasan dalam bentuk gambar.

1.6.4. Tahap Analisis Data

Perolehan data lapangan dianalisis dengan cara mengumpulkan dan mengolah informasi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan di capai. Teknik analisis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif raionalistik. Metode ini dilakukan sesuai dengan hasil perolehan data lapangan yang bersifat deskriptif, dengan cara diterjemahkan kedalam tulisan dan gambar, untuk menggambarkan bentuk, tingkatan serta faktor Tingkat partisipasi Masyarakat di wilayah studi.

1.6.5. Pengabsahan Data

Pengabsahan data dapat dimulai dengan Langkah berikut ini:

- 1) Perpanjangan pengamatan

Melakukan pengamatan dan wawancara kepada narasumber baik yang sudah di temui maupun narasumber baru, untuk membangun kepercayaan.

- 2) Peningkatan ketekunan peneliti

Observasi dilakukan dengan cermat serta berkesinambungan untuk memperoleh informasi yang pasti dan sistematis.

- 3) Triangulasi

Memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan pembanding data melalui 3 pendekatan:

- a. Triangulasi sumber, menguji kredibilitas dengan mengecek perolehan data dari berbagai sumber;
- b. Triangulasi teknik, menguji kredibilitas dengan teknik yang berbeda; dan
- c. Triangulasi waktu, menguji kredibilitas dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda.

1.6.6. Penulisan Hasil Penelitian

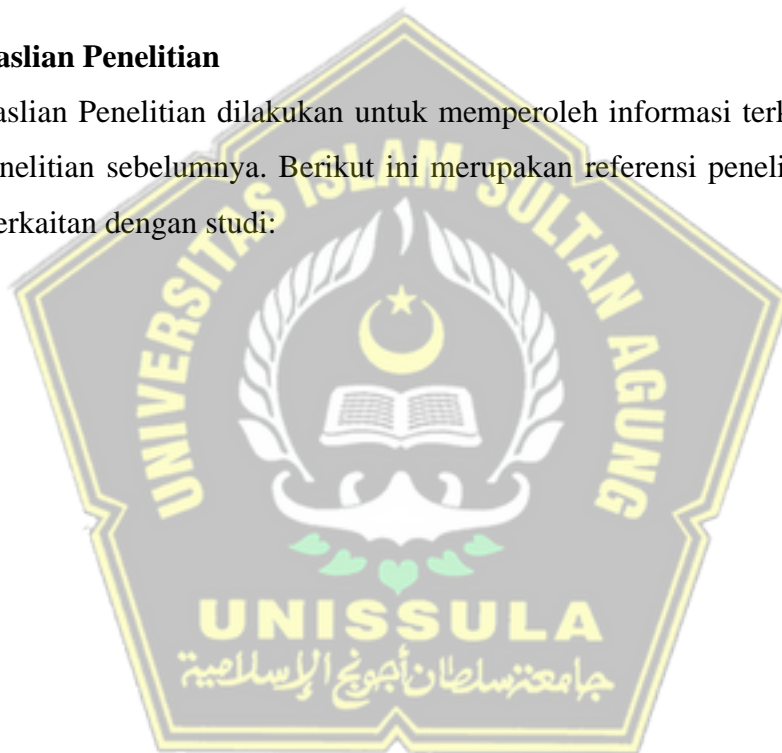
Tahap penulisan hasil penelitian dilakukan setelah mengumpulkan data, diolah dan dianalisis guna mendapatkan informasi yang dapat menjawab tujuan

dan sasaran penelitian. Dibawah ini merupakan Langkah penulisan hasil penelitian:

- 1) Penjelasan penulisan dilakukan secara tidak formal untuk menyampaikan gambaran dan pandangan berdasarkan keadaan eksisting.
- 2) Penulisan dan evaluasi tetap didasarkan pada perolehan informasi.
- 3) Memasukkan informasi sesuai dengan penelitian sehingga tidak terlalu banyak dan tetap ada Batasan terhadap penelitian.
- 4) Membuat catatan untuk setiap tahap penelitian agar sesuai dengan fokus penelitian.

1.7 Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian dilakukan untuk memperoleh informasi terkait perbedaan dari penelitian sebelumnya. Berikut ini merupakan referensi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan studi:



Tabel I. 3 Keaslian Penelitian

No.	Nama Penelitian	Sumber	Lokasi Penelitian	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Marina Ayu Wulandari dan Sunarti	Judul Artikel: Tipologi Kerentanan Permukiman Kumuh Kawasan Pesisir Terhadap Perubahan Iklim Di Kota Tegal Jurnal Teknik PWK	Kota Tegal	pendekatan kuantitatif dan deskriptif kualitatif.	Mengetahui bentuk kerentanan permukiman kumuh di wilayah pesisir berdasarkan keterkaitan sosial Masyarakat.	Jenis tipologi kerentanan permukiman kumuh wilayah pesisir memiliki 4 jenis yaitu, permukiman kumuh dengan rentan tinggi terhadap rob, sebaran rob dari bawah tanah, rentan berdasarkan saluran outfall dan rentan dikarenakan drainase.
2.	Sekar Ayu Advianty dan Ketut Dewi Martha Erli Handayeni	Judul Artikel: Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Permukiman Kumuh Kelurahan Ploso	Kelurahan Ploso	Kualitatif	bertujuan mengetahui faktor tingkat partisipasi masyarakat pada permukiman kumuh Kelurahan Ploso.	Diketahui bahwa tingkat kekumuhan di wilayah ini yaitu sedang dan tinggi. Tingkat tinggi yaitu terletak pada tangga ketiga yang memberikan informasi sedangkan tingkat sedang tangganya lebih variatif.
3.	Sriyono Timami Sabila	Judul jurnal: Perkembangan dan Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Permukiman Kumuh di Kelurahan Tegalsari Kota Tegal (Tahun 2007-2017)	Kelurahan Tegalsari Kota Tegal	observasi, wawancara, dokumentasi, dan interpretasi citra satelit.	Mendapat informasi terkait sebaran permukiman kumuh dan mengetahui faktor penyebabnya.	Perkembangan permukiman kumuh pada daerah ini yaitu secara spasial sentripetal yang mana ada penambahan bangunan dalam kota.
4.	Taufik Akbar dan Faqih Alfian	Judul Artikel: Kampung Tematik Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Permasalahan Permukiman Kumuh Di Kota Malang	Kota Malang	deskriptif kualitatif	Dampak adanya kampung tematik untuk mengurangi masalah Pembangunan.	Pembangunan ini berdampak positif terhadap penanggulangan Pembangunan wilayah.
5.	Edward Melio Bertho, Nadya Grestyana	Judul Artikel: Strategi Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Penanganan Permukiman Kumuh Di	Kota Palangka Raya	deskriptif kualitatif	Mengetahui strategi penanggulangan banjir di permukiman kumuh dan mengetahui Tingkat partisipasinya.	Merumuskan program KOTAKU di wilayah minim partisipasi dalam penanggulangan permasalahan permukiman.

No.	Nama Penelitian	Sumber	Lokasi Penelitian	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
		Kawasan Mendawai Kota Palangka Raya				
6.	Yaskinul Anwar, Iya Setyasih & Herlan	Judul Artikel: Partisipasi Masyarakat terhadap Penanganan Permukiman Kumuh di Kampung Ketupat Kecamatan Samarinda Seberang	Kecamatan Samarinda Seberang	deskriptif kualitatif	mengetahui tingkat partisipasi masyarakat	Kontribusi Masyarakat di wilayah ini sangat tinggi seperti, berpartisipasi pada perencanaan pelaksanaan dan memanfaatkan hasil.
7.	Satriyo Dwi Wijanarso	Judul Artikel: Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kampung Nelayan Tegalsari, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal	Kecamatan Tegal Barat	deskriptif kualitatif rasionalistik	untuk menganalisis dan menemukan karakteristik, tipologi serta faktor pengaruh Tingkat partisipasi	bentuk dan jenis partisipasi masyarakat dalam sumbangan ide dan fisik, tingkat partisipasi berada pada derajat partisipasi semu sedangkan faktor yang paling berpengaruh adalah pekerjaan, pendapatan dan pendidikan.
8.	Nadila Chrishanum, Maulana Rifai, Prilla Marsingga	Judul Artikel : Manajemen Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kelurahan Sumur Batu Kota Bekasi	Kelurahan Sumur Batu Kota Bekasi	deskriptif kualitatif	Analisis strategi pemerintah daerah dalam manajemen penanggulangan permukiman kumuh.	Pemerintah memberikan fasilitas berupa program KOTAKU, bantuan rumah tidak layak huni dan pengadaan SPAM.
9.	Nur M. Munzil, Dompok Napitupulu dan Rosyani	Judul Artikel : Integrasi Program Berkelanjutan dalam Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kecamatan Tungkal Ilir	Kecamatan Tungkal Ilir	SEM (Structural Equation Modelling)	Pengaruh program penanggulangan permasalahan wilayah pada keberlanjutan program penanggulangan permukiman kumuh.	Kesinambungan program terhadap kelanjutan program yang positif dengan Tingkat moderat.
10.	A. K. Dewi, S	Judul Artikel: Perubahan	Kelurahan	kuantitatif	Mengetahui perbedaan	Jalan di wilayah ini mengalami perubahan

No.	Nama Penelitian	Sumber	Lokasi Penelitian	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
	Sunarti	Kualitas Jalan Di Permukiman Kumuh Kelurahan Tegalsari Kota Tegal	Tegalsari		kualitas jalan di wilayah permukiman kumuh.	setelah mendapatkan bantuan program dari pemerintah.

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2024



Penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian berjudul “Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Program KOTAKU Di Kelurahan Tegalsari, Kota Tegal” ini adalah penelitian Sekar Ayu Advianty dan Ketut Dewi Martha Erli Handayeni dengan Judul Penelitian “Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Permukiman Kumuh Kelurahan Ploso” dimana dalam penelitian tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu terkait implementasi program penataan wilayah kumuh.

Tabel I. 4 Keaslian Fokus Penelitian

Nama Peneliti	Sekar Ayu Advianty dan Ketut Dewi Martha Erli Handayeni	Zaimar Rafi Salman Isya
Judul	Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Permukiman Kumuh Kelurahan Ploso	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Program KOTAKU Di Kelurahan Tegalsari, Kota Tegal
Lokasi	Kelurahan Ploso	Kelurahan Tegalsari
Metodologi	Kualitatif	Deskriptif Kualitatif Rasionalistik

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2024

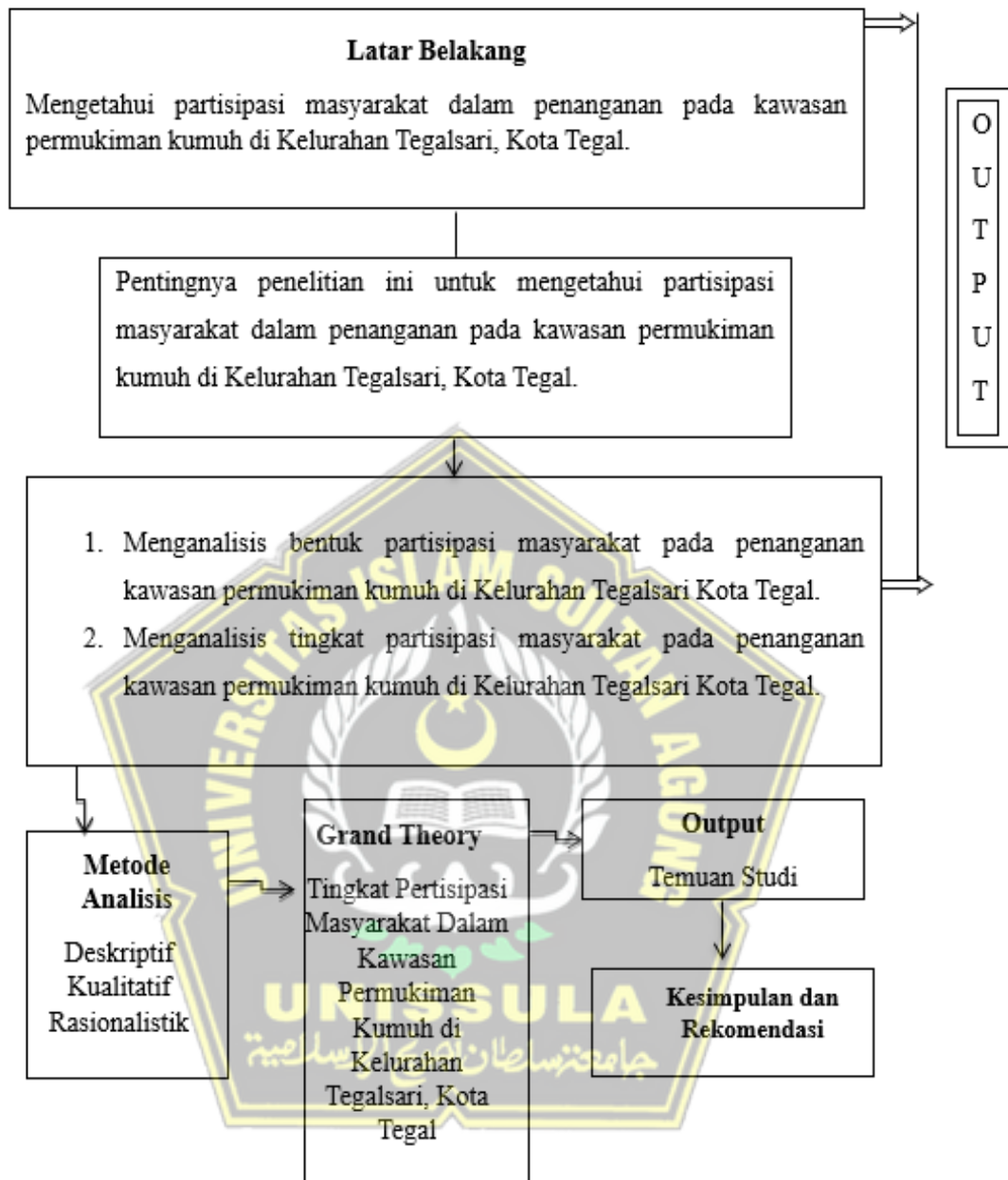
Berikut merupakan keterkaitan penelitian sebelumnya berdasarkan lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Tegalsari yang berjudul “Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Program KOTAKU Di Kelurahan Tegalsari, Kota Tegal” penulis Wa Ode Sitti Jurianti Aswad.

Tabel I. 5 Keaslian Lokasi Penelitian

Nama Peneliti	Satriyo Dwi Wijanarso	Zaimar Rafi Salman Isya
Judul	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kampung Nelayan Tegalsari, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Program KOTAKU Di Kelurahan Tegalsari, Kota Tegal
Lokasi	Kampung Nelayan Tegalsari, Kota Tegal	Kelurahan Tegalsari, Kota Tegal
Metodologi	Kualitatif	Deskriptif Kualitatif Rasionalistik

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2024

1.8 Kerangka Berpikir



Gambar I. 7 Kerangka Berpikir

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2024

1.9 Sistematika Pembahasan

Pada sub-bab ini akan menjelaskan urutan sistematika penyusunan laporan penelitian. Sistematika laporan yang akan digunakan yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup materi dan wilayah, keaslian penelitian, kerangka berpikir, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan tugas akhir.

BAB II KAJIAN TEORI TENTANG TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

Memuat review teori yang selaras dengan penelitian tugas akhir yang mencakup teori-teori dengan latar belakang yang selaras dengan metodologi.

BAB III KONDISI EKSTING PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN TEGALSARI, KOTA TEGAL

Pada bab ini menjelaskan gambaran atau karakteristik wilayah studi berdasarkan hasil data eksisting pada saat ini.

BAB IV ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN TEGALSARI, KOTA TEGAL

Pada bab ini memuat analisis terkait studi dengan menggunakan data yang didapatkan baik itu kualitatif ataupun kuantitatif dan disesuaikan dengan teori yang digunakan.

BAB V Penutup

Pada 5 akan memuat kesimpulan dan rekomendasi yang dapat menjawab tujuan dan sasaran penelitian ini.

Daftar Pustaka

Daftar Pustaka merupakan daftar bacaan yang menjadi sumber, atau referensi atau acuan dan dasar penulisan tugas akhir. Daftar Pustaka ini dapat berisi buku, artikel jurnal, majalah, atau surat kabar, wawancara, dan sebagainya.

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

2.1. Program KOTAKU

Menurut (Siti, n.d.) Dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 provinsi, program Kotaku merupakan “platform” atau landasan penanganan permukiman kumuh yang menyatukan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, antara lain pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pelayanan dasar guna mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang produktif dan berkelanjutan di kawasan perkotaan. Keunggulan dari program ini adalah dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan kumuh (selokan, air bersih/minum, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, pengaman kebakaran dan ruang terbuka hijau untuk umum). Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi luas kawasan kumuh melalui akses yang lebih baik terhadap infrastruktur dan layanan perkotaan untuk membahagiakan para penerima manfaat.

Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan publik. Menurut William Dunn dalam bukunya yang berjudul Pengantar Kebijakan Publik, Evaluasi memiliki beberapa ciri yang membedakannya dengan metode analisis politik lainnya dan dapat dibedakan menjadi empat ciri sebagai berikut:

- a) Fokus nilai adalah upaya untuk menentukan utilitas atau manfaat sosial dari suatu kebijakan atau program, dan bukan hanya upaya untuk mengumpulkan informasi tentang hasil kebijakan yang diharapkan dan tidak diharapkan.
- b) Saling ketergantungan bukti nilai berarti bahwa kebijakan tertentu telah mencapai tingkat efektivitas yang tinggi atau rendah dan harus didukung oleh bukti hasil kebijakan yang sebenarnya.

- c) Orientasi saat ini dan masa depan. Evaluasi dilakukan secara retrospektif dan setelah implementasi tindakan. Rekomendasi yang menyertakan asumsi nilai bersifat prediktif dan dibuat sebelum tindakan diambil.
- d) Dualitas nilai, membela klaim yang berfokus pada hasil sekarang dan masa lalu daripada hasil masa depan. Penilaian sama dengan rekomendasi nilai-nilai yang ada dan dapat dilihat sebagai internal (perlu dalam dirinya sendiri) atau eksternal (diperlukan karena sesuatu mempengaruhi tujuan lainnya).

Artinya, indikator yang tepat untuk mengukur evaluasi pelaksanaan kriteria program KOTAKU. Peneliti menggunakan teori Brigidman & Devis (2000) untuk mengukur evaluasi kebijakan publik menurut kriteria kebijakan program KOTAKU sebagai berikut:

1. Input, masukan difokuskan pada penilaian sumber daya pendukung dan bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan program. Misalnya, berapa banyak staf, pelaksana, atau infrastruktur yang dibutuhkan untuk melaksanakan program KOTAKU.
2. Proses, suatu proses yang berfokus pada bagaimana suatu layanan dirancang untuk masyarakat. Indikator ini mencakup efektivitas dan efisiensi metode atau cara yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan.
3. Output (hasil), yang menitikberatkan pada hasil atau produk dari proses kebijakan publik, misalnya berapa banyak orang yang berhasil berpartisipasi dalam program KOTAKU.
4. Outcome (dampak), berfokus pada dampak manfaat yang diterima atau tercipta setelah pelaksanaan kegiatan pengembangan Program KOTAKU.

2.2. Tingkat Partisipasi Masyarakat

2.2.1. Partisipasi Masyarakat

Zamroni (2011:51) mengatakan bahwa Partisipasi merupakan semua anggota masyarakat suatu negara yang memiliki suara didalam pembentukan dan

pengambilan keputusan yang bersifat secara langsung maupun melalui organisasi yang mewakili kepentingan masyarakat umum.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan di dalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun spelestarian lingkungan. Disini masyarakat tidak hanya sebagai penerima fasilitas maupun manfaat tetapi sebagai subjek pembangunan yang berkesinambungan (Wiwin 2019).

Mulyadi (2009:13) mengatakan bahwa Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan maupun menjalankan suatu program, yang mana masyarakat juga ikut merasakan manfaat dari kebijakan program tersebut. Selain itu dalam melakukan sebuah evaluasi masyarakat tentunya juga ikut dilibatkan agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan apa yang disampaikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan semua anggota masyarakat dalam pembuatan dan pelaksanaan suatu program atau kebijakan yang mampu memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

Partisipasi mempunyai arti keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap fase kegiatan mulai dari perencanaan dan pengambilan keputusan ,implementasi evaluasi dan pemanfaatan atas inisiatif sendiri berdasarkan kearifan lokal yang ada pada mereka untuk menyelesaikan hal-hal yang dianggap sebagai hambatan dan merupakan bentuk inovatif dalam melihat peluang atas kebutuhan-kebutuhannya berdasarkan perhitungan untung rugi. Perngertian partisipasi masyarakat sering diartikan keikutsertaan, keterlibatan dan kesamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan perumusan kebijaksanaan, hingga pelaksanaan program (Wibisono,1989). Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tesebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan partisipasi secara tidak langsung berupa keuangan, pemikiran, dan material yang diperlukan (Wibisono,1989,) selain itu, ada beberapa definisi partisipasi dari para ahli antara lain :

- a) Partisipasi masyarakat berarti masyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dalam pembangunan (Sumarto & Hetifa, 2003).
- b) Partisipasi dapat dipandang sebagai agen atau wakil dari tindakan atau program-program yang dijalankan oleh pemerintah sebagai salah satu hal yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan penerapan kebijaksanaan (Richard Batley, 1983).
- c) Partisipasi adalah suatu tindakan yang mendasar untuk bekerjasama yang memerlukan waktu dan usaha, agar menjadi mantap dan hanya berhasil baik dan terus maju, apabila ada kepercayaan bersama (Korsten, 1986).
- d) Partisipasi Masyarakat adalah suatu yang penting (critical one) dalam pemerintahan yang demokratis, apalagi dalam praktek pemerintahan daerah (Hernandes, 1999).
- e) Mengartikan partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan secara terus menerus dan aktif dalam pembuatan keputusan yang dapat mempengaruhi kepentingan umum (Antoft dan Novack, 1998).
- f) Mengartikan partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan (Thomas, 1995).
- g) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan (Britha Mikkelsen, 2003).
- h) Partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemauan untuk menanggapi proyek proyek pembangunan (Britha Mikkelsen, 2003).
- i) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu (Britha Mikkelsen, 2003).
- j) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan monitoring proyek agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial (Britha Mikkelsen, 2003).

- k) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukanya sendiri (Britha Mikkelsen, 2003).
- l) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri kehidupan dan lingkungan mereka (Britha Mikkelsen, 2003).
- m) Partisipasi masyarakat yang diartikan sebagai peran aktif berkontribusi dan mempengaruhi proses pembangunan, yang secara merata dan bersama mengambil manfaat dari pembangunan tersebut.
- n) Partisipasi masyarakat dapat dipandang sebagai agen atau wakil dari tindakan atau program-program yang dijalankan pemerintah dan sebagai salah satu hal yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan penerapan kebijaksanaan (Richard Batley, 2004)

2.2.2. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Menurut Arnstein 1969 dalam Wicaksono 2010 gradasi atau tingkatan partisipasi masyarakat digambarkan dalam sebuah tangga partisipasi Arnstein (Rosyida & Tonny Nasdian, 2011).

Tabel II. 1 Tangga Tingkatan Partisipasi Arnstein

No.	Tangga/Tingkatan Partisipasi	Hakekat Kesertaan	Tingkatan Pembagian Kekuasaan
1.	Manipulasi (Manipulation)	Pemerintah menampung usulan masyarakat tetapi masyarakat tidak mengetahui hal tersebut.	Tidak ada partisipasi
2.	Terapi (Therapy)	Pemerintah menyampaikan visi misi atau rencana program kerja, masyarakat sekedar mendengarkan atau menyetujui saja	
3.	Pemberitahuan (Informing)	Pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat dan masyarakat menerima tanpa adanya timbal balik.	Tokenism/se kedar justifikasi agar mengiyakan
4.	Konsultasi (Consultation)	Saran dari masyarakat ditampung tetapi keputusan akhir ada di Pemerintah.	
5.	Penentraman/Perujukuan (Placation)	Masyarakat memberi ide namun pemerintah masih menahan untuk dinilai layak/tidak. Saran masyarakat diterima tapi belum tentu dilaksanakan.	
6.	Kemitraan (Partnership)	Pemerintah dengan masyarakat sebagai partner kerjasama dalam membuat dan melaksanakan program kerja.	Tingkat kekuasaan ada di masyarakat
7.	Pendelegasian/ Pelimpahan Kekuasaan (Delegated Power)	Masyarakat diberi kekuasaan (sebagian atau seluruh program).	
8.	Pengawasan/Kontrol Masyarakat (Citizen Control)	Pengawasan/Kontrol masyarakat terhadap kerja pemerintah berupa evaluasi atau pemantauan.	

Sumber: Arnstein (1969:217) dalam Wicaksono (2010)

Arnstein (1969) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat dan memiliki tingkatan yang sesuai dengan tingkat kekuasaan.

2.3. Pengertian Permukiman dan Permukiman Kumuh

2.3.1 Pengertian Permukiman

Menurut Soedarsono dalam Ridlo (2020) menjelaskan bahwa permukiman adalah kawasan yang terdiri dari bangunan perumahan dengan memiliki kelengkapan fasilitas prasarana lingkungan, umum dan sosial yang saling terpadu dalam pemanfaatannya yang di tunjukan untuk ke pentingan publik dalam keselarasan pemanfaatan sumber daya lingkungan sebagai penunjang ke hidupan. Selanjutnya Ridlo menjelaskan bahwa permukiman merupakan kawasan yang di bentuk dari usaha manusia melalui proses penataan ruang secara fungsional dalam satu ke satuan yang memuat berbagai aktifitas sosial, ekonomi, budaya serta dilengkapi dengan infrastruktur dasar lingkungan dalam upaya mengelolah sumber daya lingkungan yang ada serta untuk mendukung peningkatan kualitas kehidupan demi terwujudnya ke sejahteraan masyarakat. (Ridlo, 2020).

2.3.2 Pengertian Permukiman Kumuh

Menurut Ridlo, dari aspek legalitas permukiman terbagi menjadi dua pengertian, Pertama, Permukiman kumuh (*slum settlement*) merupakan tempat bermukimn yang padat bahkan sangat padat yang sebagian besar penduduknya dihadapkan dengan masalah-masalah sosial, ekonomi, fisik dan lingkungan. Namun dalam hal kepemilikan dan hak atas tanah (aspek legalitas lahan) permukimannya adalah sah (milik sendiri). Kedua, permukiman kumuh dan liar (*squatter settlement*) merupakan tempat bermukim, yang dalam segala hal sama dengan permukiman kumuh (*slum settlement*), terkecuali dalam hal kepemilikan atau hak atas tanah (aspek legalitas lahan) permukiman tersebut bukan miliknya. Dengan kata lain, hunian liar dikaitkan dengan status kepemilikan lahan yaitu hunian yang dibangun diatas lahan yang bukan haknya (orang lain atau negara), artinya warga tersebut menyerobot (menginvasi) lahan milik negara atau milik orang lain. Jadi bila ada permukiman kumuh yang menempati tanah negara atau bukan haknya merupakan permukiman kumuh sekaligus liar. (Ridlo, 2001).

Diana Puspitasari dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kota Depok mengatakan, definisi permukiman kumuh berdasarkan karakteristiknya adalah suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas. Dengan kata lain memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya. Dan tidak memungkinkan dicapainya kehidupan yang layak bahkan cenderung membahayakan bagi penghuninya.

Menurut Diana, ciri permukiman kumuh merupakan permukiman dengan tingkat hunian dan kepadatan bangunan yang sangat tinggi, bangunan tidak teratur, kualitas rumah yang sangat rendah. Selain itu tidak memadainya prasarana dan sarana dasar seperti air minum, jalan, air limbah dan sampah.

Kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya (Wafiqah, 2000).

Ciri-ciri pemukiman kumuh, seperti yang diungkapkan oleh Prof. DR. Parsudi Suparlan adalah:

- 1) Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
- 2) Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.
- 3) Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di pemukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.
- 4) Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai:
 - Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar.
 - Satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW.

- Sebuah satuan komunitas tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah Kelurahan, dan bukan hunian liar.
- 5) Penghuni permukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat permukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.
 - 6) Sebagian besar penghuni permukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informal.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa Permukiman Kumuh adalah Permukiman tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Indikator permukiman kumuh telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa permukiman kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian, sedangkan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kriteria perumahan dan permukiman kumuh ditinjau dari :

- a. Bangunan Gedung
- b. Jalan lingkungan
- c. Penyediaan air minum
- d. Drainase lingkungan
- e. Pengelolaan air limbah

- f. Pengelolaan persampahan
- g. Proteksi kebakaran

2.3.2 Kawasan Kumuh

Permukiman kumuh pada umumnya terjadi di kawasan perkotaan karena keterbatasan oleh keahlian tenaga kerja mengakibatkan masyarakat tersebut menempati lokasi yang pada umumnya ilegal dan mendirikan bangunan dengan sangat berdekatan sehingga menimbulkan kawasan semrawut, kawasan kumuh dibagi menjadi dua yaitu slum area dan kawasan quarter. Kawasan kumuh atau slum area adalah suatu wilayah permukiman dengan kondisi bangunan dan kondisi lingkungan yang tidak sehat dan tergolong kotor tetapi wilayah tersebut umumnya status kepemilikan lahannya jelas tetapi kesadaran akan pentingnya kesehatan lingkungan tidak (Peding Hugo F, 1986).

Kawasan quarter yaitu merupakan suatu sekumpulan lahan yang dihuni oleh permukiman – permukiman liar, dimana kondisi bangunan ada yang baik dan buruk tetapi permasalahannya terdapat pada status lahan yang illegal. (Utomo Is Hadri, 2000). Daerah squater jika diartikan dalam kamus sosiologi adalah kondisi dimana seseorang dikatakan illegal dalam bertempat tinggal pada suatu tempat (Sukanto Soerjono, 1985). Sedangkan dalam kamus ilmu-ilmu sosial daerah squater diartikan sebagai seseorang yang menempati tanah-tanah tanpa ijin resmi (Peding Hugo F, 1986). Wilayah squater adalah wilayah yang dihuni oleh masyarakat dimana pada umumnya jenis bangunan semi permanen dan dibangun di lahan yang illegal karena merupakan lahan yang tidak jelas status kepemilikan lahan, sebagian besar adalah lahan negara sebagai kawasan lindung (Wafiqah, 2000).

Suatu kawasan dapat dikatakan sebagai permukiman kumuh memiliki beberapa karakteristik dari berbagai sektor seperti:

- 1) Permukiman padat penduduk dimana umumnya berada di perkotaan karena diakibatkan urbanisasi perpindahan penduduk dari desa ke kota.
- 2) Tingkat mata pencaharian yang tidak tetap mengakibatkan penghasilan masyarakat tergolong rendah.

- 3) Kondisi bangunan tergolong semi permanen karena ketidakmampuan untuk membeli bahan bangunan yang kokoh.
- 4) Kondisi kebersihan dan sanitasi rendah.
- 5) Pelayanan sarana prasarana lingkungan tidak memadai.
- 6) Kondisi persil antar satu bangunan dengan bangunan lainnya tidak tertata dengan baik, tergolong semrawut.
- 7) Umumnya dihuni oleh kondisi sosial ekonomi menengah kebawah.
- 8) Status kepemilikan tanah yang tidak jelas dimana sebagian besar adalah tanah milik negara. (Utami Trisni, 1997).

Pada dasarnya suatu permukiman kumuh terdiri dari beberapa aspek penting, yaitu tanah/lahan, rumah/perumahan, komunitas, sarana dan prasarana dasar, yang terajut dalam suatu sistem, social ekonomi dan budaya baik dalam suatu ekosistem lingkungan permukiman kumuh itu sendiri atau ekosistem kota. oleh karena itu permukiman kumuh harus senantiasa dipandang secara utuh dan integral dalam dimensi yang lebih luas. (Sabila & Sriyono, 2019)

Menurut Ridlo, 2001 permukiman kumuh dipandang dari aspek legalitas terbagi menjadi dua pengertian, yaitu:

1. Permukiman kumuh atau slum merupakan daerah perumahan padat di dalam kota, yang sebagian besar penduduknya dihadapkan dengan masalah-masalah social, ekonomi, fisik dan lingkungan. Namun dalam kepemilikan dan hak atas tanah, semuanya adalah sah.
2. Permukiman liar atau squatter merupakan tempat bermukim, yang dalam segala hal sama dengan slum, terkecuali dalam hal kepemilikan tanahnya illegal (milik negara, swasta maupun milik orang lain).

Permukiman tidak selalu liar, demikian juga permukiman liar tidak selamanya kumuh. Hunian liar dikaitkan dengan status kepemilikan tanah yaitu hunian yang dibangun diatas tanah bukan haknya (orang lain atau negara). Permukiman liar di kota Sebagian besar berada diatas tanah negara. Jadi bila ada permukiman kumuh yang menempati tanah negara atau bukan haknya merupakan permukiman kumuh sekaligus liar. Dengan demikian berarti ada kumuh tidak liar yaitu permukiman yang didirikan diatas tanah milik atau tanah negara yang sudah diberikan haknya (hak guna bangunan dan hak guna usaha) dengan tata letak bangunan yang tidak

beraturan. Dan ada permukiman liar tidak kumuh yaitu bangunan yang didirikan diatas tanah bukan haknya yang menyadari akan kebersihan dan keindahan lingkungan. Dari beberapa uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permukiman kumuh merumapakan tempat hunian Masyarakat dengan kondisi social ekonomi rendah, status kepemilikan tanah legal maupun illegal, kualitas lingkungan rendah, namun secara kultur masik terdapat ikatan kekeluargaan yang erat.



Tabel II. 2 Matriks Teori Penelitian

No	Sumber	Uraian	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Wibisono,1988	Perngertian partisipasi masyarakat sering diartikan keikutsertaan, keterlibatan dan kesamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan perumusan kebijaksanaan, hingga pelaksanaan program.	Partisipasi Masyarakat	Keterlibatan Masyarakat	1) Peran serta Masyarakat 2) Sumbang saran 3) Pengelolaan
2.	Arnstein 1969 dalam Wicaksono 2010	Menurut Arnstein 1969 dalam Wicaksono 2010 gradasi atau tingkatan partisipasi masyarakat digambarkan dalam sebuah tangga partisipasi.	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Tangga Tingkat Partisipasi Masyarakat	1) Manipulasi (Manipulation) 2) Terapi (Therapy) 3) Pemberitahuan (Informing) 4) Konsultasi (Consultation) 5) Penentrman/Perujukan (Placation) 6) Kemitraan (Partnership) 7) Pendelegasian/Pelimpahan (Delegated Power) 8) Pengawasan/Kontrol (Citizen Control)
3.	Prof. DR. Parsudi Suparlan	Ciri-ciri pemukiman kumuh, seperti yang diungkapkan oleh Prof. DR. Parsudi Suparlan adalah: 1) Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai. 2) Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin. 3) Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di pemukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya. 4) Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan	Permukiman Kumuh	Ciri-ciri Permukiman kumuh	1) Fasilitas umum 2) Kondisi hunian 3) Tingkat frekuensi dan kepadatan volume

No	Sumber	Uraian	Variabel	Indikator	Parameter
		<p>sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar. • Satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW. • Sebuah satuan komuniti tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah Kelurahan, dan bukan hunian liar. <p>5) Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat pemukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.</p> <p>6) Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informil.</p>			
4.	Utami Trisni, 1997	<p>Suatu kawasan dapat dikatakan sebagai permukiman kumuh memiliki beberapa karakteristik dari berbagai sektor seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Permukiman padat penduduk dimana umumnya berada di perkotaan karena diakibatkan urbanisasi perpindahan penduduk dari desa ke kota. 2) Tingkat mata pencaharian yang tidak tetap mengakibatkan penghasilan masyarakat tergolong rendah. 3) Kondisi bangunan tergolong semi permanen 	Kawasan kumuh	Karakteristik kawasan kumuh	<ol style="list-style-type: none"> 1) Permukiman padat penduduk 2) Tingkat mata pencaharian 3) Kondisi bangunan 4) Kondisi kebersihan dan sanitasi rendah 5) Pelayanan sarana prasarana 6) Kondisi persil 7) Kondisi sosial ekonomi 8) Status kepemilikan tanah

No	Sumber	Uraian	Variabel	Indikator	Parameter
		<p>karena ketidakmampuan untuk membeli bahan bangunan yang kokoh.</p> <p>4) Kondisi kebersihan dan sanitasi rendah.</p> <p>5) Pelayanan sarana prasarana lingkungan tidak memadai.</p> <p>6) Kondisi persil antar satu bangunan dengan bangunan lainnya tidak tertata dengan baik, tergolong semrawut.</p> <p>7) Umumnya dihuni oleh kondisi sosial ekonomi menengah kebawah.</p> <p>8) Status kepemilikan tanah yang tidak jelas dimana sebagian besar adalah tanah milik negara.</p>			

Sumber: Analisis Peneliti, 2024



Tabel II. 3 Variabel, Indikator, dan Parameter

No	Variabel	Indikator	Parameter	Penjelasan
1	Implementasi Program	Kesesuaian antara program dengan realitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Input 2. Proses 3. Output 4. Outcome 	Mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana program yang telah/sudah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu dengan tujuan, sasaran serta mengetahui hambatan yang terjadi selama Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) berlangsung.
2.	Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi Masyarakat (Arnstein's Ladder, 1969)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Manipulasi (Manipulation) 2) Terapi (Therapy) 3) Pemberitahuan (Informing) 4) Konsultasi (Consultation) 5) Penentrangan/Perujukuan (Placation) 6) Kemitraan (Partnership) 7) Pendelegasian/Pelimpahan Kekuasaan (Delegated Power) 8) Pengawasan/Kontrol Masyarakat (Citizen Control) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Manipulation: level ini public tidak dilibatkan karena sudah terpilihnya sejumlah orang sebagai wakil dari public. Sehingga public tidak akan mengetahui sama sekali tentang informasi Keputusan tersebut. 2) Therapy: pada terapi ini public mulai dilibatkan tetapi hanya dapat mendengarkan informasi Keputusan tersebut. 3) Informing: pada level ini otoritas berkuasa hanya berkomunikasi searah atau hanya memenuhi satu informasi yang akan dan sudah dilaksanakan 4) Consultation: untuk level ini sudah adanya diskusi dengan banyak elemen tetapi yang berkuasa menentukan apakah saran dan kritik public akan digunakan. 5) Placation: pada level ini pihak yang berkuasa hanya berjanji untuk melaksanakan aspirasi public tetapi diam-diam menjalankan rencana semula. 6) Partnership: pada level partnership telah mencapai citizen power, sehingga pada level ini terbentuknya Kerjasama multipihak dalam merumuskan atau melaksanakan rencana semula. 7) Delegation: naik ke level delegation Dimana Masyarakat memegang mayoritas kursi di komite dengan wewenang yang didelegasikan untuk membuat Keputusan. Sehingga peran public untuk menjamin akuntabilitas program kepada mereka. 8) Citizen Control: pada level ini Dimana public yang lebih mendominasi dan peran public hingga mengevaluasi kinerja mereka.
3.	Permukiman kumuh	Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat kepadatan bangunan 2) Ketidakteraturan dan kualitas bangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengetahui Tingkat kepadatan bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang pada perumahan dan permukiman. 2) Mengetahui kondisi bangunan pada perumahan dan permukiman

				dengan ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan serta mengetahui kualitas bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan Gedung.
	Jalan Lingkungan	Kualitas jaringan jalan		Mengetahui kriteria kekumuhan yang ditinjau dari kondisi jalan.
	Jaringan Air Bersih	Pengelolaan air bersih		Mengetahui kriteria kekumuhan yang ditinjau dari penyediaan air bersih.
	Jaringan Persampahan	Pengelolaan persampahan		Mengetahui kriteria kekumuhan yang ditinjau dari pengelolaan persampahan lingkungan sekitar.
	Jaringan Drainase Lingkungan	Kualitas drainase lingkungan		Mengetahui kriteria kekumuhan yang ditinjau dari kondisi drainase lingkungan.
	Jaringan Air Limbah	Pengelolaan air limbah		Mengetahui kriteria kekumuhan yang ditinjau dari pengelolaan air limbah.

Sumber: Analisis Peneliti, 2024



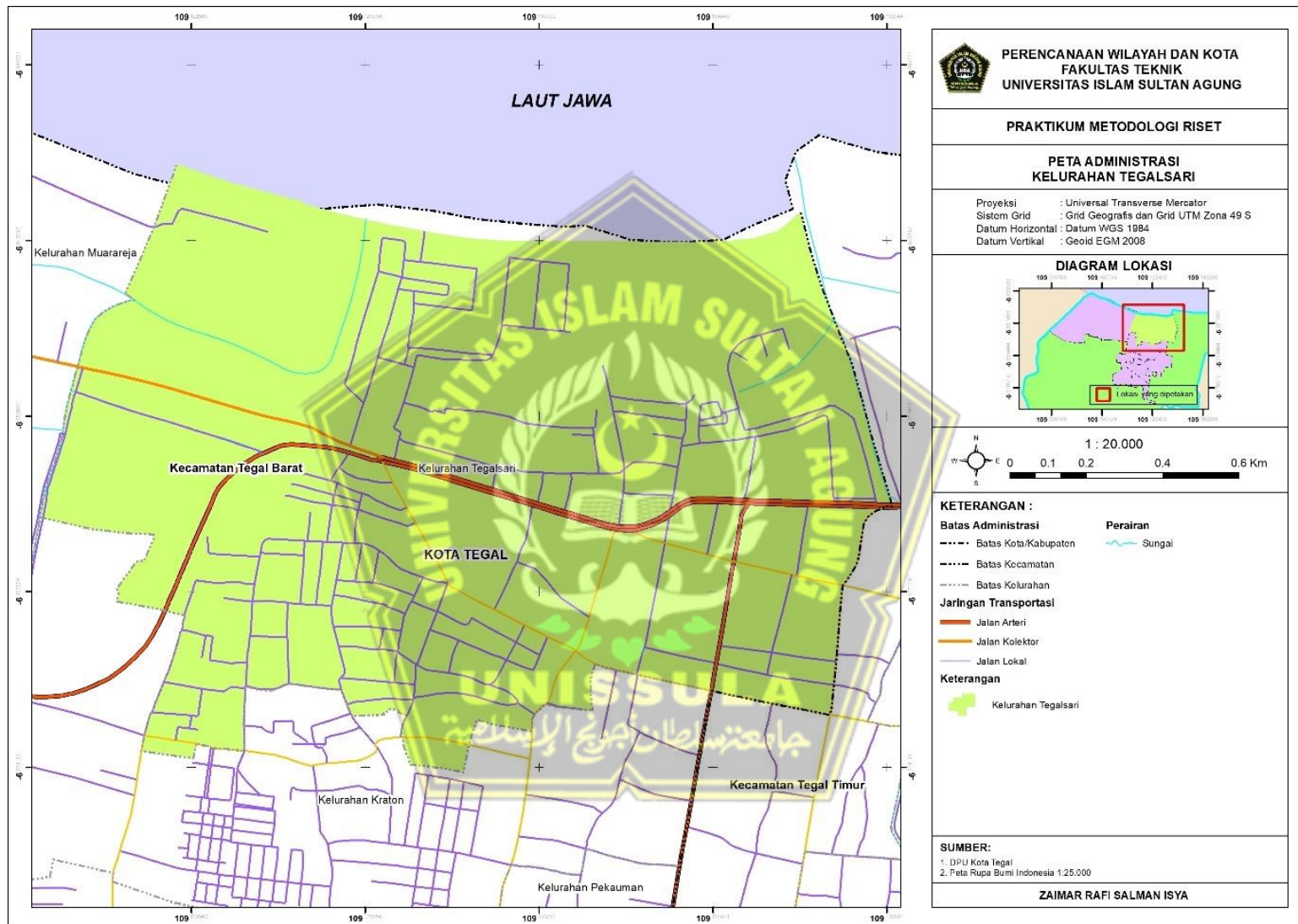
BAB III
KONDISI EKSISTING PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN
TEGALSARI, KOTA TEGAL

3.1 Lokasi Administrasi

Secara administratif Kelurahan Tegalsari terletak di wilayah Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, memiliki luas wilayah 207,27 Ha. Kelurahan Tegalsari terdiri dari 107 RT dan 14 RW dibatasi oleh:

- a. Sebelah Timur : Kelurahan Mintaragen, Kraton
- b. Sebelah Barat : Kelurahan Muarareja
- c. Sebelah Utara : Kelurahan Laut Jawa
- d. Sebelah Selatan : Kelurahan Kraton





Gambar III. 1 Peta Administrasi Kelurahan Tegalsari

3.1.1 Kondisi Kependudukan

Kependudukan merupakan salah satu aspek penting dalam suatu perencanaan. Jumlah dan karakteristik penduduk menjadi pedoman dalam melakukan analisis, terutama jika menyangkut aspek ruang.

Tabel III. 1

Jumlah Penduduk Kelurahan Tegalsari Tahun 2022

No.	Nama RW	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Kepala Keluarga (KK)
1.	RW001	5,45	1861	577
2.	RW002	15,73	2441	700
3.	RW003	14,66	2198	634
4.	RW004	17,26	2003	708
5.	RW005	11,00	1088	342
6.	RW006	6,59	866	289
7.	RW007	7,67	589	185
8.	RW008	12,45	1023	304
9.	RW009	13,53	2149	638
10.	RW010	13,49	1802	533
11.	RW011	10,13	801	264
12.	RW012	14,92	632	192
13.	RW013	6,79	389	134
14.	RW03A	13,66	1873	538
Jumlah		163,32	19715	6038

Sumber: RPLP Kelurahan Tegalsari, 2022

Berdasarkan data Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Tahun 2022, Kelurahan Tegalsari terdiri dari 14 RW dengan jumlah penduduk paling banyak ada di RW 02 sejumlah 2.441 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit berada di RW 13.

3.1.2 Karakteristik Fisik Kelurahan Tegalsari

Karakteristik wilayah Kelurahan Tegalsari merupakan permukiman dengan Kawasan industri sedang dan kecil. Posisi kelurahan Tegalsari mempunyai wilayah yang cukup strategis berada di pesisir pantai Laut Jawa. Batas administrasi Kelurahan Tegalsari pada bagian utara adalah Laut Jawa, bagian selatan adalah Kelurahan Kraton, pada bagian barat adalah Kelurahan Muarareja, pada bagian timur adalah Kelurahan Mintaragen. Topografi Kelurahan Tegalsari terdiri dari dataran rendah dan daerah pantai, dengan demikian topografinya menunjukkan datar. Kelurahan Tegalsari termasuk wilayah pesisir yang sebagian besar tanahnya terdiri dari pasir dan

lempung. Pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan untuk jalan, permukiman, bangunan, Kawasan industri, tambak, dan empang. Jumlah penduduk di Kelurahan Tegalsari hingga tahun 2021 adalah sebanyak 23.631 jiwa yang dibagi menjadi 2 yaitu jumlah penduduk perempuan sebanyak 11.786 jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 11.845 jiwa.

Kelurahan Tegalsari merupakan Kelurahan dengan luas Kawasan kumuh tertinggi di Kota Tegal setelah Kelurahan Panggung dengan luas Kawasan kumuh 31,43 Ha berdasarkan SK Walikota Tahun 2014. Agar luasan permukiman kumuh tidak bertambah setiap tahunnya, pemerintah Kota Tegal menerapkan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Dengan adanya program KOTAKU diharapkan di Kota Tegal khususnya kelurahan yang mempunyai kawasan kumuh tinggi seperti Kelurahan Tegalsari dapat tertangani dengan baik sehingga luas kawasan kumuh dapat berkurang.

Kelurahan Tegalsari merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal yang berada dekat dengan laut dan berada di daerah pusat kota. Topografi yang dimiliki daerah-daerah Kota Tegal, termasuk Kelurahan Tegalsari, cenderung datar dengan tingkat kelerengan 0-8%. Luas wilayah kelurahan 2,19 Km² yang terbagi menjadi 14 RW dan 107 RT. Untuk wilayah studi hanya 5 RW yang termasuk dalam kawasan kumuh dengan luas 31,43 hektar dengan kepadatan penduduk 132 jiwa/hektar.

3.1.3 Karakteristik Permukiman Kelurahan Tegalsari

Kelurahan Tegalsari termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional karena didalamnya terdapat kegiatan pelabuhan perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), merupakan potensi kebangkitan ekonomi bagi Kawasan prioritas khususnya pada Kawasan prioritas tegalsari yang merupakan sebagian besar penduduknya adalah Nelayan, serta ikut membentuk Kota Tegal sebagai Kota Bahari. Kemudian adanya kegiatan pelabuhan laut sebagai potensi kegiatan perhubungan dengan membentuk Kota Tegal berpotensi terhadap hasil kelautan dan maritime. Kemudian

adanya kegiatan Docking (perbaikan kapal) dan pembuatan kapal, ikut andil dalam meningkatkan ekonomi.

Kelurahan Tegalsari terletak di pesisir pantai utara di Kota Tegal. Wilayah pesisir Kelurahan Tegalsari memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang cukup tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Keragaman potensi-potensi sumber daya alam yang terdapat di wilayah pesisir Kelurahan Tegalsari banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti hasil laut sehingga dijadikan sumber mata pencaharian baik utama maupun sampingan. Tetapi, faktanya mempunyai mata pencaharian utama sebagai nelayan di Kelurahan Tegalsari tidak dapat menjamin kesejahteraan.

Dampak dari banyaknya masyarakat yang berpenghasilan rendah adalah permukiman yang menjadi padat dan tidak teratur karena masyarakatnya cenderung memilih membangun hunian atau tempat tinggal sesuai kemampuan dengan lahan dan dana yang terbatas tanpa memperhatikan kualitas bangunan itu sendiri. Sehingga untuk membangun hunian layak merupakan suatu permasalahan yang umum di Kelurahan Tegalsari. Selain karena faktor perekonomian masyarakat, Kawasan permukiman kumuh dapat dilihat secara fisik yaitu lingkungan yang kurang bersih seperti yang terjadi di Kelurahan Tegalsari banyak saluran drainase yang tidak berfungsi secara optimal karena tersumbat sampah. Akibatnya, jika hujan maupun rob datang maka akan terjadi genangan dan jika dibiarkan genangan dapat menyebabkan bau tidak sedap.

Permukiman masyarakat Kelurahan Tegalsari tidak terlepas dari aktivitas-aktivitas masyarakat yang membutuhkan ruang untuk area parkir perahu (tambatan perahu), area bongkar muat setelah melaut, area transaksi hasil melaut, area penjemuran dan proses produk hasil melaut serta area yang digunakan sebagai tempat perbaikan peralatan melaut. Mayoritas masyarakat pada kelurahan ini melakukan aktivitas-aktivitas tersebut seperti area untuk parkir perahu berada di lokasi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari yang berlokasi di Jalan Jongor, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat. Selanjutnya, terdapat satu TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang selama ini telah mengakomodasi kegiatan kebaharian

masyarakat. Namun, Kelurahan Tegalsari juga terkenal kumuh padahal sebagian nelayan yang rata-rata berpenghasilan rendah ini seharusnya juga tetap mempunyai hunian yang layak untuk mereka jadikan tempat berlindung dan berkegiatan. Sebuah hunian untuk para nelayan seharusnya aman, nyaman, produktif dan sesuai dengan kebutuhan nelayan tersebut (Ode Sitti Jurianti Aswad, 2016).

Beberapa masyarakat yang memiliki perahu sebagai alat transportasi mereka dalam melaut memiliki tempat parkir yang berada dekat dengan taman Tegalsari. Lokasi tersebut diperuntukan untuk masyarakat sekitar dalam memarkirkan perahu mereka setelah mereka pergi melaut. Berikut ini merupakan salah satu dokumentasi parkir perahu masyarakat Tegalsari.



Gambar III. 2 Area Parkir Perahu

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

“Jadi disepanjang sungai ini kalo kita bilang helikopter atau jamban yang berada di sepanjang pinggiran sungai nah sekitar tahun 2016-2017 sosialisasi diadakan terus baru mulai tahap pelaksanaan proyek sekitar tahun 2018 itu mulailah sepanjang sungai itu sampai dekat taman Tegalsari itu mereka jadikan tempat parkir perahu untuk masyarakat sekitar” (J,170224)

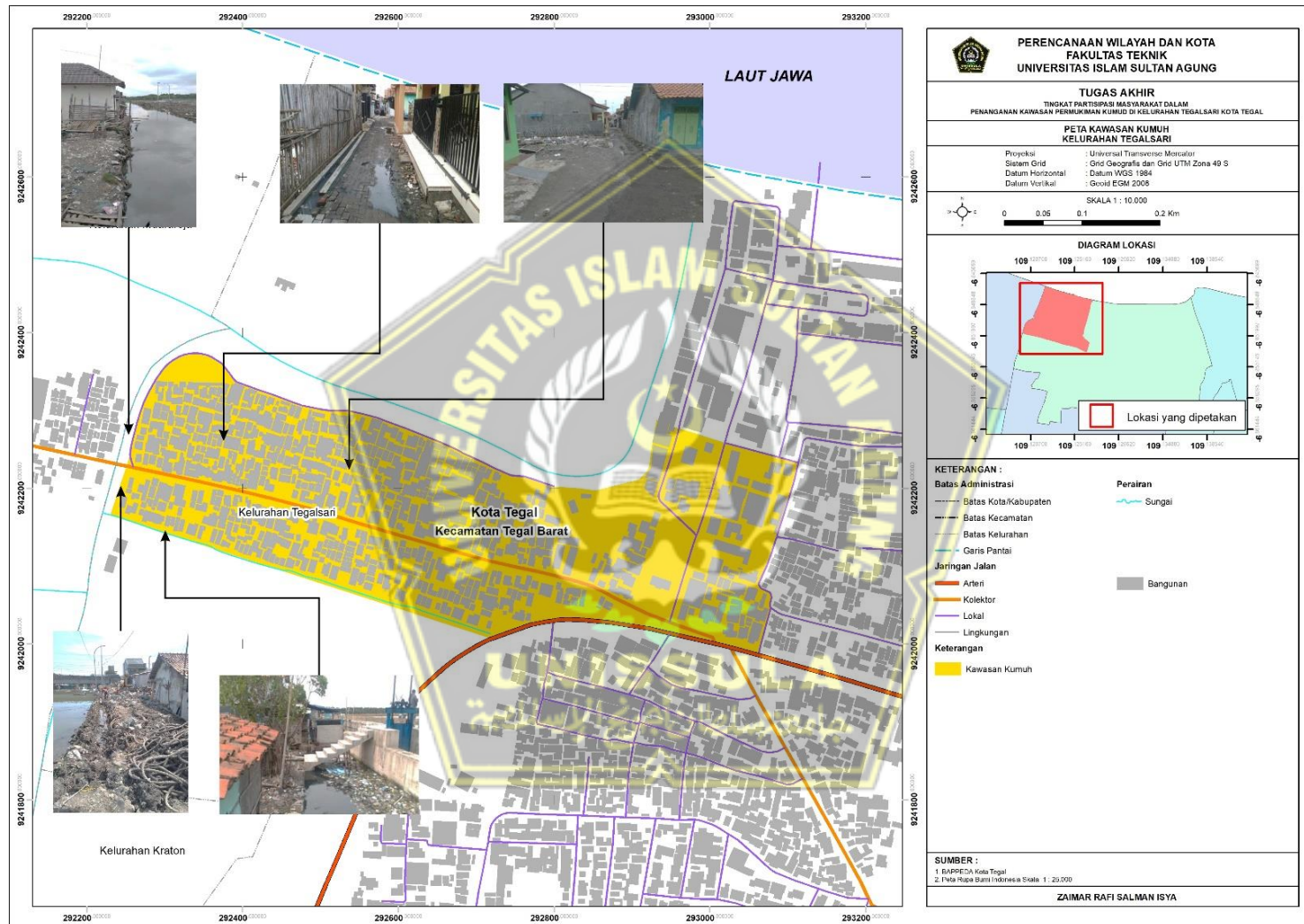
3.2 Perkembangan Permukiman Kumuh

Perkembangan permukiman pada penelitian ini berkembang karena proses pemadatan (Densification process). Proses karena faktor sulitnya mendapat pekerjaan, para pencari kerja secara otomatis akan menuju ke kota untuk mencari pekerjaan, baik itu formal maupun informal. Padahal Kota Tegal belum mampu sepenuhnya menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kota itu sendiri, setidaknya terdapat 10.215 jiwa (8,19%) penduduk di kota Tegal masih berstatus pengangguran terbuka dari total jumlah pekerja (diatas 15 tahun) sebanyak 124.736

jiwa. Akibatnya, para pendatang yang mencari pekerjaan formal di wilayah perkotaan terpaksa memilih pekerjaan informal dengan penghasilan yang relative rendah. Proses densifikasi permukiman kumuh di daerah penelitian memiliki pola perkembangan spasial sentripetal. Perkembangan spasial sentripetal adalah suatu proses penambahan bangunan-bangunan perkotaan yang terjadi di bagian dalam kota (*the inner parts of the city*) (Sabila & Sriyono, 2019)

Secara umum, terdapat 2 jenis perkembangan spasial sentripetal yaitu perkembangan horizontal dan perkembangan vertikal. Dalam penelitian ini, proses perkembangan yang terjadi adalah perkembangan spasial sentripetal secara horizontal. Proses perkembangan spasial sentripetal secara horizontal adalah proses penambahan bangunan-bangunan yang terjadi di bagian dalam kota dan pada daerah penelitian di RW 1,2,3,9 dan 3A Kelurahan Tegalsari termasuk dalam proses pengisian ruang-ruang pada lahan yang kosong dengan membangun rumah-rumah untuk dijadikan tempat tinggal. Bahkan di sempadan Sempadan sungai Sibelis setiap tahunnya ada peningkatan jumlah rumah, artinya masyarakat tidak peduli terhadap kelegalan lahan. Hal tersebut dikarenakan yang pertama pemukim kurang mengetahui adanya peraturan yang melarang membangun bangunan di atas lahan sempadan, kemudian kurangnya mendapat perhatian ketat dari pemerintah, yang ketiga karena terpaksa membangun permukiman di lahan illegal karena keterbatasan ekonomi.

Setiap tahunnya, jumlah rumah selalu meningkat maka kepadatan rumah setiap tahunnya pun meningkat. Pada tahun 2007 kepadatan bangunannya 44 unit/rumah sedangkan pada tahun 2017 kepadatan rumahnya 48 unit/ha. Jumlah peningkatannya tidak terlalu signifikan karena memang proses perkembangan permukiman di Kelurahan Tegalsari bertipe infiltrasi yaitu masuknya atau dibangunnya rumah-rumah baru di lahan-lahan yang kosong. Tipe infiltrasi memang berjalan lambat, namun secara terus menerus. Berbeda dengan tipe invasi yang berjalan cepat dan dalam kurun waktu yang singkat.



Gambar III. 3 Peta Lokasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Tegalsari



Gambar III. 4 Peta Time Series Permukiman Kelurahan Tegalsari

Sumber: Google.earth.com

Berdasarkan data time series citra diatas, dapat dilihat perkembangan permukiman dari tahun 2018 – 2024. Pada tahun 2018, letak bangunan yang terlalu dekat dengan bangunan lain dan masih terlihat kurang rapi. Kemudian pada tahun 2020 sudah terlihat perkembangan dalam pola permukiman yang sudah mulai tertata rapi, seiring dengan adanya program KOTAKU menghasilkan sebuah kemajuan hingga sekarang yang dapat dilihat pada data citra tahun 2024. Namun, pada wilayah RW 001 dan RW 002 masih termasuk dalam kategori buruk karena bangunannya yang masih belum tertata rapi. Berdasarkan jaringan prasarana, terlihat peningkatan mulai dari tahun 2020, jika dilihat dari citra hanya sebagian kecil yang dapat terlihat karena selebihnya harus diidentifikasi secara langsung.

3.3 Faktor yang Mempengaruhi Permukiman Kumuh

3.3.1 Keteraturan Bangunan

Keteraturan bangunan di RW 001 dan RW 002 jika dihitung secara keseluruhan termasuk dalam kategori buruk karena keteraturan bangunan di wilayah tersebut hanya 45,23%. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran dari pemilik

bangunan. Selain itu, tipe pemadatan permukiman di Kelurahan Tegalsari adalah Infiltrasi yang artinya pemadatan terjadi karena masyarakat membangun rumah di lahan-lahan yang kosong tanpa memikirkan keteraturan bangunan bahkan minim akses.

3.3.2 Jaringan Jalan

Saat ini, di daerah penelitian sudah tidak ada jalan yang masih menggunakan tanah akan tetapi permasalahannya berada pada lebar jalan yang sebagian besar belum sesuai dengan peraturan yang menyebutkan standar jalan lingkungan dua lajur adalah 3 meter (dapat dilewati dua kendaraan sepeda motor) yang mana masing-masing lajur mempunyai lebar 1,5 meter. Jalan lingkungan di daerah penelitian sebagian mempunyai lebar kurang dari 2 meter, hal ini dapat menghambat aktivitas warga yang menggunakan jalan tersebut sebagai akses utama menuju tempat kerja atau tempat tinggalnya.

Kondisi jalan di permukiman kumuh Kelurahan Tegalsari ini terbagi menjadi 3 (tiga) kategori diantaranya jalan rusak parah, jalan mengalami kerusakan di beberapa titik, dan tidak terdapat kerusakan. Kondisi jalan yang mengalami kerusakan parah ditandai dengan jalan yang sulit atau tidak dapat dilewati oleh masyarakat akibat kerusakan yang dialami dan hampir di seluruh badan jalan. Kondisi jalan yang hanya mengalami kerusakan di beberapa titik ditandai dengan jalan yang masih dapat dilewati oleh masyarakat setempat meskipun terjadi kerusakan dan hanya terjadi di beberapa titik jalan saja. Sedangkan kondisi jalan yang tidak terdapat kerusakan ditandai dengan jalan yang mudah dilewati oleh masyarakat dan tidak mengalami kerusakan apapun (Fasya Anindya, 2023).

Kerusakan jalan terjadi karena terlalu sering terendam air merusak material jalan sehingga menjadikannya berlubang. Peningkatan kondisi jalan di permukiman kumuh Kelurahan Tegalsari tidak terjadi secara merata. Beberapa titik di kawasan permukiman tersebut juga masih terdapat kerusakan di beberapa titik. Daerah yang mengalami peningkatan kondisi jalan meliputi RW 1, RW 2, dan RW 9. Sedangkan RW 3 dan RW 3A cenderung lebih stagnan. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh penanganan terhadap jalan lingkungan yang lebih banyak dilakukan di RW 1, RW 2,

dan RW 9. Kondisi jalan di RW 1 pada saat ini telah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kondisi ini ditunjukkan dengan tidak adanya jalan rusak di kawasan tersebut. Sebelumnya, kawasan RW 1 didominasi oleh lahan tambak yang kemudian ditata kembali melalui program Penataan Permukiman Nelayan dengan membangun jalan yang layak untuk dilewati. Penanganan jalan yang dilakukan diantaranya pelebaran jalan dan perkerasan jalan. Lebar jalan di RW 1 sebelumnya didominasi oleh jalan dengan lebar kurang dari 2 meter. Akan tetapi setelah pelebaran jalan di RW tersebut kondisinya cenderung lebih beragam yaitu 69,2% jalan dengan lebar kurang dari 2 meter yang banyak terdapat di dalam area permukiman dan 30,2% jalan dengan lebar 2 hingga 3,5 meter yang banyak terdapat di sekitar kawasan Taman Tegalsari.

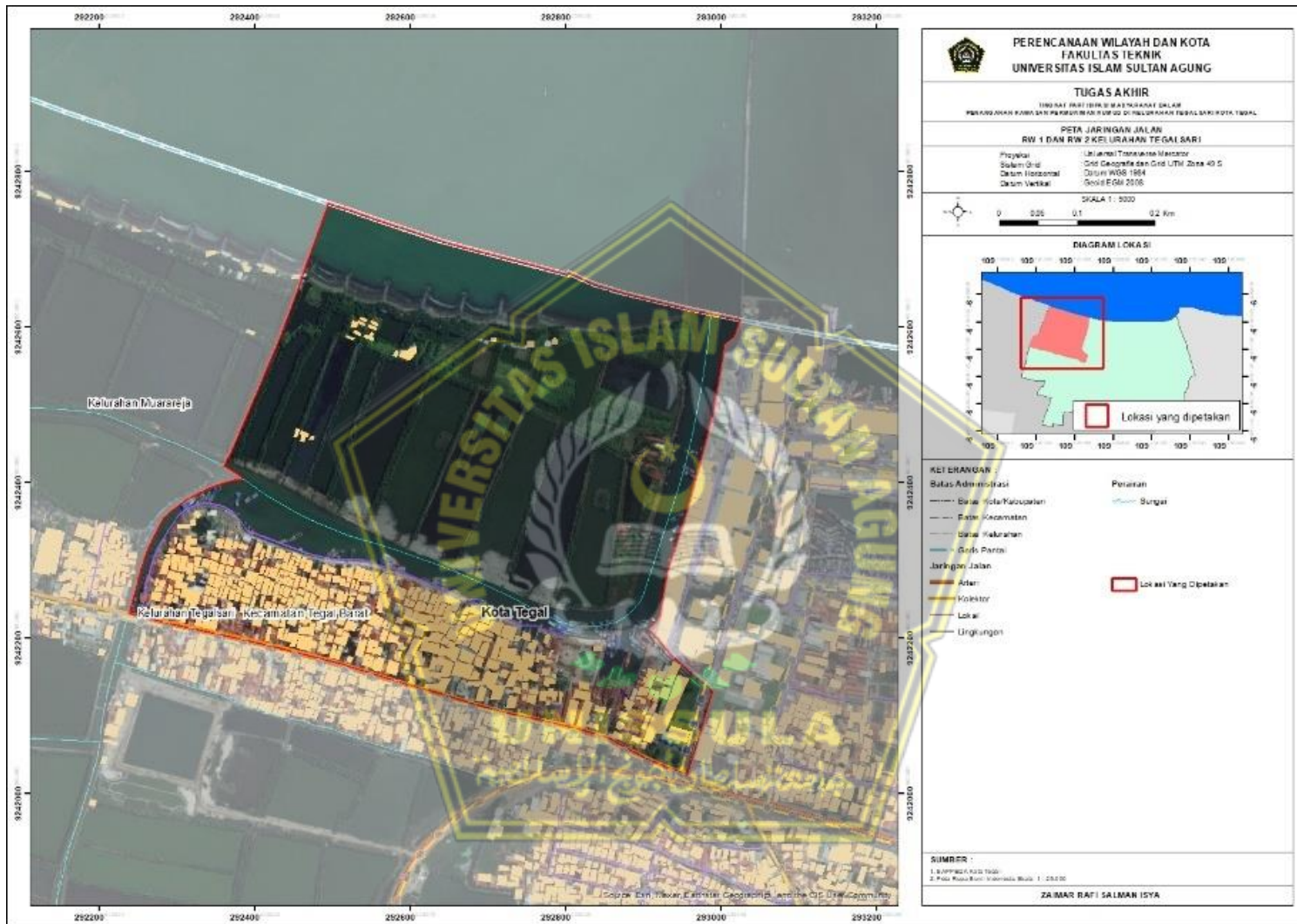


Gambar III. 5 Kondisi Akses Jalan Lingkungan di Kampung Nelayan Tegalsari

Sumber: Dokumentasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, 2016

“Sebenarnya kondisi jalan di kampung nelayan ini cukup baik tetapi hanya kurang lebar, paling disini lebarnya hanya 1 meter kan seharusnya 2 meteran agar tidak terlalu sempit. Kalau masalah rusaknya itu biasanya diakibatkan oleh factor alam contohnya kaya rob itu loh mas, tapi alhamdulillah sekarang disini kalau rob paling Cuma 2 jam an udah langsung surut mas” (S,180224)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dijelaskan bahwa kondisi jalan lingkungan atau permasalahan jalan lingkungan yang dirasakan masyarakat kampung nelayan tersebut yaitu terkait dengan kondisi lebar jalan yang tidak sesuai dengan standar kelayakan untuk jalan lingkungan. Kondisi jalan lingkungan yang berada di kampung nelayan tersebut mayoritas hanya memiliki lebar jalan 1 meter.



Gambar III. 6 Peta Jaringan Jalan

3.3.3 Jaringan Drainase

Drainase pada umumnya adalah pembuangan massa air baik secara alami maupun buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Drainase memiliki fungsi mengalirkan air permukaan ke badan air penerima atau bendungan resapan buatan, agar terhindar dari pengikisan aliran hujan terhadap badan jalan dan genangan air hujan pada kawasan tertentu.

1. Jaringan Drainase tersier merupakan fasilitas yang dibutuhkan oleh permukiman, jaringan tersier yang ada di Kampung Nelayan Tegalsari sebagian besar belum diperkeras.
2. Drainase sekunder yang ada di Kampung Nelayan Tegalsari merupakan jaringan drainase yang pada umumnya mengikuti pola jalan kolektor, dimana jaringan drainase tidak terpelihara dengan baik.



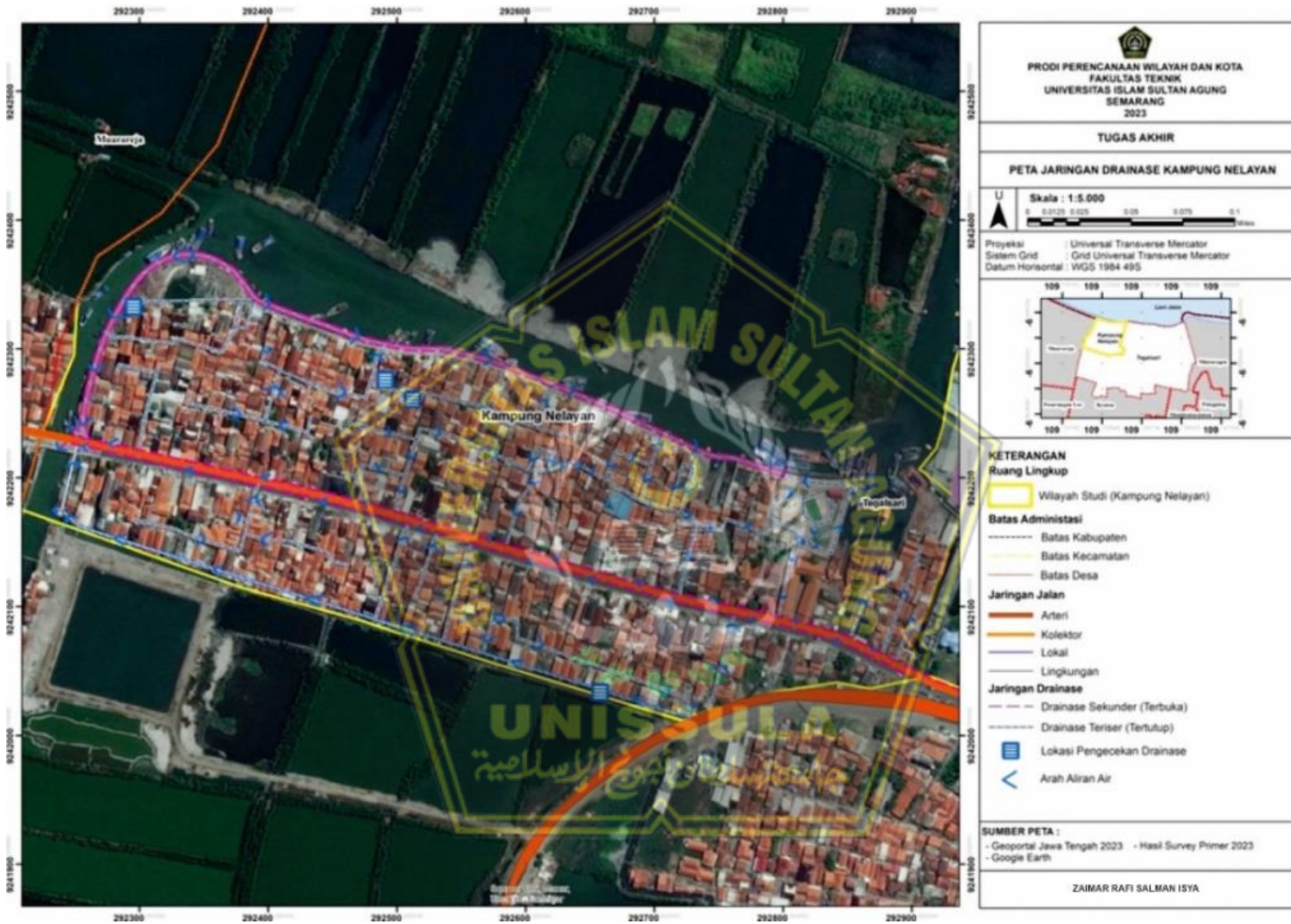
Gambar III. 7 Kondisi Jaringan Drainase Kampung Nelayan Tegalsari

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, 2016

Sebelum adanya program KOTAKU di Kampung Nelayan Tegalsari, kondisi permukiman pada kampung ini memiliki beberapa permasalahan, salah satunya yaitu terkait dengan kondisi drainase yang ada pada kawasan tersebut. Seperti pada gambar di atas, kondisi drainase pada kampung nelayan tersebut memiliki kualitas yang buruk sehingga berpotensi terjadinya genangan air bahkan banjir rob karena lokasinya yang berada di pesisir. Tidak berfungsinya saluran drainase dengan baik,

banyaknya sampah yang menyumbat saluran drainase, serta lemahnya tingkat kesadaran dari masyarakat dalam menjaga lingkungan permukiman mereka menjadi potensi munculnya permukiman kumuh. Lokasi Kampung Nelayan yang berada di pesisir dengan potensi bencana banjir rob, ditambah dengan kondisi beberapa saluran drainase yang tersumbat oleh sampah sehingga menyebabkan bau tidak sedap.





Gambar III. 8 Peta Jaringan Drainase

3.3.4 Pengelolaan Persampahan

Sampah merupakan suatu hal yang sangat mudah dijumpai di setiap daerah, tidak terkecuali pada Kampung Nelayan Tegalsari. Sampah industri maupun sampah rumah tangga setiap hari dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Namun, kurangnya kepedulian masyarakat pada kampung tersebut, sehingga ruang terbuka dan saluran air digunakan untuk menimbun sampah. Hal tersebut mengakibatkan adanya pencemaran lingkungan, menimbulkan wabah penyakit dan berpotensi permukiman kumuh.



Gambar III. 9 Kondisi Persampahan di Kampung Nelayan Tegalsari

Sumber: Dokumentasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal

Berdasarkan gambar diatas, kondisi persampahan di Kampung Nelayan Tegalsari sebelum adanya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sangat memprihatinkan. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan tempat tinggal mereka dan perekonomian rendah yang dimiliki masyarakat di kampung nelayan ini menyebabkan kerusakan lingkungan seperti sampah-sampah yang menumpuk di saluran drainase sehingga berpotensi menjadi banjir rob karena lokasinya yang berada di pesisir pantai.

Sampah yang dihasilkan di Kelurahan Tegalsari langsung dibuang ke TPA terdekat yaitu di Kelurahan Muarareja sehingga hingga saat ini tidak ada pengelolaan sampah yang dilakukan terlebih dahulu sebelum dikirim ke TPA. Tidak adanya pengelolaan sampah terjadi karena tidak adanya atau kurangnya inisiatif dari warga dan kurangnya dukungan dari pemerintah untuk membuat program Bank Sampah untuk memilah sampah. Selain itu, dengan adanya Bank Sampah dapat pula membantu perekonomian warga sekitar dengan memilah sampah yang dapat diolah menjadi kerajinan tangan.

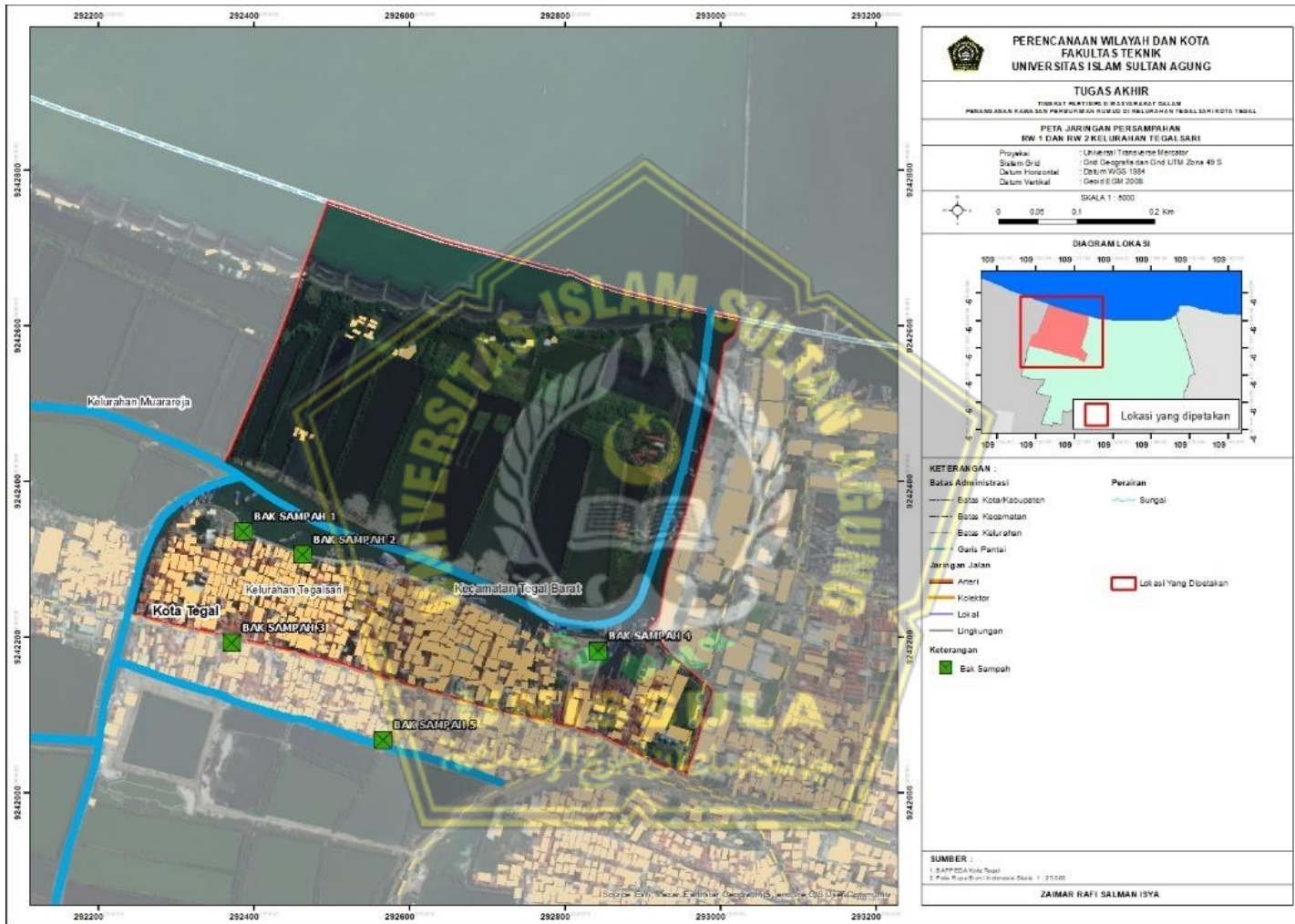


Gambar III. 10 Tempat Sampah di Kampung Nelayan Tegalsari

Sumber: Dokumentasi Penulis 2024

“Kebersihan utamanya tentang sampah ya, kami masing – masing rw punya petugas sampah yang mengambil sampah dari rumah tangga dibuang lalu ditampung di TPS, tapi jujur belum memilah – milah sampah yang organik dan non organik, kalau masalah dibakar itu tidak ada mas.” (S,180224)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, didapatkan kesimpulan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan tempat tinggal mereka. Kebiasaan-kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya dapat merusak alam maupun lingkungan sekitar mereka dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Namun, hal tersebut masih sangat sulit bagi masyarakat kampung nelayan ini dalam menjaga lingkungan mereka. Perbaikan infrastruktur dan penambahan fasilitas-fasilitas persampahan yang diberikan oleh pemerintah tidak dapat melindungi lingkungan sekitar mereka jika kesadaran dalam diri masyarakat nelayan tersebut masih kurang.



Gambar III. 11 Peta Jaringan Persampahan

3.3.5 Jaringan Air Limbah

Seperti halnya pengelolaan persampahan, limbah pun masih tidak ada pengelolannya kemudian limbah langsung dibuang ke sungai. Selain itu, ada pula saluran drainase yang merangkap menjadi saluran sanitasi. Hal tersebut mengakibatkan saluran drainase yang seharusnya hanya ada air yang mengalir terdapat pula limbah domestik maupun industri yang terbawa dan mengakibatkan saluran drainase menjadi tersumbat, berwarna hitam, dan berbau tidak sedap.



Gambar III. 12 Kondisi Jaringan Air Limbah di Kelurahan Tegalsari

Sumber: Dokumentasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, 2016

Sebelum masuknya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kampung Nelayan Tegalsari, mayoritas masyarakat menggunakan jamban sebagai sarana pembuangan air limbah mereka. Air limbah yang dihasilkan dari masing-masing rumah masyarakat kampung nelayan ini langsung dibuang ke sungai Siwatu dan Sibelis. Hal tersebut yang menjadi salah satu penyebab bau tidak sedap pada kawasan sepanjang sungai dan mengalami pencemaran air akibat limbah rumah tangga.

Setelah masuknya program KOTAKU Di Kelurahan Tegalsari menggunakan sistem pengelolaan limbah berupa septitank rumah tangga dan septitank komunal. Di sepanjang bantaran sungai Siwatu telah difasilitasi dan direalisasikan program bantuan sanitasi yang berkolaborasi antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal serta Dinas Kesehatan Kota Tegal.



Gambar III. 13 Pengelolaan Air Limbah di Kelurahan Tegalsari

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

“Menegenai air limbah itu awal – awal tahun 2014 – 2015 itu baru 50 % masyarakat yang mempunyai jamban atau seotitank, dari program itu dibuatlah kebijakan ada yang berupa sistem jamban kumunal yang satunya ada juga bantuan tiap rumah terutama untuk masyarakat yang tidak mampu, jadi penanganan air limbah itu sudah memakai septitank yang modern yang overlappingnya dilarikan ke drainase.” (S,180224)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya program penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tegalsari yang berupa KOTAKU itu masih sekitar 50% masyarakat disana yang sudah mempunyai septitank, setelah adanya program KOTAKU di Kelurahan Tegalsari mendapatkan bantuan berupa septitank kumunal dan septitank rumah tangga untuk masyarakat yang kurang mampu.

3.3.6 Jaringan Air Bersih

Air merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting, baik berupa air minum maupun air bersih. Ketersediaan air sangat penting tidak hanya untuk minum tetapi juga untuk memasak, mandi, mencuci dan kegiatan rumah tangga lainnya. Saat ini sumber air layak minum di Kelurahan Tegalsari 100% sudah terpenuhi dengan masuknya saluran air PDAM di wilayah tersebut karena daerah

penelitian berada di pesisir tentu saja jika menggunakan air tanah dangkal akan terasa payau dan berwarna keruh karena proses intrusi air laut sehingga tidak layak konsumsi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama masyarakat S yang menyatakan :

“Untuk pelayanan air bersih disini 100 % dari PDAM tersambung ke seluruh rumah warga mas.”

Hal senada juga disampaikan oleh E terkait bagaimana pelayanan air bersih yang disediakan pemerintah kepada masyarakat di Kelurahan Tegalsari :

“Bagus itu sudah PDAM sudah masuk semua, dan sudah ditatani semua itu pipanya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas di Kelurahan Tegalsari untuk pelayanan air bersih sudah sepenuhnya dari PDAM yang tersambung ke seluruh rumah warga.

3.4 Gambaran Umum Program KOTAKU

3.4.1 Sejarah Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kampung Nelayan Tegalsari

Pada tahun 2014, Pemerintah Kota Tegal mengeluarkan SK Walikota Tegal dengan pernyataan Kelurahan Tegalsari menjadi salah satu lokasi permukiman kumuh di Kota Tegal. Berdasarkan SK Walikota Tegal pada tahun 2014 tersebut, kemudian mulai diinisiasi penanganan permukiman kumuh yang ada pada Kelurahan Tegalsari dengan kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan Pemerintah Kota Tegal dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan S terkait dengan awal mula dilaksanakannya program KOTAKU di Kelurahan Tegalsari, berjalan mulai tahun 2016 dengan diawali kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk pengenalan awal dan memberikan pemahaman terkait tujuan program dan sasaran program.

“Dimulai pada tahun 2014 dengan surat keputusan walikota nomer 6 yang mengadakan di Kota Tegal itu ada daerah – daerah kumuh, untuk Kelurahan Tegalsari sendiri meliputi rw 1, rw 2, rw 3, rw 9, rw 3a, kurang lebih dengan luas 31,40 Ha, dari fase itu mulai 2015 itu ada mulai menyiapkan baseland datanya, memetakan wilayah – wilayah rt mana saja segala macem untuk penanganannya itu baru dimulai th 2017, jadi ada jeda

rentan waktu cukup panjang daari persiapan, tahun 2016 itu ya sudah mulai pengukuran – pengukuran sampai selesai itu dinyatakan zero itu tahun 2019 menjelang ada covid itu.” (S/180224)

Hal senada juga dikatakan oleh R terkait dengan tahun awal berjalannya program KOTAKU di Kampung Nelayan Tegalsari,

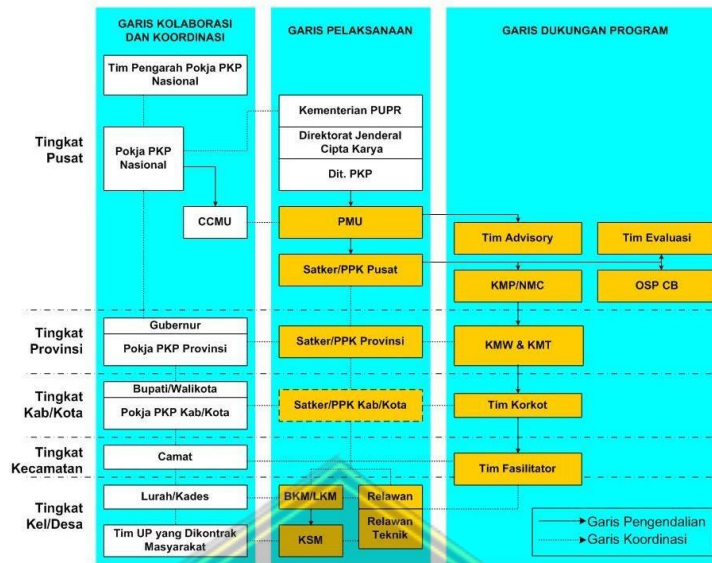
“Ya KOTAKU itu sudah lama sekali dari tahun 2016 itu sudah ada, kami dari pihak Kelurahan hanya sekedar perantara saja antara pemerintah dan masyarakat sini, kita mengadakan sosialisasi terkait KOTAKU bersama masyarakat dan pihak KOTAKU juga untuk membahas pelaksanaan dan manfaat KOTAKU.” (R/160224)

3.4 Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Tegalsari

3.4.2 Pelaksana Program

Program KOTAKU dalam pelaksanaannya menggunakan platform Kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dengan menempatkan peran Masyarakat dengan pemerintah kabupaten/kota sebagai actor utama (pengendali). Implementasi program dalam mencegah dan meningkatkan suatu permukiman dengan kondisi kumuh dimulai dari Langkah pendataan, perencanaan program yang berisikan sasaran dalam penanganan permukiman kumuh, implementasi program, pemantauan dan evaluasi keberlangsungan program serta keberlanjutan.

Setiap tahapan dilaksanakan melalui partisipasi antara masyarakat dengan pemerintah kabupaten/kota bersama dengan stakeholder, masyarakat diikuti dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas dari permukiman kumuh sangat erat kaitannya dengan masyarakat, serta penerapan prinsip bahwa pembangunan yang dilakukan dipastikan tidak boleh membahayakan masyarakat, sehingga bergantung pada penilaian lingkungan dan social (langkah-langkah keamanan) dalam pelaksanaan program KOTAKU. Dibawah ini actor-aktor pelaksana yang terlibat dalam program KOTAKU sebagai berikut:



Gambar III. 14 Struktur Organisasi Pengelola Program KOTAKU

Sumber: Buku Pedoman Umum Program KOTAKU

Komunikasi antar para actor pelaksana yang terlibat dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) memegang peranan yang penting dalam mensukseskan program tersebut. Komunikasi merupakan salah satu factor yang memiliki pengaruh penting terhadap bagaimana kelompok sasaran menerima informasi dan karenanya menjadi factor penentu kualitas suatu kebijakan yang diterapkan. Menurut (Aisyahwati et al., 2018), semakin banyak implementor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, semakin besar kemungkinan terjadinya hambatan dan kesalahan. Oleh karena itu, penyebaran isi kebijakan dengan cara komunikasi yang baik juga berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan suatu program. Sarana komunikasi yang dipergunakan setiap implementor guna menyampaikan isi kebijakan pada kelompok sasaran berperan sangat penting.



Gambar III. 15 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Tegalsari Kota Tegal

Sumber: Dokumentasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, 2018

Seperti pada gambar diatas, dalam pelaksanaan penataan kawasan kumuh di Kelurahan Tegalsari melalui Program KOTAKU, dilakukannya koordinasi bersama antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal.

3.5 Proses pelaksanaan program KOTAKU di Kampung Nelayan Tegalsari

3.4.1 Sosialisasi program KOTAKU di Kampung Nelayan Tegalsari

Proses awal pelaksanaan program KOTAKU dilaksanakan melalui sosialisasi kepada masyarakat kemudian membentuk suatu kelompok sehingga dapat diberikan pemahaman terkait apa itu program KOTAKU serta tujuan dan sasaran program. Program KOTAKU adalah bentuk implementasi dari suatu kebijakan yang diterapkan dalam bentuk kegiatan untuk menangani suatu kawasan permukiman kumuh. Untuk mendapatkan gambaran terkait bagaimana berlangsungnya proses tata kelola program KOTAKU, dilakukan wawancara dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tegal bersama pihak ES yang menyatakan :

“Awal mula program KOTAKU masuk itu ada sosialisasi dengan masyarakat yang dilakukan oleh kelurahan. Pihak kelurahan yang memberikan pemahaman apa itu KOTAKU, tujuan dari KOTAKU itu seperti apa, dan apa yang menjadi sasaran. Karena kan tujuan KOTAKU juga ingin mengubah pola hidup Masyarakat kampung nelayan jadi lebih sehat.” (ES/160224)

Hal senada juga dikatakan oleh R dalam wawancara tentang proses pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh “KOTAKU” di Kelurahan Tegalsari

“Kami dari pihak Kelurahan hanya sekedar perantara saja antara pemerintah dan masyarakat sini, kita mengadakan sosialisasi terkait KOTAKU bersama masyarakat dan pihak KOTAKU juga untuk membahas pelaksanaan dan manfaat KOTAKU.” (R/160224)

Hal senada juga dikatakan oleh SS terkait dengan bagaimana proses penyampaian informasi mengenai program KOTAKU kepada Masyarakat yaitu sebagai berikut:

“Awal masuk program KOTAKU memang ada sosialisasi langsung bersama masyarakat lewat pihak kelurahan, pihak kelurahan menjelaskan rencana apa saja yang menjadi sasaran program KOTAKU. Ini saya cerita karena saya memang dari

awal menjadi relawan dari tim KOTAKU dari awal pemetaan, terus sosialisasi sampai tahap pengerjaan.” (SS/180224)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa tahap awal sebelum berjalannya program KOTAKU di Kampung Nelayan Tegalsari, telah dilakukan sosialisasi yang difasilitasi oleh Kelurahan Tegalsari. Sosialisasi tersebut bertujuan sebagai bentuk komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam pelaksanaan program KOTAKU. Seluruh pelaksana program memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk bertanya terkait dengan rencana program yang dirancang pemerintah dan menerima berbagai masukan-masukan atau ide pokok program dari masyarakat karena program KOTAKU merupakan salah satu program penanganan permukiman kumuh yang ditujukan untuk masyarakat dan harus melibatkan masyarakat tersebut.

3.4.2 Penataan Prasarana Lingkungan

Normalisasi Sungai Siwatu menjadi prioritas utama dalam penanganan banjir yang melanda Kelurahan Tegalsari, Kelurahan Kraton, Kelurahan Kemandungan dan Kelurahan Pekauman. Rencana kegiatan penataan tersebut dipusatkan pada Kelurahan Tegalsari yang berada tepatnya pada RW 1 dan RW 2, seperti yang tertuang dalam Dokumen RP2KPKP yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota Tegal. Penataan Kawasan Siwatu tersebut sudah dilakukan secara bertahap hingga saat tahun 2021 yang melibatkan berbagai pihak terkait dengan rincian kegiatan sebagai berikut.

Tabel III. 2 Kegiatan Penataan Sub Kawasan Segmen Siwatu

No.	Kegiatan	Volume	Biaya	Tahun
1.	Pembuatan Jalan dan Kolam Retensi Tahap I	APBD I	1,300,000,000.00	2016
2.	Normalisasi Siwatu dan Sheet Pile Tahap I	APBD I	2,000,000,000.00	2017
3.	Kolam Retensi dan Normalisasi Tahap II	APBD I	2,000,000,000.00	2019
4.	Kolam Retensi dan Normalisasi Tahap II	APBD II	18,000,000,000.00	2019
5.	Normalisasi dan Penataan Siwatu	APBD I	1,000,000,000.00	2020
6.	Premonade Siwatu 2 sisi (IPAL , Drainase)	APBN Loan	22,303,827,000.00	2020
7.	RTP Permukiman	APBN Loan	300,000,000.00	2020
8.	Hydrant	BUMD	23,520,000.00	2020
9.	Pembangunan RTH	APBD II	50,000,000,000.00	2021
10.	Penyusunan DED	APBD II	100,000,000.00	2020
11.	Penyusunan Amdal Lalin RTH Besar Jalan lingkaran utara	APBD II	150,000,000.00	2020
12.	Penyiapan lahan untuk jalan pengikat dipermukiman	APBD II	5,000,000.00	2021

Sumber: Dokumen Rencana Penyiapan Lahan Kawasan Pesisir Barat Segmen Siwatu, 2020

Rencana kegiatan penataan sub Kawasan segmen Siwatu yang telah dilaksanakan pada tahap ini adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan Jalan Premonade
2. Pembangunan Sheetpile Siwatu
3. Pembangunan Septitank Komunal
4. Pembangunan Jembatan Penghubung Menuju Ruang Terbuka Hijau
5. Pembangunan Drainase Sekunder
6. RTP Permukiman

Tabel III. 3 Daftar Kegiatan Terpadu Program KOTAKU Kelurahan Tegalsari Sub Kawasan Siwatu

No.	Kegiatan	Volume	Satuan	Penanggungjawab	Sumber Dana
1.	Pembangunan jalan premonade	2.820	M ²	NSUP-KOTAKU	APBN 2020
2.	Pembangunan sheetpile Siwatu	1.133	M	NSUP-KOTAKU	APBN 2020
3.	Pembangunan septitank komunal	9	Unit	NSUP-KOTAKU	APBN 2020
4.	Pembangunan Jembatan	3	Unit	NSUP-KOTAKU	APBN 2020
5.	Drainase Sekunder	512	M	NSUP-KOTAKU	APBN 2020
6.	RTP Permukiman	128,25	M ²	NSUP-KOTAKU	APBN 2020

Sumber : Dokumen Rencana Penyiapan Lahan Segmen Siwatu, 2020

Pembangunan infrastruktur tersebut merupakan upaya penataan kawasan bantara sungai Siwatu yang konservatif dan edukatif sehingga memberikan perlindungan terhadap bantaran sungai dan menjadi media pembelajaran bagi masyarakat Kelurahan Tegalsari. Dengan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan destinasi wisata konservasi dan edukasi di pesisir Barat Kota Tegal.

Tabel III.4 Kegiatan Pelaksanaan Program KOTAKU dari Tahun 2016 – 2021.

No.	Tahun	Kegiatan
1.	2016	Pemetaan kawasan, perencanaan program, sosialisasi program
2.	2017	Pelaksanaan perbaikan jalan dan drainase
3.	2018	Pelaksanaan perbaikan jalan dan drainase, pembangunan saluran PDAM tahap dua
4.	2019	Pelaksanaan perbaikan saluran drainase, pembangunan septitank, dan pembangunan TPS
5.	2020	Pelaksanaan perbaikan jalan dan pembangunan septitank
6.	2021	Penataan kawasan Sungai siwatu dan program seluruh program KOTAKU dinyatakan selesai.

Sumber : Analisis Penulis 2024

3.4.3 Evaluasi dan Monitoring Program KOTAKU di Kelurahan Tegalsari

Evaluasi program merupakan pemantauan dari berlangsungnya suatu program atau kebijakan. Evaluasi program bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada pelaksana dan pemangku kepentingan lainnya tentang bagaimana program tersebut berjalan sesuai dengan rencana dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif, guna memandu perubahan rencana bila perlu, dan untuk menilai seberapa banyak actor yang terlibat yang menjalankan peranan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan program. Evaluasi pengelolaan program KOTAKU dipergunakan dalam tahap pelaksanaan program pengentasan permukiman kumuh untuk mengidentifikasi perencanaan proses atau perencanaan pelaksanaan dengan memberikan informasi sebagai keputusan program dan sebagai catatan atau arsip aturan yang sudah terjadi.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui ciri-ciri permukiman kumuh dilihat dari segi fisik sebagai berikut :

- a) Merupakan kompleks perumahan dan permukiman;
- b) Kondisi bangunan tidak sesuai dengan standar yang berlaku, tidak beraturan dan padat bangunan;
- c) Kondisi sarana dan insfraktur lingkungan tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Sarana dan insfraktur terbatas, terutama di bidang cipta karya.

Ciri-ciri fisik tersebut kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan kriteria dan indicator gejala permukiman kumuh dalam mengidentifikasi lokasi permukiman kumuh dan permasalahan lingkungan yang ada pada lokasi tersebut. Selain ciri fisik, terdapat pula ciri non fisik yang harus diidentifikasi sebagai penyebab adanya

permukiman kumuh seperti pola hidup masyarakat, legalitas bangunan, pendapatan masyarakat, dan sebagainya.

Evaluasi digunakan sebagai tolak ukur dalam melihat keberlangsungan program, apakah telah sesuai dengan strategi yang direncanakan sebelumnya atau tidak. Evaluasi ini disebut evaluasi proses. Evaluasi pengelolaan program ini termasuk dalam identifikasi masalah prosedur terkait dengan penyampaian pelaksanaan program dan kegiatan sasaran program. Perubahan dalam kegiatan yang menjadi sasaran program dipantau secara jujur dan berhati-hati. Pencatatan kegiatan penting dilakukan untuk membantu dalam perolehan keputusan yang digunakan dalam menentukan kekuatan dan kelemahan dari program tersebut. Tujuan evaluasi pengelolaan program

KOTAKU juga untuk memberikan informasi sebagai dasar pengembangan program serta merekam dan mengevaluasi jalannya kegiatan. Pada tahap evaluasi ini mencakup hasil pengumpulan data evaluasi, yang ditetapkan dan diterapkan pada saat berlangsungnya program, serta dampak atau manfaat yang diperoleh pasca berjalannya program.

Selanjutnya, keluaran atau output program berupa evaluasi yang bertujuan untuk melihat bagaimana hasil yang telah dicapai dari program sebagai dasar keputusan akhir tentang perbaikan, modifikasi, penambahan atau penghentian. Evaluasi hasil program dapat dilakukan dalam mengukur pencapaian yang telah dicapai dari suatu program tertentu melalui pengumpulan penilaian yang telah dilakukan oleh pemangku kepentingan program.

A. Penataan prasarana lingkungan

Berdasarkan pelaksanaan program KOTAKU yang berada di Kampung Nelayan Tegalsari, didapatkan hasil bahwa telah banyak kegiatan yang dilakukan selama proses KOTAKU berjalan mulai dari pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi hingga perbaikan permukiman yang layak huni. Sesuai wawancara yang dilakukan oleh SS terkait dengan sosialisasi awal hingga pencapaian

program pada pelaksanaan program KOTAKU adalah sebagai berikut.

“Awal masuk program KOTAKU memang ada sosialisasi langsung bersama masyarakat lewat pihak kelurahan, pihak kelurahan menjelaskan rencana apa saja yang menjadi sasaran program KOTAKU. Ini saya cerita karena saya memang dari awal menjadi relawan dari tim KOTAKU dari awal pemetaan, terus sosialisasi sampai tahap pengerjaan.”

“Secara fisik, penanganan, ataupun pekerjaan, Cuma kami juga ada kendala. KOTAKU sebenarnya sudah clear 100 % Cuma karena kami ada di wilayah pesisir terjadi rob besar pada tahun akhir 2019 jadi infrastruktur yang sudah baik itu rusak kembali gitu loh ya, itu kendala – kendala yang ada, karena faktor alam terutama itu air laut pasang.” (SS/180224)

Hal tersebut juga dikuatkan oleh lurah Kelurahan Tegalsari R dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Baik sih kalau tak liat, lebih tertata ya jadi enak dilihat. Semua kondisi susah baik namun itu mas tetep harus ada perawatan dari masyarakat itu sendiri ya kaya menjaga gitu lah apa yang sudah diperbaiki dari pemerintah.” (R/160224)

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Tegalsari, pencapaian yang telah didapatkan adalah adanya perubahan permukiman masyarakat yang dulunya permukiman kumuh yang tidak layak huni kini menjadi permukiman layak huni dan dari infrastuktur semua sudah di perbaiki. Namun karena Kelurahan Tegalsari terletak di pesisir dan sering terkena rob jadi dapat mempercepat kerusakan pada infrastuktur. Selain itu, dibahas pula keberhasilan yang dicapai dalam proses pelaksanaan program KOTAKU terkait dengan alih fungsi pengelolaan lingkungan permukiman yang semula kumuh menjadi permukiman yang layak huni. Berikut merupakan wawancara yang dilakukan bersama Ketua RW1 Kelurahan Tegalsari:

“Kebersihan utamanya tentang sampah ya, kami masing – masing rw punya petugas sampah yang mengambil sampah dari rumah tangga dibuang lalu ditampung di TPS, tapi jujur belum memilah – milah sampah yang organik dan non organik, kalau masalah dibakar itu tidak ada mas.’

“Mengenai air limbah itu awal – awal tahun 2014 – 2015 itu baru 50 % masyarakat yang mempunyai jamban atau seotitank, dari program itu dibuatlah kebijakan ada yang berupa sistem jamban kumunal yang satunya ada juga bantuan tiap rumah terutama untuk masyarakat yang tidak mampu, jadi penanganan air limbah itu sudah memakai septitank yang modern yang overlappingnya dilarikan ke drainase.”

“Untuk pelayanan air bersih 100 % dari PDAM tersambung ke seluruh rumah warga.” (SS/180224)

Hal senada juga dikatakan oleh ES terkait output atau hasil dari program KOTAKU di Kelurahan Tegalsari dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Baik sih kalau tak liat, lebih tertata ya jadi enak dilihat. Semua kondisi susah baik namun itu mas tetep harus ada perawatan dari masyarakat itu sendiri ya kaya menjaga gitu lah apa yang sudah diperbaiki dari pemerintah.” (ES/160224)

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penataan prasarana lingkungan di Kampung Nelayan Tegalsari didapatkan hasil yang telah dicapai adalah perbaikan terhadap drainase, jalan lingkungan, air bersih, air limbah, serta perubahan terhadap kehidupan masyarakat.



BAB IV
ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN
TEGALSARI, KOTA TEGAL

Bab ini menjelaskan tentang bentuk dan tingkat partisipasi dalam penanganan Kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tegalsari, Kota Tegal. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data berupa pengamatan/survei lapangan, wawancara kepada narasumber, dan hasil dokumentasi pada saat dilokasi pengamatan. Proses analisis menggunakan kajian teori yang dipilih yaitu bentuk partisipasi masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.

Dalam penelitian ini perlu pemenuhan sumber data yang dilakukan dengan wawancara agar dapat memperoleh informasi kondisi lapangan secara aktual dan rinci. Pengamatan penelitian akan dilakukan dengan mengumpulkan sumber data yang didapat dari narasumber. Adapun narasumber tersebut adalah perangkat kelurahan dan masyarakat di Kelurahan Tegalsari, Kota Tegal. Hasil penelitian ini berupa temuan studi tingkat partisipasi masyarakat dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tegalsari, Kota Tegal.

4.1 Analisis Bentuk dan Analisis Tingkat Partisipasi Dalam Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Tegalsari

Partisipasi mempunyai arti keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap fase kegiatan mulai dari perencanaan dan pengambilan keputusan ,implementasi evaluasi dan pemanfaatan atas inisiatif sendiri berdasarkan kearifan lokal yang ada pada mereka untuk menyelesaikan hal-hal yang dianggap sebagai hambatan dan merupakan bentuk inovatif dalam melihat peluang atas kebutuhan-kebutuhannya berdasarkan perhitungan untung rugi. Pengertian partisipasi masyarakat sering diartikan keikutsertaan, keterlibatan dan kesamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan perumusan kebijaksanaan, hingga pelaksanaan program (Wibisono,1989).

Dalam menganalisis tingkat partisipasi masyarakat, penelitian ini menggunakan teori tingkat partisipasi dari Arnstein 1969. Terdapat 3 tingkatan partisipasi menurut Arnstein yaitu, Non-participation, Tokenism, dan Citizen Power. Terdapat 3 subtingkat tokenism yaitu informing, consultation dan placation. Sedangkan 3 subtingkat citizen power yaitu partnership, delegated power dan citizen control. Dalam penelitian studi partisipasi masyarakat dalam penanganan kawasan permukiman kumuh Kelurahan Tegalsari ini akan meneliti 2 tingkat partisipasi yaitu pada tingkat Tokenism dan Citizen Power. Pandangan Arnstein (1969), partisipasi merupakan kekuatan yang dimiliki masyarakat untuk mengatasi persoalan pada masa saat ini untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa depan (Geogra & Gadjah, 2013).

Pelaksanaan partisipasi ini dapat dicapai dengan strategi mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan sharing informasi, merencanakan tujuan, penentuan kebijakan, pelaksanaan program, evaluasi dan monitoring program yang telah dilaksanakan.

4.1.1 Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Pasa Saat Awal Masuknya Program KOTAKU

Proses awal pelaksanaan program KOTAKU dilaksanakan melalui sosialisasi kepada masyarakat kemudian membentuk suatu kelompok sehingga dapat diberikan pemahaman terkait apa itu program KOTAKU serta tujuan dan sasaran program. Program KOTAKU adalah bentuk implementasi dari suatu kebijakan yang diterapkan dalam bentuk kegiatan untuk menangani suatu kawasan permukiman kumuh. Untuk mendapatkan gambaran terkait bagaimana berlangsungnya proses tata kelola program KOTAKU, dilakukan wawancara dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tegal Bersama pihak E yang menyatakan:

“Awal mula program KOTAKU masuk itu ada sosialisasi dengan masyarakat yang dilakukan oleh kelurahan. Pihak kelurahan yang memberikan pemahaman apa itu KOTAKU, tujuan dari KOTAKU itu seperti apa, dan apayang menjadi sasaran. Karena kan tujuan KOTAKU juga ingin mengubah pola hidup Masyarakat kampung nelayan jadi lebih sehat.” (E,160224)

Hal senada juga dikatakan oleh S terkait dengan bagaimana proses penyampaian informasi mengenai program KOTAKU kepada Masyarakat yaitu sebagai berikut:

“Awal masuk program KOTAKU memang ada sosialisasi langsung bersama masyarakat lewat pihak kelurahan, pihak kelurahan menjelaskan rencana apa saja yang menjadi sasaran program KOTAKU. Ini saya cerita karena saya memang dari awal menjadi relawan dari tim KOTAKU dari awal pemetaan, terus sosialisasi sampai tahap pengerjaan.” (S,180224)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa tahap awal sebelum berjalannya program KOTAKU di kampung nelayan Tegalsari, telah dilakukam sosialissi yang difasilitasi oleh Kelurahan Tegalsari. Sosialisasi tersebut bertujuan sebagai bentuk komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam pelaksanaan program KOTAKU. Seluruh pelaksana program memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk bertanya terkait dengan rencana program yang dirancang pemerintah dan menerima berbagai masukan-masukan atau ide pokok program dari masyarakat karena KOTAKU merupakan salah satu program penanganan permukiman kumuh yang ditujukan untuk Masyarakat dan harus melibatkan masyarakat tersebut.



Gambar IV. 1 Media Sosialisasi Program KOTAKU di Kelurahan Tegalsari

Sumber: Dokumentasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, 2016

A. Sosialisasi Program KOTAKU

Pemerintah bersama dinas-dinas terkait seperti DISPERKIM, DPUPR, Kelurahan serta masyarakat Kelurahan Tegalsari mengadakan sosialisasi terkait program KOTAKU (kota tanpa kumuh) yang akan dilakukan di Kelurahan Tegalsari. Sosialisasi ini bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang program KOTAKU, berikut hasil wawancara dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tegal bersama pihak E yang menyatakan :

“Awal masuk program KOTAKU itu ada sosialisasi dengan masyarakat yang dilakukan oleh kelurahan, masyarakat dilibatkan pada proses awal sosialisasi” (E,160424)

Hal senada juga disampaikan oleh S terkait dengan bagaimana proses sosialisasi program KOTAKU kepada masyarakat yaitu sebagai berikut :

“Awal masuk KOTAKU memang ada sosialisasi langsung bersama masyarakat lewat pihak kelurahan, pihak kelurahan menjelaskan rencana apa saja yang menjadi tujuan dan sasaran program KOTAKU ” (S,180224)

“Waktu itu ada rapat di kelurahan sosialisasi saya mewakili warga perempuan” (Surni,80824)

“Awal masuknya kalau ngga salah dulu tahun 2016 disosialisasikan oleh kelurahan, ada rapat juga di kelurahan tetapi dari warga hanya perwakilan saja yang datang” (Adi Triyono,180824)

Berdasarkan hasil wawancara diatas sosialisasi bertujuan sebagai bentuk komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam mencapai tujuan dan sasaran program KOTAKU. Masyarakat dilibatkan langsung dalam proses sosialisasi program KOTAKU agar masyarakat mengetahui tujuan dan rencana program KOTAKU serta pemerintah menerima ide atau masukan dari masyarakat yang mempertanyakan tentang program KOTAKU.

4.1.2 Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan

Penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tegalsari melalui program KOTAKU membutuhkan partisipasi dari masyarakat Kelurahan Tegalsari dalam pengambilan keputusan. Keputusan hasil rapat ditentukan BKM, KSM,

masyarakat yang selanjutnya akan disampaikan kepada pihak kelurahan untuk didiskusikan kembali. Kegiatan pertemuan ini biasanya dilakukan saat ada pertemuan RT dan pengajian untuk membahas program KOTAKU. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan H mengenai pengambilan keputusan masyarakat dalam penanganan kawasan permukiman kumuh melalui program KOTAKU di Kelurahan Tegalsari.

“Untuk pengambilan keputusan masyarakat semua itu setuju dengan semua program dari KOTAKU mas, artinya tidak ada yang keberatan atau menolak mengenai program yang akan dilaksanakan oleh KOTAKU itu mas.” (H,160224)

Hal senada juga dikatakan oleh S terkait dengan bagaimana proses pengambilan keputusan program KOTAKU di Kelurahan Tegalsari sebagai berikut:

“Semua masyarakat setuju dan mendukung program KOTAKU tidak ada kelompok masyarakat yang menolak rencana pembangunan dari KOTAKU, tetapi untuk program pelebaran jalan Masyarakat setuju dengan catatan tanah yang bersertifikat SHM dapat ganti rugi, tanah milik pemerintah kota SK tidak dapat ganti rugi, bangunan yang kena proyek dapat ganti.” (S,170224)

“Ya mas semua Masyarakat telah mengkonfirmasi ke saya bahwa masyarakat setuju dan sangat support dengan pelaksanaan program KOTAKU ini, kan juga program KOTAKU ini dilaksanakan untuk Masyarakat mas biar lingkungannya itu tertata dan bersih.” (E,160224)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan setelah diadakannya sosialisasi mengenai program KOTAKU, semua masyarakat setuju dengan program program yang akan dilaksanakan oleh KOTAKU. Namun ada juga catatan dari masyarakat mengenai program pelebaran jalan, masyarakat setuju tetapi dengan syarat tanah yang bersertifikat SHM dapat ganti rugi, tanah milik pemerintah kota SK tidak dapat ganti rugi, dan bangunan yang kena proyek dapat ganti.

A. Pengambilan Keputusan Masyarakat

Setelah adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah, selanjutnya diadakan rapat warga yang biasanya dilakukan pada saat pertemuan RT dan pengajian, keputusan dan hasil rapat KOTAKU ditentukan oleh BKM, KSM, dan masyarakat yang selanjutnya akan disampaikan kepada pihak kelurahan untuk didiskusikan kembali.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan H mengenai pengambilan keputusan masyarakat dalam penanganan kawasan permukiman kumuh melalui program KOTAKU di Kelurahan Tegalsari :

“Untuk pengambilan keputusan masyarakat semua itu setuju dengan semua program dari KOTAKU mas, artinya tidak ada yang keberatan atau menolak mengenai program yang akan dilaksanakan oleh KOTAKU itu mas”(H,160824)

Hal senada juga disampaikan oleh E terkait dengan bagaimana proses pengambilan keputusan program KOTAKU di Kelurahan Tegalsari sebagai berikut :

“Ya mas semua Masyarakat telah mengkonfirmasi ke saya bahwa masyarakat setuju dan sangat support dengan pelaksanaan program KOTAKU ini”(E,160424)

“Hasil rapat disampaikan ke semua warga pada saat rapat bulanan rw mas, untuk respon dari warga setuju karena itu kan untuk kebersihan lingkungannya juga.”(AT,180824)

“Semua masyarakat setuju dan mendukung program KOTAKU tidak ada kelompok masyarakat yang menolak rencana pembangunan dari KOTAKU.”(S,180224)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan setelah diadakannya sosialisasi mengenai proram KOTAKU, semua masyarakat setuju dengan program KOTAKU karena program tersebut sangat bermanfaat bagi lingkungan di Kelurahan Tegalsari.

4.1.3 Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pelaksanaan

Program KOTAKU dalam pelaksanaannya menggunakan platform Kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dengan menempatkan peran Masyarakat dengan pemerintah kabupaten/kota sebagai actor utama (pengendali). Implementasi program dalam mencegah dan meningkatkan suatu permukiman dengan kondisi kumuh dimulai dari Langkah pendataan, perencanaan program yang berisikan sasaran dalam penanganan permukiman kumuh, implementasi program, pemantauan dan evaluasi keberlangsungan program serta keberlanjutan. Berikut ini adalah data indikasi program KOTAKU yang telah dilaksanakan di Kelurahan Tegalsari berdasarkan data dari DISPERKIM Kota Tegal.

Tabel IV. 1 Indikasi Program KOTAKU di Kelurahan Tegalsari

Kegiatan	Vol	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
Fisik						
Penataan Bangunan	212	unit	18			
Rehab RTLH	48	unit	25	23		
Jalan Lingkungan	1.635	meter	885	550	200	
Drainase baru	520	meter	520			
Rehab Drainase	3.055	meter	635	1.105	750	550
Septitank Komunal	13	unit	11	2		
Tong Sampah	10	unit	10			
RTH	2	unit	2			
Non Fisik						
Sosialisasi Dan Edukasi Tentang Standar Kelayakan Hunian	2	paket	1		1	
Sosialisasi Dan Edukasi Pemeliharaan Konstruksi	2	paket	1		1	
Sosialisasi PHBS	4	paket	1	1	1	1
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	2	paket	1		1	
Pelatihan UMKM/Kewirausahaan	2	paket		1		1

Sumber: RPLP Kota Tegal, 2020

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa setiap tahapan dilaksanakan melalui partisipasi antara masyarakat dengan pemerintah kabupaten/kota bersama stakeholder, masyarakat diikuti dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas dari permukiman kumuh sangat erat kaitannya dengan masyarakat, serta penerapan prinsip bahwa Pembangunan yang dilakukan dipastikan tidak boleh membahayakan Masyarakat, sehingga bergantung pada penilaian lingkungan dan sosial (Langkah-langkah keamanan) dalam pelaksanaan program KOTAKU. Menurut data DISPERKIM Kota Tegal, nilai kontrak pelaksanaan program KOTAKU Kelurahan Tegalsari memiliki nilai kurang lebih 22 miliar. Berikut penjelasan dari Kelurahan Tegalsari melalui E sebagai pihak DISPERKIM Kota Tegal.

“Masyarakat dilibatkan dalam proses awal sosialisasi, pengerjaan program seperti mereka dijadikan tenaga kerja, pengawasan program dan dilibatkan langsung dalam proses evaluasi dan monitoring hasil pengerjaan.” (E,160224)

Hal senada juga dikatakan oleh S terkait dengan bagaimana proses pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Tegalsari sebagai berikut:

“Kalau dari BKM dibantu dari Masyarakat itu dalam proses pelaksanaan itu membantu pekerjaan skala kecil kecilan seperti pengerjaan jalan dan saluran serta ibu ibunya itu membuat wedang buat pekerjaanya itu mas dan sebagainya.” (S,180224)

“Masyarakat ada yang dijadikan tenaga kerja dalam proses pengerjaan jalan, perbaikan drainase.” (H, 170224)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan program KOTAKU, melalui beberapa hal seperti membantu dalam proses perbaikan jalan, drainase, ibu ibu memberi minuman untuk para pekerja dan lain sebagainya.

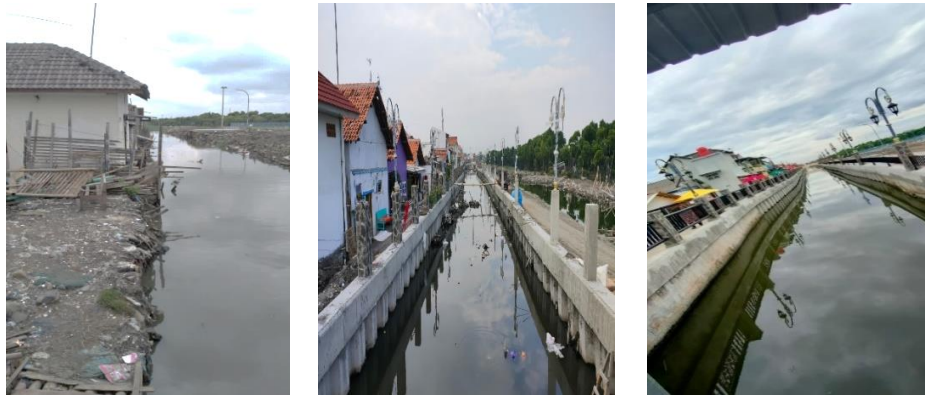




Gambar IV. 2 Perbedaan Kondisi Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Program KOTAKU

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, 2016





Gambar IV. 3 Proses Pelaksanaan Program KOTAKU

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, 2016

A. Tenaga Kerja

Dalam proses pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Tegalsari terdapat partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat yaitu berupa tenaga kerja, masyarakat terlibat langsung dalam proses pelaksanaan atau pengerjaan KOTAKU, berupa pengerjaan jalan dan drainase. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan E mengenai proses pelaksanaan program KOTAKU :

“Pengerjaan program seperti mereka dijadikan tenaga kerja, pengawasan program dan dilibatkan langsung dalam proses evaluasi dan monitoring hasil pengerjaan” (E,160424)

Hal senada juga disampaikan oleh H terkait bagaimana proses pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Tegalsari sebagai berikut :

“Masyarakat ada yang dijadikan pekerja dalam proses pengerjaan jalan, perbaikan drainase, dan juga membantu menyediakan jajan serta minuman untuk para pekerja.” (H,170224)

“Masyarakat disini kan rata rata nelayan ya jadi hanya membantu pengerjaan jalan sama perbaikan drainase itupun tidak semua warga karena banyak yang bekerja nelayan.” (AT,180224)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan program KOTAKU masyarakat laki-laki melalui BKM dilibatkan secara langsung melalui tenaga kerja untuk membantu pengerjaan perbaikan jalan dan juga perbaikan drainase.

B. Makanan Ringan dan Minuman

Dalam proses pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Tegalsari selain partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga kerja terdapat juga partisipasi masyarakat dalam bentuk penyediaan konsumsi yang memberikan makanan ringan dan minuman untuk para pekerja yang dilakukan oleh ibu-ibu. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ibu Surni selaku warga perempuan mengenai partisipasi masyarakat dalam bentuk konsumsi :

“Menyediakan minuman sama jajan kecil kecilan aja sih mas waktu pengerjaan jalan kampung sama drainase.”(Ibu Surni,80824)

Hal senada juga disampaikan oleh S terkait dengan partisipasi masyarakat dalam bentuk konsumsi di Kelurahan Tegalsari :

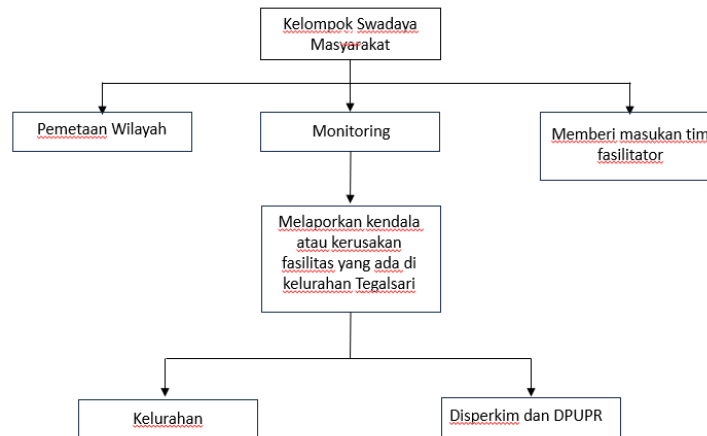
“Masyarakat ada yang dijadikan pekerja dalam proses pengerjaan jalan, perbaikan drainase, dan juga membantu menyediakan jajan serta minuman untuk para pekerja.”(H,170224)

“Kalau yang ibu ibu itu menyediakan itu mas minum untuk para pekerja dari pemerintah sama warga, jadi semua itu kita serahkan ke pemerintah saja.”(AT,180824)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan program KOTAKU terdapat partisipasi yang dilakukan oleh warga perempuan yaitu berupa konsumsi. Berbeda dengan partisipasi yang dilakukan oleh warga laki-laki yang membantu proses pelaksanaan dalam bentuk tenaga kerja, warga perempuan di Kelurahan Tegalsari juga membantu proses pelaksanaan dalam bentuk penyediaan makanan ringan dan minuman untuk para pekerja.

4.1.4 Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Evaluasi dan Monitoring

Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan hasil Pembangunan bisa dilihat dari kontribusi masyarakat dalam menjaga dan memelihara fasilitas yang telah dibangun dengan tujuan agar tetap berfungsi dengan baik.



Selain itu masyarakat juga terlibat langsung dalam membentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), tugas dari KSM yaitu membantu proses pemetaan wilayah menjelaskan kepada dinas dimana saja lokasi kumuh yang ada di kelurahan Tegalsari, monitoring program KSM melaporkan kendala atau kerusakan fasilitas yang sudah dibangun oleh KOTAKU kepada kelurahan, Disperkim, dan DPUPR, tetapi laporan yang disampaikan oleh masyarakat belum tentu oleh dinas terkait oleh karena itu Masyarakat Bersama KSM memperbaiki sendiri fasilitas yang rusak seperti menambal jalan lingkungan, serta memberi masukan kepada team fasilitator terkait dengan karakter masyarakat kondisi sosial dan kemasyarakatan. Dengan adanya program KOTAKU dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tegalsari ini dapat menimbulkan kesadaran diri masyarakat agar menjaga lingkungan sekitar dan memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun oleh program KOTAKU agar tetap berfungsi dengan baik. Berikut dibawah ini adalah data perubahan kondisi kekumuhan antara sebelum dan sesudah Pogram KOTAKU dilaksanakan menurut DISPERKIM Kota Tegal.

Tabel IV. 2 Perubahan Kondisi Kekumuhan Kota Tegal

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah Kumuh (Ha)	Pengurangan Kumuh 2021 (Ha)	Sisa Luas Kumuh Akhir 2021 (Ha)
1.	Margadana	Margadana	61.19	0	61.19
2.	Margadana	Pesurungan Lor	6.53	0	6.53
3.	Margadana	Sumur Panggang	38.09	0	38.09

4.	Tegal Barat	Tegalsari	7.32	7.32	0
5.	Tegal Selatan	Bandung	55.23	0	55.23
6.	Tegal Selatan	Debong Tengah	16.20	0	16.20
7.	Tegal Selatan	Randugunting	15.95	15.95	0
8.	Tegal Timur	Mintaragen	5.04	0	5.04
9.	Tegal Timur	Panggung	1.90	0	1.90
10.	Tegal Timur	Slerok	6.97	0	6.97
TOTAL			214.42	23.27	191.15

Sumber: DISPERKIM Kota Tegal

Berdasarkan tabel diatas program KOTAKU di Kelurahan Tegalsari berjalan dengan baik dan program sudah terlaksana semua. Dikuatkan dengan wawancara bersama bapak S yang menyampaikan:

“Secara fisik untuk penanganan dan pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Tegalsari sudah clear 100%.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan S mengenai evaluasi dan monitoring masyarakat dalam penanganan kawasan permukiman kumuh melalui program KOTAKU di Kelurahan Tegalsari.

“Untuk monitoring dan evaluasi kami membentuk yang namanya kelompok pemelihara, masyarakat dibuat kelompok – kelompok untuk merawat yang sudah dilakukan oleh program KOTAKU, evaluasi dari KOTAKU secara periodik ada tim – tim yang datang ke masyarakat melihat situasi, tapi lebih dominan masyarakat yang melaporkan kalau ada kerusakan.” (S,170224)

Hal senada disampaikan juga oleh E terkait dengan proses evaluasi dan monitoring Masyarakat program KOTAKU kelurahan Tegalsari Kota Tegal.

“Ya mas Masyarakat itu ada kelompok pemelihara yang bertugas untuk memelihara dan merawat fasilitas yang telah dibangun, dan Masyarakat juga melaporkan jika ada kendala.” (E,160224)

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai evaluasi dan monitoring program KOTAKU dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tegalsari, masyarakat membentuk kelompok pemelihara dengan tujuan fasilitas-fasilitas yang telah dibangun oleh program KOTAKU dapat dijaga dan dipelihara oleh masyarakat, serta masyarakat aktif melaporkan jika terdapat kendala.

A. Kelompok Pemelihara

Dalam proses evaluasi dan monitoring program KOTAKU di Kelurahan Tegalsari Kota Tegal, bentuk partisipasi masyarakat berupa menjaga dan memelihara fasilitas yang sudah dibangun oleh KOTAKU dalam penanganan kawasan permukiman kumuh, masyarakat bersama BKM membentuk kelompok pemelihara yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara fasilitas yang sudah dibangun oleh KOTAKU dan juga melaporkan jika ada kendala dalam proses pengerjaan. Berikut wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan E mengenai kelompok pemelihara :

“Pengawasan program dan dilibatkan langsung dalam proses evaluasi dan monitoring hasil pengerjaan” (E,160224)

Hal senada juga disampaikan oleh S terkait kelompok pemelihara :

“Untuk monitoring dan evaluasi kami membentuk yang namanya kelompok pemelihara, masyarakat dibuat kelompok – kelompok untuk merawat yang sudah dilakukan oleh program KOTAKU, evaluasi dari KOTAKU secara periodik ada tim – tim yang datang ke masyarakat melihat situasi, tapi lebih dominan masyarakat yang melaporkan kalau ada kerusakan.” (S,170224)

Berdasarkan hasil wawancara diatas pada proses evaluasi dan monitoring program KOTAKU, masyarakat bersama BKM membentuk kelompok pemelihara yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara fasilitas-fasilitas yang telah dibangun oleh KOTAKU dan masyarakat aktif melaporkan jika terdapat kendala. Hal ini dapat menumbuhkan rasa kesadaran diri masyarakat agar bersama-sama menjaga lingkungan sekitar dan memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun oleh KOTAKU.

B. Hasil Evaluasi

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah melalui aplikasi Nvivo. Hal ini dilakukan dengan membuat coding berdasarkan kategori – kategori yang membantu peneliti membuat tema dan melihat bagaimana hal – hal dilapangan dihubungkan dan berhubung satu dengan yang lain, coding ini dibuat berdasarkan pada pertanyaan penelitian, yang digunakan selama observasi lapangan bersama masyarakat di Kelurahan Tegalsari Kota Tegal. Klarifikasi nodes dalam coding Nvivo mengacu pada pedoman wawancara, sedangkan klasifikasi tema mengacu pada

pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan teori dan konsep dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Berdasarkan pengolahan data melalui coding Nvivo, ditemukan beberapa kata / kalimat utama yang sering muncul dalam data wawancara yang disajikan oleh peneliti di dalam nodes. Semakin banyak jumlah kata yang muncul maka akan semakin besar ukuran huruf dari kata tersebut, berikut hasil Word Cloud hasil analisis pengolahan data peneliti menggunakan Nvivo.



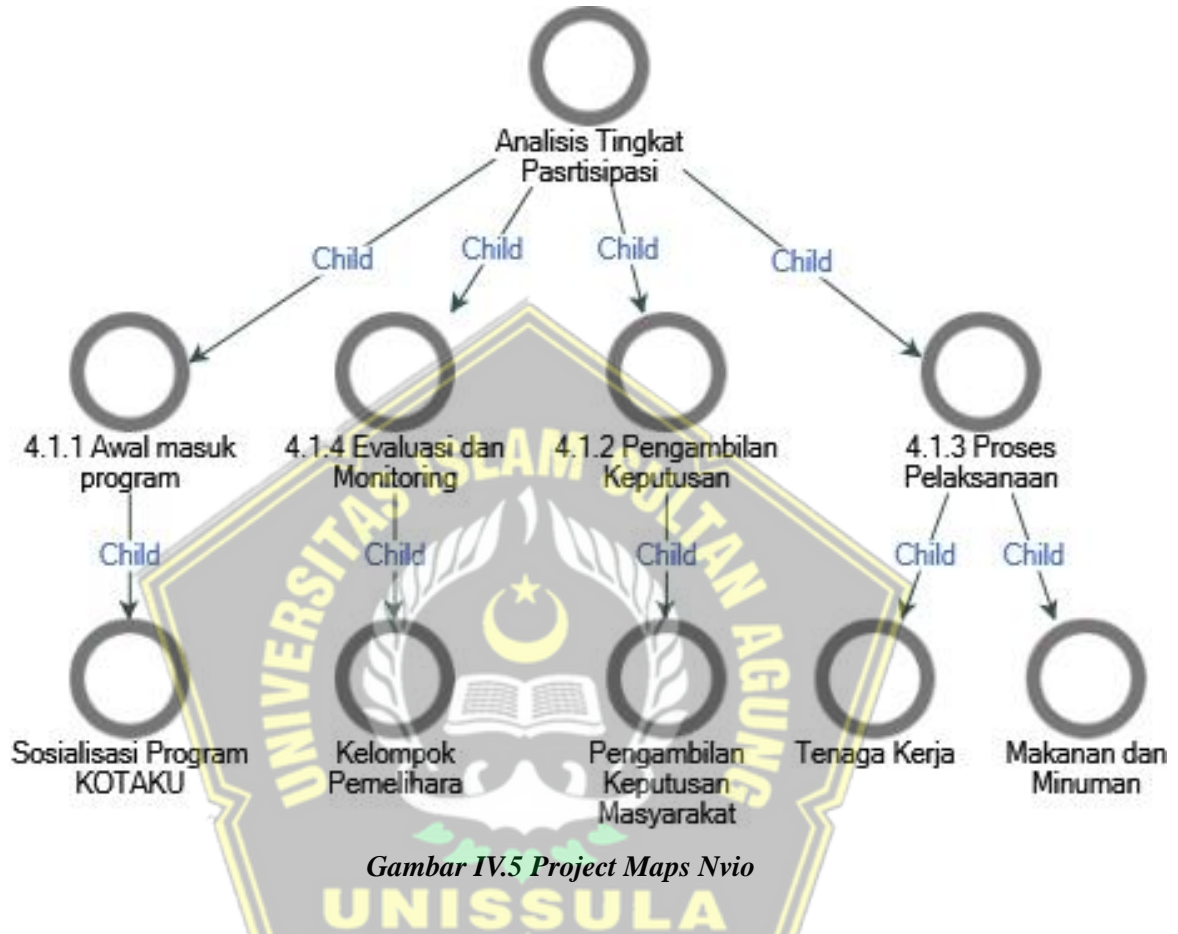
Gambar IV.4 Word Cloud Nvivo

Gambar IV. Merupakan gambar grafik hasil visualisasi data yang menjelaskan mengenai kalimat yang paling sering muncul dalam nodes. Ukuran font menunjukkan besaran masing – masing kata, semakin besar ukuran font tersebut maka kata tersebut adalah kata kata yang paling sering muncul. Sedangkan kata dengan font yang paling kecil ada kata yang jarang muncul dalam notes.

Dalam word cloud tersebut kata yang paling sering muncul yaitu masyarakat, program dan permukiman kemudian dibantu dengan kata lainnya yang memiliki ukuran lebih kecil. Hasil analisis Nvivo ini menjejaskan bahwa dalam penangan kawasan permukiman kumuh melalui program KOTAKU di Kelurahan Tegalsari Kota Tegal.

Hasil selanjutnya dari *word cloud* adalah menentukan *project maps*, *project maps* yang penulis gunakan menggunakan diagram yang menunjukkan keterhubungan

antar aspek. Lingkaran paling atas (parent) merupakan inti aspek, sedangkan lingkaran bawah (child) merupakan anak/komponen dari inti aspek.



Gambar IV.5 Project Maps Nvio

Dari gambar IV. Diatas menjelaskan mengenai hasil analisis yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini penulis menjelaskan hasil dari input, proses, output, outcome, dan impact dari masing – masing program menggunakan kerangka *logic model framework*. Dari diagram/bagan alir di bawah ini penulis menjelaskan mengenai keterhubungan antara program dengan masing – masing komponen logic model serta aspek pendukung yaitu berdasarkan aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek kesehatan. Berdasarkan hasil analisis Logic Model Framework yang dijelaskan dalam bagan alir tersebut :

Analisis Tingkat Partisipasi



Derajat Perubahan Lingkungan pada Kelurahan Tegalsari



4.2 Temuan Studi

Penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tegalsari melalui program KOTAKU membutuhkan partisipasi Masyarakat Kelurahan Tegalsari, manfaat dari penelitian ini memberikan informasi atau pengertian tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh melalui program KOTAKU, dan masyarakat di Kelurahan Tegalsari terlibat dalam tangga tingkat partisipasi therapy, informing, consultation, placation, dan partnersip yang termasuk dalam tangga tokenism dan non participation.



Tabel IV. 3 Temuan Studi Berdasarkan Kajian Teori

No.	Variabel	Parameter	Indikator	Temuan Studi
1.	Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Manipulation	Indikator manipulation tidak sesuai dengan penelitian ini karena seluruh masyarakat mengetahui semua rencana program yang diadakan oleh pemerintah, pemerintah dan masyarakat berkontribusi langsung dari awal perencanaan sampai pelaksanaan program. (-)
			Therapy	Indikator therapy sesuai dengan penelitian ini karena masyarakat datang sosialisasi dan hanya mendengarkan atau menyetujui informasi yang diberikan pemerintah. Sesuai bentuk partisipasi Masyarakat pada saat awal masuknya program dan partisipasi Masyarakat dalam pengambilan Keputusan.
			Informing	Indikator informing sesuai dengan penelitian ini karena terdapat Masyarakat yang tidak menghadiri dalam pertemuan karena mempunyai kesibukan masing – masing tetapi masyarakat tersebut menyetujui keputusan rapat. Sesuai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan Keputusan. Masyarakat juga melakukan evaluasi dan monitoring program jika ada kendala dilapangan tetapi itu belum tentu ada timbal balik dari pemerintah. Sesuai bentuk partisipasi Masyarakat dalam proses evaluasi dan monitoring.
			Consultation	Indikator consultation sesuai dengan penelitian ini karena pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan rencana program KOTAKU, kemudian memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan usulan kepada pemerintah, namun Keputusan akhir ada di tangan pemerintah.
			Placation	Indikator placation sesuai dengan penelitian karena saran atau ide dari masyarakat masih ditahan atau dinilai layak atau tidaknya. Saran dari masyarakat diterima tapi belum tentu dilaksanakan.
			Partnership	Indikator partnership sesuai dengan penelitian karena semua actor pelaksana program KOTAKU seperti DISPERKIM, DPUPR, kelurahan, Masyarakat berkordinasi dan bekerjasama dalam pelaksanaan program KOTAKU. Masyarakat disini melaksanakan partisipasi berupa sosialisasi, merelakan lahannya untuk pelebaran akses jalan kampung, dilibatkan dalam proses pelaksanaan program sebagai tenaga kerja dan pengawasan program, dan pada tahap akhir masyarakat dilibatkan untuk pemeliharaan. Sesuai bentuk partisipasi Masyarakat dalam proses pelaksanaan,
			Delegated Power	Indikator delegated power tidak sesuai dengan penelitian karena masyarakat disini tidak diberi kekuasaan Sebagian atau seluruh program. Karena seluruh rencana kerja semua dari pemerintah.
			Citizen Control	Indikator citizen control tidak sesuai dengan penelitian karena Masyarakat hanya melakukan evaluasi dan monitoring jika ada kendala dalam proses pengerjaan dan perawatan tetapi belum tentu ada timbal balik dari pemerintah.

No.	Variabel	Parameter	Indikator	Temuan Studi
2.	Permukiman Kumuh	Bangunan		Keteraturan bangunan di RW 001 dan RW 002 jika dihitung secara keseluruhan termasuk dalam kategori buruk karena keteraturan bangunan di wilayah tersebut hanya 45,23%. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran dari pemilik bangunan. Selain itu, tipe pemadatan permukiman di Kelurahan Tegalsari adalah Infiltrasi yang artinya pemadatan terjadi karena masyarakat membangun rumah di lahan-lahan yang kosong tanpa memikirkan keteraturan bangunan bahkan minim akses.
		Jalan Lingkungan		Penanganan jalan yang dilakukan diantaranya pelebaran jalan dan perkerasan jalan. Lebar jalan di RW 1 sebelumnya didominasi oleh jalan dengan lebar kurang dari 2 meter. Akan tetapi setelah pelebaran jalan di RW tersebut kondisinya cenderung lebih beragam yaitu 69,2% jalan dengan lebar kurang dari 2 meter yang banyak terdapat di dalam area permukiman dan 30,2% jalan dengan lebar 2 hingga 3,5 meter yang banyak terdapat di sekitar kawasan Taman Tegalsari.
		Jaringan Air Bersih		Saat ini sumber air layak minum di Kelurahan Tegalsari 100% sudah terpenuhi dengan masuknya saluran air PDAM di wilayah tersebut karena daerah penelitian berada di pesisir tentu saja jika menggunakan air tanah dangkal akan terasa payau dan berwarna keruh karena proses intrusi air laut sehingga tidak layak konsumsi.
		Jaringan Persampahan		Dari adanya program KOTAKU pemerintah memberikan perbaikan fasilitas dan penambahan fasilitas persampahan di kelurahan Tegalsari, sampah hasil dari rumah tangga kemudian diangkut oleh petugas dan kemudian dibuang langsung ke TPS. Tetapi dengan perbaikan dan penambahan fasilitas yang diberikan pemerintah itu tidak dapat melindungi lingkungan mereka jika mereka masih minim akan kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungannya.
		Jaringan Drainase Lingkungan		-
		Jaringan Air Limbah		Setelah masuknya program KOTAKU Di Kelurahan Tegalsari menggunakan sistem pengelolaan limbah berupa septitank rumah tangga dan septitank komunal. Di sepanjang bantaran sungai Siwatu telah difasilitasi dan direalisasikan program bantuan sanitasi yang berkolaborasi antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal serta Dinas Kesehatan Kota Tegal.

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2024

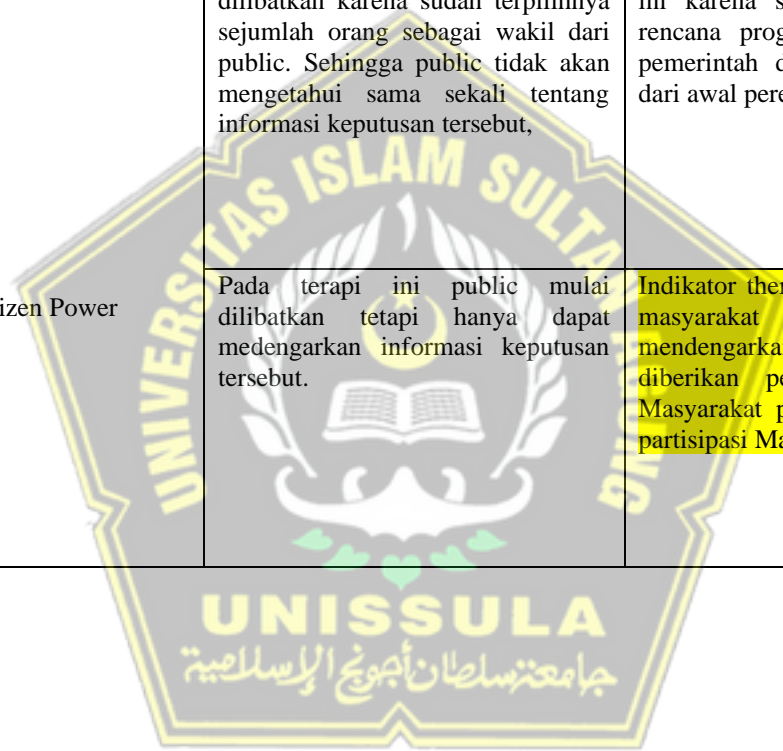
Tabel IV. 4 Temuan Studi Hasil Pembahasan

Analisis	Sub Analisis	Temuan Studi
Analisis Bentuk dan Analisis Tingkat Partisipasi Dalam Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Tegalsari	Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Saat Awal Masuknya Program KOTAKU	Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa tahap awal sebelum berjalannya program KOTAKU di kampung nelayan Tegalsari, telah dilakukam sosialissi yang difasilitasi oleh Kelurahan Tegalsari. Sosialisasi tersebut bertujuan sebagai bentuk komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam pelaksanaan program KOTAKU. Seluruh pelaksana program memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk mendengarkan penjelasan dari pemerintah terkait program KOTAKU, karena KOTAKU merupakan salah satu program penanganan permukiman kumuh yang ditujukan untuk Masyarakat dan harus melibatkan masyarakat tersebut.
	Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan	Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan setelah diadakannya sosialisasi mengenai program KOTAKU, semua masyarakat setuju dengan program program yang akan dilaksanakan oleh KOTAKU. Namun ada juga catatan dari masyarakat mengenai program pelebaran jalan, masyarakat setuju tetapi dengan syarat tanah yang bersertifikat SHM dapat ganti rugi, tanah milik pemerintah kota SK tidak dapat ganti rugi, dan bangunan yang kena proyek dapat ganti.
	Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pelaksanaan	Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan program KOTAKU, melalui beberapa hal seperti membantu dalam proses perbaikan jalan, drainase, ibu ibu memberi minuman untuk para pekerja dan lain sebagainya.
	Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Evaluasi dan Monitoring.	Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai evaluasi dan monitoring program KOTAKU dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tegalsari, masyarakat membentuk kelompok pemelihara dengan tujuan fasilitas-fasilitas yang telah dibangun oleh program KOTAKU dapat dijaga dan dipelihara oleh masyarakat, serta masyarakat aktif melaporkan jika terdapat kendala.

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2024

Tabel IV. 5 Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Tegalsari

Tangga Tingkat Partisipasi		Penjelasan	Temuan Studi
Manipulation		<p>Pada level ini public tidak dilibatkan karena sudah terpilihnya sejumlah orang sebagai wakil dari public. Sehingga public tidak akan mengetahui sama sekali tentang informasi keputusan tersebut.</p>	<p>Indikator manipulation tidak sesuai dengan penelitian ini karena seluruh masyarakat mengetahui semua rencana program yang diadakan oleh pemerintah, pemerintah dan masyarakat berkontribusi langsung dari awal perencanaan sampai pelaksanaan program.</p>
Therapy	Citizen Power	<p>Pada terapi ini public mulai dilibatkan tetapi hanya dapat mendengarkan informasi keputusan tersebut.</p>	<p>Indikator therapy sesuai dengan penelitian ini karena masyarakat datang sosialisasi dan hanya mendengarkan atau menyetujui informasi yang diberikan pemerintah. Sesuai bentuk partisipasi Masyarakat pada saat awal masuknya program dan partisipasi Masyarakat dalam pengambilan Keputusan.</p>



Tangga Tingkat Partisipasi		Penjelasan	Temuan Studi
Informing		Pada level ini otoritas berkuasa hanya berkomunikasi searah atau hanya memenuhi satu informasi yang akan dan sudah dilaksanakan.	Indikator informing sesuai dengan penelitian ini karena terdapat Masyarakat yang tidak menghadiri dalam pertemuan karena mempunyai kesibukan masing – masing tetapi masyarakat tersebut menyetujui keputusan rapat. Sesuai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan Keputusan. Masyarakat juga melakukan evaluasi dan monitoring program jika ada kendala dilapangan tetapi itu belum tentu ada timbal balik dari pemerintah. Sesuai bentuk partisipasi Masyarakat pada saat awal masuk dan dalam proses evaluasi dan monitoring.
Consultation		Untuk level ini sudah adanya diskusi dengan banyak elemen tetapi yang berkuasa menentukan apakah saran dan kritik public akan digunakan.	Indikator consultation sesuai dengan penelitian ini karena pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan rencana program KOTAKU, kemudian memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan usulan kepada pemerintah, namun Keputusan akhir ada di tangan pemerintah.
Placation	Tokenism	Pada level ini pihak yang berkuasa hanya berjanji untuk melaksanakan aspirasi public tetapi diam - diam menjalankan rencana semula.	Indikator placation sesuai dengan penelitian karena saran atau ide dari Masyarakat masih ditahan atau dinilai layak atau tidaknya. Saran dari Masyarakat diterima tapi belum tentu dilaksanakan.

Tangga Tingkat Partisipasi		Penjelasan	Temuan Studi
Partnership	Non Participation	Pada level partnership telah mencapai citizen power, sehingga pada level ini terbentuknya kerjasama multipihak dalam merumuskan atau melaksanakan rencana semula,	Indikator partnership sesuai dengan penelitian karena semua actor pelaksana program KOTAKU seperti DISPERKIM, DPUPR, kelurahan, Masyarakat berkordinasi dan bekerjasama dalam pelaksanaan program KOTAKU. Masyarakat disini melaksanakan partisipasi berupa sosialisasi, merelakan lahannya untuk pelebaran akses jalan kampung, dilibatkan dalam proses pelaksanaan program sebagai tenaga kerja dan pengawasan program, dan pada tahap akhir masyarakat dilibatkan untuk pemeliharaan. Sesuai bentuk partisipasi Masyarakat dalam proses pelaksanaan.
Delegated Power		Naik ke level delegated dimana masyarakat memegang mayoritas kursi di komite dengan wewenang yang didelegasikan untuk membuat Keputusan, sehingga peran public untuk menjamin akuntabilitas program kepada mereka.	Indikator delegated power tidak sesuai dengan penelitian karena masyarakat disini tidak diberi kekuasaan Sebagian atau seluruh program. Karena seluruh rencana kerja semua dari pemerintah.
Citizen Control		Pada level ini dimana public yang lebih mendominasi dan peran public hingga mengevaluasi kinerja mereka.	Indikator citizen control tidak sesuai dengan penelitian karena Masyarakat hanya melakukan evaluasi dan monitoring jika ada kendala dalam proses pengerjaan dan perawatan tetapi belum tentu ada timbal balik dari pemerintah.

Sumber : Hasil Analisis Penulis 2024

Tabel IV. 6 Temuan Studi

Program	Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat				
	Awal Masuk Program	Pengambilan Keputusan	Proses Pelaksanaan		Evaluasi dan Monitoring
Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Program KOTAKU	Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tahap awal sebelum berjalannya program KOTAKU di kampung nelayan Tegalsari, telah dilakukam sosialisasi yang difasilitasi oleh Kelurahan Tegalsari. Sosialisasi tersebut bertujuan sebagai bentuk komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam pelaksanaan program KOTAKU. Seluruh pelaksana program memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk bertanya terkait dengan rencana program yang dirancang pemerintah dan menerima berbagai masukan-masukan atau ide pokok program dari masyarakat	Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan setelah diadakannya sosialisasi mengenai program KOTAKU, semua masyarakat setuju dengan program yang akan dilaksanakan oleh KOTAKU. Namun ada juga catatan dari masyarakat mengenai program pelebaran jalan, masyarakat setuju tetapi dengan syarat tanah yang bersertifikat SHM dapat ganti rugi, tanah milik pemerintah kota SK tidak dapat ganti rugi, dan bangunan yang kena proyek dapat ganti.	Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan program KOTAKU, melalui beberapa hal seperti membantu dalam proses perbaikan jalan, drainase, ibu ibu memberi minuman untuk para pekerja dan lain sebagainya.		Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai evaluasi dan monitoring program KOTAKU dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tegalsari, masyarakat membentuk kelompok pemelihara dengan tujuan fasilitas-fasilitas yang telah dibangun oleh program KOTAKU dapat dijaga dan dipelihara oleh masyarakat, serta masyarakat aktif melaporkan jika terdapat kendala.
	Sosialisasi Program KOTAKU	Pengambilan Keputusan	Tenaga Kerja	Makanan Ringan dan Minuman	Kelompok Pemelihara
	Berdasarkan hasil wawancara diatas sosialisasi bertujuan sebagai bentuk komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam mencapai tujuan dan	Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan setelah diadakannya sosialisasi mengenai proram	Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan	Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan	Berdasarkan hasil wawancara diatas pada proses evaluasi dan monitoring program KOTAKU, masyarakat bersama BKM membentuk kelompok pemelihara

	<p>sasaran program KOTAKU. Masyarakat dilibatkan langsung dalam proses sosialisasi program KOTAKU agar masyarakat mengetahui tujuan dan rencana program KOTAKU serta pemerintah menerima ide atau masukan dari masyarakat yang mempertanyakan tentang program KOTAKU.</p>	<p>KOTAKU, semua masyarakat setuju dengan program KOTAKU karena program tersebut sangat bermanfaat bagi lingkungan di Kelurahan Tegalsari.</p>	<p>bahwa dalam proses pelaksanaan program KOTAKU masyarakat laki-laki melalui BKM dilibatkan secara langsung melalui tenaga kerja untuk membantu pengerjaan perbaikan jalan dan juga perbaikan drainase.</p>	<p>bahwa dalam proses pelaksanaan program KOTAKU terdapat partisipasi yang dilakukan oleh warga perempuan yaitu berupa konsumsi warga perempuan di Kelurahan Tegalsari juga membantu proses pelaksanaan dalam bentuk penyediaan makanan ringan dan minuman untuk para pekerja.</p>	<p>yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara fasilitas-fasilitas yang telah dibangun oleh KOTAKU dan masyarakat aktif melaporkan jika terdapat kendala.</p>
--	---	--	--	--	---



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari penelitian yang dilakukan penulis tentang Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Tegalsari Kota Tegal, menyimpulkan beberapa hal berdasarkan data dan analisis yang sudah dilakukan sekaligus Menyusun saran dan rekomendasinya. Hal tersebut dijabarkan secara detail sebagai berikut.

5.1 Kesimpulan

1. Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses awal masuknya program KOTAKU masyarakat diberi pemahaman terkait tujuan dan sasaran program KOTAKU melalui kegiatan sosialisasi. Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yaitu masyarakat hadir dalam pertemuan untuk memberikan usulan atau ide terkait dengan penanganan kawasan permukiman kumuh melalui program KOTAKU serta semua masyarakat setuju dengan program – program yang akan dilaksanakan oleh KOTAKU. Bentuk partisipasi dalam proses pelaksanaan program yaitu masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan program KOTAKU, melalui beberapa hal seperti membantu dalam proses perbaikan jalan, drainase, ibu ibu memberi minuman untuk para pekerja dan lain sebagainya. Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi dan monitoring program KOTAKU dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tegalsari, masyarakat membentuk kelompok pemelihara dengan tujuan fasilitas-fasilitas yang telah dibangun oleh program KOTAKU dapat dijaga dan dipelihara oleh masyarakat, serta masyarakat aktif melaporkan jika terdapat kendala.
2. Tingkat partisipasi Masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh melalui program KOTAKU di Kelurahan Tegalsari Kota Tegal termasuk rendah karena partisipasi disana berada dalam tangga tingkat partisipasi

therapy, informing, consultation, placation, dan partnersip yang termasuk dalam tangga tokenism dan non participation.

5.2 Rekomendasi

Terdapat masukan yang peneliti berikan terkait partisipasi Masyarakat dalam penanganan Kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tegalsari. Adapun rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan partisipasi Masyarakat agar tetap berkelanjutan dalam melaksanakan program KOTAKU dan menciptakan Kerjasama terhadap organisasi terkait agar pelaksanaan program KOTAKU dapat berjalan dengan mudah.
2. Lebih banyak melibatkan instansi terkait kelompok organisasi, dan Masyarakat untuk menjalankan program penanganan Kawasan permukiman kumuh.
3. Pemerintah sebagai pelaksana lebih banyak memberingan pengertian kepada masyarakat terkait tujuan dan sasaran program yang melibatkan masyarakat karena program penanganan kawasan kumuh ini ditujukan untuk masyarakat, jadi memerlukan peran yang aktif dari masyarakat.
4. Perlu adanya kegiatan monitoring atau peninjauan yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pelaksana secara langsung ke lokasi dan secara berkala guna memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan, sehingga dapat membantu percepatan penanganan kawasan permukiman kumuh.
5. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk menjaga fasilitas yang sudah diperbaiki dan dibangun oleh pemerintah untuk menangani kawasan permukiman kumuh mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, T. (2018). Kampung Tematik Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Permasalahan Permukiman Kumuh Di Kota Malang. *Wahana*, 70(2), 37–48. <https://doi.org/10.36456/wahana.v70i2.1741>
- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). 濟無No Title No Title No Title. July, 1–23.
- Crystallography, X. D. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 31201900025, 1–23.
- Ode Sitti Jurianti Aswad, W. (2016). *Permasalahan Permukiman Kumuh Kampung Nelayan Tegalsari, Kota Tegal. 2016*(Buku II), 1–15.
- Ridlo, M. A. (2020). Permukiman Liar (Squatter Settlement) Di Jalur Kereta Api Kota Semarang. *Jurnal Planologi*, 17(2), 150. <https://doi.org/10.30659/jpsa.v17i2.12790>
- Ridlo, M. A. (2001). *Kemiskinan di Perkotaan*. 1–131.
- Rosyida, I., & Tonny Nasdian, F. (2011). Partisipasi Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(1), 51–70. <https://doi.org/10.22500/sodality.v5i1.5832>
- Sabila, T., & Sriyono. (2019). Perkembangan dan Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Permukiman Kumuh di Kelurahan Tegalsari Kota Tegal (Tahun2007-2017). *Geo Image*, 8(2), 141–150.
- Wafiqah, I. (2000). *Evaluasi Penataan dan Revitalisasi Permukiman Kumuh di Wilayah Jaya Laksana dan Prajurit Nangyu, Kelurahan 3-4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang*. 21–42.
- Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ditrektorat Jendral Cipta Karya Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
- Grace Viva Maranathasya (2022). Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Agrowiisata Kopi di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara.